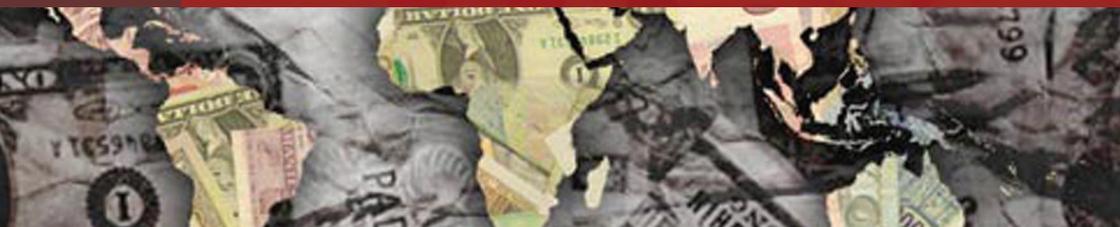


INDEF

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014

AKANKAH KRISIS BERLANJUT?



Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014

AKANKAH KRISIS BERLANJUT?

2013

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014

AKANKAH KRISIS BERLANJUT?

Penulis: Enny Sri Hartati
Ahmad Erani Yustika
Eko Listiyanto
Abdul Manap Pulungan
Ahmad Heri Firdaus
Abra Puspa Ghani Talattov
Muhamad Habibilah
Mohammad Reza Hafiz A.
Lestari Agusalim

Desain Cover dan Tata Latak: Sarwo Edy

Nov, 2013

ISBN: 979-97810-25



Daftar Isi

Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vii	
BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Perkembangan Perekonomian Global	13
	2.1. Pertumbuhan Ekonomi Global	14
	2.2. Tingkat Inflasi	17
	2.3. Neraca Berjalan	18
	2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	20
	2.5. Perkembangan Pasar Keuangan	21
	2.6. Perkembangan Harga Komoditas Internasional	25
	2.7. Negara-Negara Rawan Nilai Tukar	27
BAB III	Evaluasi Makro Ekonomi Indonesia 2013	29
	3.1. Pertumbuhan Ekonomi	30
	3.2. Sektor Moneter	35
	3.2.1. Inflasi	35
	3.2.2. Suku Bunga	38
	3.2.3. Nilai Tukar Rupiah	40
	3.3. Kinerja Perbankan	42
	3.4. Sektor Fiskal	44

3.5. Kinerja Investasi	47
3.6. Sektor Luar Negeri	50
3.7. Pengangguran dan Kemiskinan	53
BAB IV	
<i>Tapering Off</i> dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia	59
4.1. Isu <i>Tapering Off</i>	59
4.2. Penundaan <i>Tapering Off</i>	62
4.3. Dampak <i>Tapering off</i> terhadap Indonesia	64
4.3.1. Gejolak Nilai Tukar	64
4.3.2. Kontraksi Moneter	67
4.3.3. Meningkatkan Resiko Likuiditas	68
4.3.4. Paceklik Dollar	69
4.3.5. Repatriasi Kapital	70
4.3.6. Instabilitas Pasar Modal dan Uang	72
4.3.7. Pengaruh pada Sektor Perbankan	74
4.3.8. Kesehatan Fiskal	75
4.4. Menangkal Penjalaran Nilai Tukar	78
BAB V	
Ekonomi Terbelit Defisit	81
5.1. Potret Buram Transaksi Berjalan	82
5.2. Defisit Perdagangan Minim Pengaman	88
5.3. Defisit Keseimbangan Primer APBN	95
5.4. Keluar dari Belitan Defisit	98
BAB VI	
Menakar Platform Kedaulatan Ekonomi Capres	101
6.1. Kedaulatan Pangan	102
6.2. Kedaulatan Energi	108
6.3. Kendala Infrastruktur	109
6.3.1. Keterpurukan Sektor Riil	121
6.4. Keterbatasan Peranan Sektor Keuangan	124
6.5. Rekomendasi INDEF	128

6.5.1. Membangun Kedaulatan Pangan	128
6.5.2. Mewujudkan Kedaulatan Energi: Solusi Sisi <i>Demand-Supply</i>	131
6.5.3. Akselerasi Infrastruktur	132
6.5.4. Membangkitkan Sektor Riil	134
6.5.5. Memperdalam Peranan Sektor Keuangan	135
BAB VII Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014	137
7.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Lain	139
7.2. Pertumbuhan Ekonomi 2014	139
7.3. Inflasi	142
7.4. Nilai tukar	143
7.5. Pengangguran dan Kemiskinan	143
Daftar Pustaka	145



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Perkembangan Aktual PDB Riil, Inflasi, Neraca Transaksi Berjalan dan Tingkat Pengangguran Terbuka	17
Tabel 2.2.	Negara-Negara Rawan Nilai Tukar	28
Tabel 3.1.	Laju Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (persen)	31
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Komponen- Komponen PDB Pengeluaran	34
Tabel 3.3.	Perkembangan Inflasi Januari – September 2013 (persen)	38
Tabel 3.4.	Kurs Tengah Beberapa Mata Uang terhadap Rupiah	42
Tabel 3.5.	Kinerja Perbankan, Januari – September 2013	43
Tabel 3.6.	Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Menurut Sektor Triwulan III - 2013	49
Tabel 3.7.	Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Keterampilan	54
Tabel 4.1.	Perkembangan Indikator Makroekonomi Amerika Serikat	61
Tabel 4.2.	Nilai Tukar AS Dollar terhadap Beberapa Mata Uang	65
Tabel 4.3.	Nilai Tukar Rupiah terhadap Mitra Dagang Utama	66
Tabel 4.4.	Perkembangan Suku Bunga di Indonesia	68
Tabel 4.5.	Perkembangan Realisasi Suku Bunga SPN (Rata-rata Tertimbang)	73
Tabel 4.6.	Struktur Kepemilikan SBN Asing di Indonesia	74
Tabel 4.7.	Aliran Dollar Amerika Serikat dari Perdagangan Internasional	76
Tabel 4.8.	Perkembangan Indikator Utang Indonesia	78
Tabel 5.1.	Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia	89

Tabel 5.2.	Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Mitra Dagang Utama (Miliar US\$)	92
Tabel 6.1.	Ketergantungan Impor Pangan Indonesia	104
Tabel 6.2.	Perbandingan Indikator Infrastruktur Beberapa Negara, Tahun 2011	114
Tabel 6.3.	Peringkat Kualitas Infrastruktur Indonesia	117
Tabel 6.4.	Indikator Pengembangan Pasar Keuangan Beberapa Negara	126
Tabel 7.1.	Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014 INDEF	142



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Perbandingan Pola Pergerakan Inflasi Tahun 2008, 2009 dan 2013	5
Gambar 1.2.	Respon BI Rate terhadap Pergerakan Nilai Tukar Tahun 2008 dan 2013	7
Gambar 2.1.	Perkembangan Beberapa Komoditas Utama Dunia	26
Gambar 3.1.	Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Beberapa Negara/Kawasan	39
Gambar 3.2.	Perkembangan Suku Bunga, Januari-September 2013 (persen)	40
Gambar 3.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (1 Januari – 31 Oktober 2013)	47
Gambar 3.4.	Perkembangan Realisasi Investasi Triwulanan 2010 – 2013	48
Gambar 3.5.	Defisit Transaksi Berjalan Indonesia s.d. Triwulan III 2013	51
Gambar 3.6.	Neraca Transaksi Berjalan 2013 (Juta US\$)	52
Gambar 3.7.	Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 (persen)	56
Gambar 3.8	Upah Minimum Provinsi Rata-rata Indonesia 2009-2013 (juta rupiah)	57
Gambar 4.1.	Perkembangan Suku Bunga Kebijakan Beberapa Bank Sentral Oktober 2013	67
Gambar 4.2.	Posisi Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah 2013	70
Gambar 4.3.	Neraca Pendapatan Investasi (Juta US\$)	71
Gambar 5.1.	Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia (US\$ Juta)	83
Gambar 5.2.	Perkembangan Neraca Jasa Indonesia (US\$ Juta)	85

Gambar 5.3.	Perkembangan Neraca Pendapatan Indonesia (US\$ Juta)	86
Gambar 5.4.	Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas (US\$ miliar)	90
Gambar 5.5	Keseimbangan Primer APBN 2008-2014 (Rp Triliun)	93
Gambar 6.1.	Kinerja Produktivitas dan Luas Panen Beras	104
Gambar 6.2.	Rasio Anggaran Infrastruktur terhadap PDB	116
Gambar 6.3.	Perbandingan Luas Wilayah, Penduduk, dan Infrastruktur, 2012 (persen)	119



Bab 1

Pendahuluan

Menjelang berakhirnya tahun 2013 menandai bahwa Indonesia akan segera memasuki tahun politik 2014. Hajatan demokrasi yang merupakan siklus lima tahunan akan mulai digelar sekitar April dengan diawali pemilihan calon legislatif yang akan duduk di DPR sebagai wakil rakyat. Dari hasil pemilihan calon legislatif inilah yang akan menentukan proses pergantian rezim pemerintahan selanjutnya. Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, tentunya figur presiden terpilih akan sangat menentukan terhadap arah, pola dan kebijakan pembangunan untuk lima tahun mendatang, tidak terkecuali arah pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, peristiwa politik ini juga akan menentukan perubahan kondisi perekonomian Indonesia mendatang.

Sejak arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang tidak lagi berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR, maka menakar platform ekonomi para kandidat calon presiden menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi masyarakat. Karena platform ekonomi presiden terpilih akan sangat mewarnai dan menentukan disain kebijakan ekonomi selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019. Karenanya, banyak pelaku usaha dalam posisi *wait and see*, menunggu hasil pergantian rezim kepemimpinan nasional ini dengan berbagai agenda kebijakan ekonomi Indonesia yang dibawanya.

Namun, siapa pun pemimpin yang akan terpilih pada 2014 nanti, sejumlah tantangan ekonomi yang tidak ringan siap menanti penyelesaian. Salah satu aspek fundamental yang sangat mendesak untuk diselesaikan adalah persoalan defisit transaksi berjalan. Defisit ini secara umum mencerminkan kinerja perekonomian yang melemah: Ekspor bahan primer yang sangat tergantung pada harga komoditas internasional; impor minyak yang tidak dapat berkurang karena konsumsi BBM terus meningkat dan penyediaan energi alternatif berjalan sangat lambat; cermin dari defisit laten perdagangan jasa; hingga pembalikan modal atas keuntungan investasi asing di Indonesia melalui transfer pendapatan.

Jika persoalan defisit transaksi berjalan tidak dapat segera diselesaikan, implikasi bagi melemahnya kinerja perekonomian akan semakin besar. Defisit ini dapat memicu aksi spekulasi yang semakin liar sehingga dapat mendorong terjadinya depresiasi atau bahkan krisis nilai tukar. Memang neraca modal khususnya yang bersumber dari investasi asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) dapat menjadi bantalan atas kemungkinan ini. Namun, sejauh mana FDI dapat menopang jika perbaikan daya saing investasi masih menemui banyak hambatan?

Sudah jamak terjadi setiap menjelang terselenggaranya hajatan politik selalu dipenuhi hinggar-bingar pentas perpolitikan. Pemanasan suhu politik tak urung berimbas pada terganggunya instabilitas ekonomi. Selama tahun 2013 wajah perekonomian Indonesia diwarnai berbagai gejolak. Instabilitas

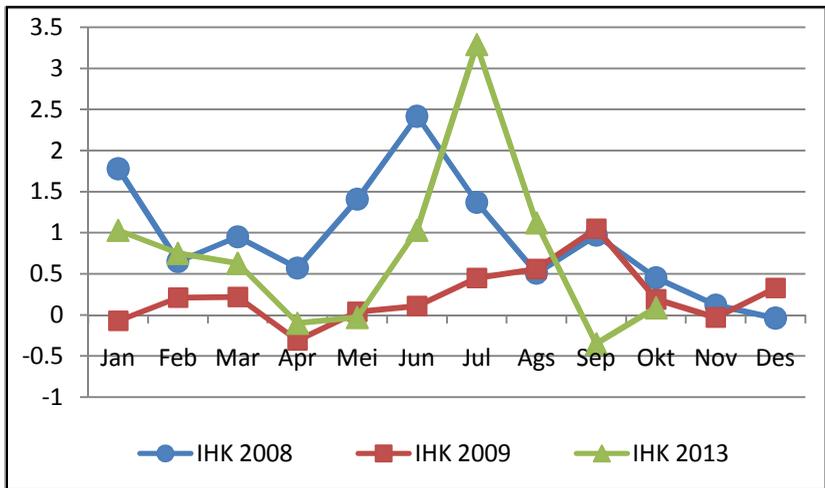
di sektor moneter merupakan isu yang sering menghiasi pemberitaan media masa. Jika menengok kembali kondisi 2008, satu tahun menjelang Pemilu 2009, berbagai gejolak ekonomi juga bermunculan. Menelusuri perkembangan beberapa indikator makro ekonomi utama, terdapat beberapa kesamaan pola dalam fluktuasi ekonomi yang terjadi antara 2008 dan 2013. Bahkan respon kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah pun cenderung mengandalkan instrumen yang sama.

Mencermati Gambar 1.1 terlihat jelas kemiripan pola pergerakan laju kenaikan harga-harga antara 2008 dan 2013. Sejak awal tahun tekanan inflasi telah sama-sama mendera perekonomian. Tekanan inflasi selama tiga bulan pertama 2008 telah mencapai 3,38 persen, *mtm*. Demikian juga tekanan inflasi selama triwulan I 2013 telah mencapai 2,41 persen. Tekanan inflasi sedikit mereda dalam beberapa saat ditunjukkan dengan adanya penurunan indeks harga pada bulan April 2008, dan deflasi pada April-Mei 2013. Namun belum sempat masyarakat bernafas lega, inflasi justru melambung pada bulan berikutnya. Tekanan inflasi selama tiga bulan berturut-turut dalam bulan Mei, Juni dan Juli 2008 menembus angka 5,2 persen, *mtm*. Demikian juga tekanan inflasi selama bulan Juni, Juli dan Agustus 2013 mencapai 5,4 persen, *mtm*. Selanjutnya deflasi terjadi sampai akhir tahun dan terjaga sampai terselenggaranya hajatan Pemilu 2009. Sayangnya, tren yang sama belum tentu sepenuhnya dapat diikuti oleh inflasi pada tahun 2014 mendatang.

Pemicu kenaikan harga antara 2009 dan 2013 memang bisa dikatakan hampir serupa. Disamping karena pengaruh harga barang bergejolak, terutama harga pangan juga dipicu oleh kebijakan penaikan harga BBM. Bedanya, kebijakan penaikan BBM pada Maret 2008, akhirnya dikoreksi Pemerintah sebelum

Pemilu. Pemerintah kembali menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 1 dan 15 Desember 2008, serta 12 Januari 2009. Untuk 2013 dan 2014 rasanya peluang Pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM hampir tidak mungkin. Tekanan defisit neraca perdagangan yang dikontribusikan oleh membengkaknya impor BBM dan besarnya tekanan subsidi BBM dalam APBN, jelas tidak memungkinkan Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan populis menurunkan harga BBM.

Di luar pengaruh kenaikan BBM, pemicu tekanan inflasi yang bersumber dari barang bergejolak juga menarik untuk dicermati. Terdapat beberapa fenomena kenaikan harga barang bergejolak yang sulit mendapatkan justifikasi analisis ekonomi. Sebut saja gejolak kenaikan harga beras pada 2008, padahal Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa produksi beras Indonesia dalam keadaan surplus. Demikian juga masalah meroketnya harga bawang merah, bawang putih, kedelai, dan daging sapi. Hampir tidak diketemukan *problem* atau gangguan dari sisi pasokan dan permintaan yang cukup signifikan. Indikasi permainan kartel sangat kuat dalam kasus importasi bawang putih, kedelai dan daging sapi impor. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mulai melakukan penyelidikan atas kasus importasi bawang putih dan kedelai. Bahkan kasus daging sapi impor telah masuk penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasi pihak-pihak yang terlibat diduga mempunyai kaitan erat antara kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karenanya, banyak pihak mensinyalir bahwa perilaku kartel yang berdampak pada gonjang-ganjing kenaikan harga bahan pokok bisa jadi menjadi instrumen untuk pemenuhan logistik Pemilu.



Sumber : SEKI BI, diolah

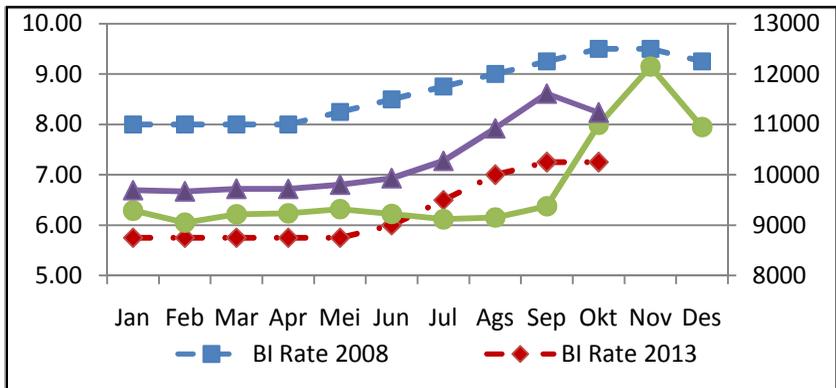
Gambar 1.1. Perbandingan Pola Pergerakan Inflasi 2008, 2009 dan 2013

Kemiripan gejala ekonomi juga dapat dilihat dari pergerakan nilai tukar. Gambar 1.2 menunjukkan tren pergerakan nilai tukar rupiah yang benar-benar sebangun selama tahun 2008 dan 2013. Sejak bulan Mei 2008 dan Juni 2013 sampai akhir tahun, Rupiah terus mengalami tekanan. Sumber persoalan utamanya, memang sama-sama terdapat masalah dari faktor fundamental ekonomi. Pada 2008 kondisi neraca perdagangan juga mengalami penurunan kinerja, walaupun tidak sampai defisit neraca perdagangan. Pada 2013 defisit neraca perdagangan semakin tidak terkendali bahkan menjangar pada defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran. Kondisi eksternal pasti juga ikut berpengaruh, di mana hampir semua mata uang Asia mengalami pelemahan terhadap dolar. Persoalannya, depresiasi nilai tukar yang dialami oleh Indonesia tergolong terbesar diantara negara di kawasan Asia. Anehnya, di

saat mata uang negara lain sudah mengalami penguatan terhadap dolar, Rupiah tetap saja jeblok.

Respons kebijakan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan gejolak nilai tukar juga sama yaitu melalui kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia. Pada 2008 BI rate mengalami kenaikan dari 8 persen pada posisi Januari 2008 menjadi 9,5 persen pada November 2008 dan diturunkan menjadi 9,25 persen mulai Desember 2008. Sementara itu pada 2013, setelah selama lima bulan BI rate dipertahankan dalam posisi 5,75 persen, sejak bulan Juni 2013 hampir setiap bulan terjadi kenaikan BI rate sekitar 25 bps, hingga posisi November 2013 BI rate telah mencapai 7,50 persen. Gambar 1.2 jelas memperlihatkan bahwa pengalaman selama 2008 kenaikan BI rate tidak mampu meredam gejolak nilai tukar.

Kenaikan BI rate jelas akan sulit diharapkan efektif sebagai instrumen stabilisasi inflasi maupun nilai tukar jika tanpa diikuti dengan kebijakan fiskal yang saling mendukung. Karena penyebab utama gejolak harga dan pelemahan Rupiah berakar dari sektor riil. Yang lebih jelas terlihat bahwa kenaikan suku bunga perbankan, termasuk suku bunga simpanan, akan menguntungkan para pemilik dana besar. Demikian juga para spekulan di pasar pasar uang, juga banyak yang menikmati atas rontoknya nilai tukar Rupiah.



Sumber : SEKI BI, diolah

Gambar 1.2. Respon BI Rate terhadap Pergerakan Nilai Tukar Tahun 2008 dan 2013

Sekilas gambaran di atas hanya ingin mengilustrasikan bahwa para ekonom akan sulit menafikan terdapat hubungan yang cukup signifikan antara variabel siklus politik lima tahunan dalam mempengaruhi kinerja ekonomi. Bahkan tak jarang potensi *moral hazard* ekonomi kerap terjadi menjelang tahun-tahun politik seperti ini. Sebut saja merebaknya kasus IPO Krakatau Steel sampai kasus penjarahan Bank Century. Banyak sinyalemen beredar bahwa aksi *moral hazard economy* seperti itu tidak terlepas kepentingan politik, dan tidak menutup kemungkinan aksi serupa dapat terulang lagi.

Di samping kemiripan yang terjadi dari faktor internal, gejala variabel eksternal juga hampir memiliki kesamaan. Jika pada 2008 Amerika Serikat mengejutkan perekonomian dunia dengan kasus *suprime mortgage* yang memicu krisis keuangan global, maka pada 2013 dipenuhi dengan isu potensi risiko terkait dengan pengurangan dan penghentian stimulus moneter di AS (*tapering off*). Kondisi eksternal tersebut tentu juga

mempunyai dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Belajar dari peristiwa sejarah di atas, maka Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014 yang dibuat INDEF kali ini selain memaparkan hasil evaluasi perkembangan ekonomi global dan domestik selama tahun 2013 juga mengangkat persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh Indonesia. Memang diakui pada 2012, pendapatan per kapita Indonesia telah mencapai USD3.660. Artinya Indonesia telah masuk pada kelompok negara berpendapatan menengah (*Middle Income Country-MIC*). Kriteria Negara yang masuk dalam negara berpendapatan menengah ketika pendapatan per kapita berada dalam kisaran USD1.005 – USD12.075. Namun tidak dapat menutup mata bahwa Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal dan terpasung oleh dominasi kekuatan asing. Ulasan bab 4 mengenai isu *Tapering off* dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia akan mengilustrasikan kondisi ini.

Disamping itu, tekanan "*quarto deficit*" yang saat ini dihadapi Indonesia akan menjadi warisan buruk terhadap rezim berikutnya. Belum lagi masalah kedaulatan ekonomi juga masih menjadi pertanyaan besar, terutama kedaulatan pangan dan energi. Hampir semua sektor strategis dikuasai asing, bahkan Indonesia mengalami ketergantungan impor pangan yang semakin miris. Ketergantungan impor tidak saja terjadi pada komoditas bahan pangan tapi juga pada komoditas hortikultura dan peternakan. Dalam jangka pendek, Indonesia juga akan sulit melepaskan ketergantungan pada impor BBM.

Hasil evaluasi INDEF terhadap kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2013 akan dituangkan secara detail dalam tujuh (7) bab yang terangkum dalam buku Proyeksi

Ekonomi Indonesia 2014 ini. Pembahasan dalam buku ini akan diawali dengan paparan tentang perkembangan ekonomi global dan perkembangan perekonomian domestik selama tahun 2013. Bagian berikutnya mengulas tentang kebijakan *Tapering Off* dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Bab selanjutnya membahas tentang perekonomian yang *dibelit quarto deficit* dan harapan tergapainya kedaulatan ekonomi yang ditutup dengan sejumlah rekomendasi kebijakan dari INDEF. Buku ini akan diakhiri dengan analisis INDEF atas pertanyaan publik apakah krisis akan berlanjut pada tahun 2014 atau tidak serta hasil proyeksi ekonomi 2014.

Perkembangan Perekonomian Global mengevaluasi perkembangan perekonomian global selama 2013 dan kecenderungannya ke depan. Dimulai dari evaluasi dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, dilengkapi dengan potensi pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, negara berkembang dan perkembangan kawasan eropa. Selanjutnya juga mengevaluasi stabilitas sisi moneter global, utamanya perkembangan inflasi dan stabilitas pasar keuangan. Bab ini juga mengulas tren neraca berjalan dan perkembangan harga komoditas internasional. Ulasan kondisi global ditutup dengan bahasan mengenai tingkat pengangguran dan negara-negara yang rawan nilai tukar.

Perkembangan Perekonomian Domestik mengevaluasi berbagai perkembangan indikator makro ekonomi selama 2013. Evaluasi diawali dengan paparan mengenai pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perlambatan. Target pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,3 persen dipastikan akan meleset. Selanjutnya juga dipaparkan mengenai gejolak yang terjadi di sektor moneter, diantaranya inflasi meroket, tekanan nilai tukar terus berlanjut, dan kebijakan kenaikan BI Rate yang

berimplikasi pada kinerja sektor perbankan. Ulasan dilanjutkan mengevaluasi kinerja sektor riil, diantaranya sektor fiskal, investasi dan kinerja ekspor impor serta dampaknya pada tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Tapering Off dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia memaparkan mengenai rencana dari adanya kebijakan pengurangan dan penghentian stimulus moneter di AS. Pembahasan dalam bab ini lebih menekankan bagaimana dampak kebijakan tersebut bagi perekonomian Indonesia. Dampak penjalaran kebijakan tersebut diantaranya adalah gejala nilai tukar, kontraksi moneter ditandai kenaikan BI rate, dan meningkatnya resiko likuitas perekonomian. Potensi dampak lain dari kebijakan ini antara lain paceklik dolar, repatriasi kapital, penurunan kinerja perbankan dan pasar modal, juga ancaman terhadap kesehatan fiskal.

Ekonomi Terbelit Defisit mengulas terjadinya *quarto deficit* yang terjadi selama 2013, yaitu defisit neraca perdagangan, transaksi berjalan, neraca pembayaran dan defisit keseimbangan primer. Ulasan dimulai dari potret buram transaksi berjalan yang terdiri neraca perdagangan, neraca jasa dan neraca pendapatan. Hilangnya tradisi surplus neraca perdagangan diidentifikasi akibat minimnya pengamanan dan strategi perdagangan. Ulasan ditutup dengan rekomendasi INDEF untuk keluar dari belitan defisit.

Menakar platform Ekonomi Capres memaparkan tentang kegelisahan INDEF terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia, utama yang paling krusial adalah kedaulatan pangan dan energi. Selain masalah kedaulatan ekonomi, masalah paling krusial lainnya yang menjadi keprihatinan INDEF adalah semakin memburuknya kinerja sektor riil sebagai akibat keterbatasan

pembangunan infrastruktur dan lemahnya dukungan sektor keuangan perbankan. Bab ini ditutup dengan rekomendasi INDEF terhadap masalah-masalah krusial tersebut.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014 merupakan bahasan terakhir yang merupakan kesimpulan dari pertanyaan INDEF tentang potensi krisis ke depan serta Proyeksi Ekonomi INDEF 2014.



Bab 2

Perkembangan Perekonomian Global

Perkembangan ekonomi global sejak awal 2013 cenderung membaik dan mencerminkan optimisme ke arah pemulihan. Hanya saja, pada paruh kedua berbagai guncangan mulai muncul baik dari sisi ekonomi maupun politik. Gejala dari sisi ekonomi menyeruak dari pelemahan ekonomi Negara-negara pasar berkembang seperti China dan India. Tidak dipungkiri kedua negara pemilik PDB terbesar itu mulai mengalami perlambatan.

Memasuki periode ketiga 2013 tekanan semakin memanas yang bersumber dari rencana *tapering off the Fed*. Isu tersebut mengguncang pasar keuangan dari berbagai sisi terutama di negara pasar berkembang. Selain masalah pertumbuhan yang masih lambat, gejala politik turut menyeruak terutama di negara-negara Timur Tengah. Kejadian ini memberikan tekanan cukup besar terhadap berbagai sektor terutama sektor energi. Meski tidak signifikan, penurunan *supply* minyak dari Suriah dan gejala di Mesir bergelombang menekan performa ekonomi global.

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global sepertinya menunggu pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat memang tumbuh namun masih jauh dari potensi yang ada. Ekonomi Amerika Serikat menghadapi persoalan fiskal. Defisit fiskal Amerika Serikat per Agustus adalah US\$147,9 miliar. Tingkat inflasi Amerika Serikat per Agustus mencapai 1,5 persen (yoy).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Amerika Serikat mencapai 7,3 persen menurun dari posisi 7,4 pada Juli 2013 dan menurun signifikan dari 8,1 persen pada Juli 2012. Namun, pencapaian ini masih jauh dari target 6,5 persen. Kondisi fiskal yang semakin rumit dan memicu perdebatan antara parlemen dan pemerintah menyebabkan munculnya penghentian anggaran belanja parsial (*partial shutdown*). Dukungan sisi konsumsi di Amerika Serikat juga menurun sejalan dengan kenaikan Pajak Penghasilan (PPH).

Ekonomi Eropa masih murung karena masalah utang yang masih tinggi. Sampai paruh kedua 2013, hanya Jerman dan Perancis yang tidak mengalami kontraksi ekonomi. Pemulihan Uni Eropa terkesan lamban karena hanya bertumpu pada kedua negara itu. Beberapa persoalan yang muncul di negara pengguna Euro tersebut adalah terkendalanya upaya percepatan penghematan fiskal (*fiscal austerity program*). Persoalan lainnya berhubungan dengan TPT yang tinggi, permasalahan fiskal kronis, serta rentannya sektor keuangan. Pemulihan ekonomi Uni Eropa semakin mandek karena kurangnya topangan sektor domestik terutama keterbatasan sisi pengeluaran masyarakat.

Setelah berhasil menghindari '*triple-dip-recession*', perekonomian Inggris kembali mencatat pertumbuhan yang

cukup tinggi. PDB Triwulan II 2013 tumbuh mencapai 1,6 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2013 yang hanya tumbuh 0,2 persen (yoy). PDB Jepang juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 0,9 persen (yoy) dari 0,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun, laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding ekspektasi dimana kebijakan Abenomics diharapkan dapat menumbuhkan ekspektasi positif masyarakat dan selanjutnya mendorong aktivitas perekonomian, sehingga perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi.

Secara umum pertumbuhan negara *emerging market* ditopang oleh kebijakan makro yang masih cukup kondusif di tengah peran ekspor yang menurun sebagai dampak lemahnya permintaan negara maju. Namun pertumbuhan dan proses pemulihan ekonomi global sedikit tertahan oleh berlarut-larutnya permasalahan fundamental di negara maju. Ekonomi China terus melambat karena munculnya berbagai persoalan.

China berupaya melakukan pengetatan likuiditas untuk menekan ekspansi kredit properti yang berlebihan. Selain untuk mengurangi potensi penggelembungan aset (*bubble*) pengaturan kredit properti diarahkan untuk mendukung upaya penurunan inflasi. Persoalan lain yang muncul di ekonomi China adalah menurunnya dukungan ekspansi dari pemerintah daerah karena lonjakan utang yang terjadi. Pada berbagai kesempatan, penurunan pertumbuhan China juga diarahkan untuk mencapai upaya *rebalancing* perekonomian.

Ekonomi India bergelut untuk menyelesaikan masalah defisit neraca transaksi berjalan. Persoalan lainnya yang muncul dari defisit tersebut adalah depresiasi Rupee dan masalah inflasi. Problema yang dihadapi India tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Hanya saja, defisit di Indonesia relatif lebih banyak

dan menyerang berbagai sisi seperti defisit neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan neraca keseimbangan primer.

Perlambatan ekonomi China dan India sebagai promotor pemulihan ekonomi global menunjukkan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi global semakin memburuk. Pada sisi lain ekonomi Amerika Serikat tidak mampu bergerak karena persoalan fiskal yang rumit. Sementara Uni Eropa tidak dapat bergerak leluasa karena himpitan fiskal. Terhadap kondisi tersebut, *International Monetary Fund* (2013) memerkirakan pertumbuhan output global hanya 2,9 persen (yoy) hingga akhir 2013.

IMF menekankan adanya potensi risiko baru terkait dengan pengurangan dan penghentian stimulus moneter di AS (*tapering* dan *exit Quantitative Easing*) yang menyebabkan jatuhnya harga aset keuangan disertai dengan volatilitas yang tinggi, proses penyesuaian yang menyebabkan keketatan likuiditas, *capital outflows* dari negara *emerging market*, dan meningkatnya potensi risiko *defaults*.

Walaupun telah dikoreksi ke bawah, proyeksi IMF tersebut masih berpotensi tidak tercapai mengingat permasalahan fundamental ekonomi di negara maju masih belum dapat diselesaikan sementara risiko dari pengurangan/penghentian stimulus moneter di AS meningkat. Selain itu, ekonomi global ke depan diperkirakan juga masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu pecahnya Uni Eropa dan kontraksi fiskal yang tajam di AS, yang diperkirakan dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi global.

Tabel 2.1. Perkembangan Aktual PDB Riil, Inflasi, Neraca Transaksi Berjalan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

	PDB Riil (%)			Inflasi (%)			Neraca Berjalan (%)*			TPT (%)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AS	2,8	1,6	2,6	2,1	1,4	1,5	-2,7	-2,7	-2,8	8,1	7,6	7,4
Inggris	0,2	1,4	1,9	2,8	2,7	2,3	-3,8	-2,8	-2,3	8	7,7	7,5
Jerman	0,9	0,5	1,4	2,1	1,6	1,8	7	6	5,7	5,5	5,6	5,5
Prancis	0	0,2	1	2,2	1	1,5	-2,2	-1,6	-1,6	10,3	11	11,1
Italia	-2,4	-1,8	0,7	3,3	1,6	1,3	-0,7	0	0,2	10,7	12,5	12,4
Spanyol	-1,6	-1,3	0,2	2,4	1,8	1,5	-1,1	1,4	2,6	25	26,9	26,7
Belanda	-1,2	-1,3	0,3	2,8	2,9	1,3	10,1	10,9	11	5,3	7,1	7,4
Yunani	-6,4	-4,2	0,6	1,5	-0,8	-0,4	-3,4	-1	-0,5	24,2	27	26
Brazil	0,9	2,5	2,5	5,4	6,3	5,8	-2,4	-3,4	-3,2	5,5	5,8	6
Rusia	3,4	1,5	3	5,1	6,7	5,7	3,7	2,9	2,3	6	5,7	5,7
Jepang	2	2	1,2	0	0	2,9	1	1,2	1,7	4,4	4,2	4,3
Korea	2	2,8	3,7	2,2	1,4	2,3	3,8	4,6	3,9	3,2	3,2	3,2
Australia	3,7	2,5	2,8	1,8	2,2	2,5	-3,7	-3,4	-3,5	5,2	5,6	6
Singapura	1,3	3,5	3,4	4,6	2,3	2,7	18,6	18,5	17,6	2	2,1	2,3
China	7,7	7,6	7,3	2,6	2,7	3	2,3	2,5	2,7	4,1	4,1	4,1
India	3,2	3,8	5,1	10,4	10,9	8,9	-4,8	-4,4	-3,8	3,8	4,7	6,8
Indonesia	6,2	5,3	5,5	4,3	7,3	7,5	-2,7	-3,4	-3,1	6,1	5,9	5,8
Thailand	6,5	3,1	5,2	3	2,2	2,1	0	0,1	-0,2	0,7	0,7	0,7
Malaysia	5,6	4,7	4,9	1,7	2	2,6	6,1	3,5	3,6	3	3,1	3
Filipina	6,8	6,8	6	3,2	2,8	3,5	2,9	2,5	2,2	7	7	7

Sumber: diolah dari *International Monetary Fund*, 2013

*% dari PDB

2.2. Tingkat Inflasi

Inflasi negara maju diperkirakan menurun menjadi 1,6 persen (yoy) pada Triwulan II 2013 dari 1,9 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Rata-rata inflasi AS dan Kawasan Euro pada Triwulan II 2013 masing-masing menurun ke level 1,4 persen (yoy). Sebaliknya, Inggris mengalami peningkatan tekanan inflasi. Inflasi Inggris pada akhir Triwulan II 2013 cenderung meningkat ke level 2,9 persen (yoy), dari 2,8 persen (yoy) di akhir Triwulan I 2013.

Setelah mengalami periode deflasi yang cukup panjang, Jepang mulai mengalami inflasi pada periode akhir Triwulan II

2013. Ke depan, tekanan inflasi pada negara maju diperkirakan masih relatif terkendali sejalan dengan masih rendahnya harga komoditas dan relatif lemahnya ekonomi dunia.

Berbeda dengan negara maju, inflasi negara *emerging* sangat bervariasi pada Triwulan II 2013. Di negara *emerging*, inflasi pada akhir Triwulan II 2013 cenderung meningkat, kecuali Korea, Thailand, dan Malaysia. Kenaikan tekanan inflasi di berbagai negara *emerging* lainnya merupakan dampak dari kenaikan harga makanan (China, India), harga perumahan (China), energi dan transportasi (Singapura, Filipina), biaya kesehatan (Singapura, Filipina), harga produk garmen dan alas kaki (Vietnam), dan biaya rekreasi (Singapura, Filipina, Vietnam).

2.3. Neraca Berjalan

Memburuknya perekonomian dunia menyebabkan kinerja ekspor di negara maju maupun *emerging* mengalami defisit sehingga mengakibatkan defisit neraca berjalan di beberapa negara. Di Amerika Serikat terjadi defisit transaksi berjalan dimana gabungan dari perdagangan barang dan jasa, pendapatan, dan transfer unilateral turun menjadi US\$98,9 miliar (kuartal kedua 2013) dari US\$104,9 miliar (kuartal pertama 2013).

Penurunan defisit transaksi berjalan disebabkan oleh penurunan defisit perdagangan barang, peningkatan surplus pendapatan, dan peningkatan surplus pada sektor jasa. Perubahan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan transfer bersih, seperti hibah pemerintah, pensiun pemerintah dan transfer lainnya, dan pengiriman uang pribadi. IMF memproyeksikan pada 2014 Amerika Serikat masih akan

mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 2,8 persen dari PDB.

Di Inggris defisit neraca berjalan Inggris pada Triwulan I 2013 melebar menjadi GBP14,5 miliar (3,6 persen dari PDB), dari defisit GBP13,5 miliar (3,5 persen dari PDB) pada Triwulan IV 2012. Meningkatnya defisit neraca berjalan Inggris di dorong oleh pendapatan pada Triwulan I 2013 yang defisit sebesar GBP2,1 miliar setelah sebelumnya di Triwulan IV 2012 mencatat surplus GBP1 miliar. Dengan meningkatnya defisit neraca perdagangan di Triwulan II 2013 (April- Mei) diperkirakan defisit neraca berjalan Inggris akan meningkat di Triwulan II 2013.

Di Jepang terjadi surplus transaksi berjalan, dan diproyeksikan pada 2014 akan stabil. Menguatnya transaksi berjalan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif (efek dari Abenomics yang diluncurkan pada Januari 2013), peningkatan injeksi moneter, depresiasi mata uang Yen sehingga mendorong perbaikan daya saing ekspor, akibatnya kontraksi ekspor menurun dari minus 4,7 persen (Triwulan IV 2012) menjadi minus 3,7 persen (Triwulan I 2013). Perbaikan tersebut disebabkan kenaikan ekspor ke Amerika Serikat dan Asia, sedangkan ekspor ke Kawasan Eropa masih berkontraksi seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan ini yang masih lemah.

Kondisi neraca transaksi berjalan di negara-negara pasar berkembang relative bervariasi. Proyeksi IMF menunjukkan pada 2013, neraca transaksi berjalan beberapa negara masih surplus. Jika dikalkulasi terhadap PDB, surplus neraca transaksi berjalan Singapura mencapai 18,5 persen; China 2,5 persen; Thailand 0,1 persen; Malaysia 3,5 persen; dan Filipina 2,5 persen. Kontras

dengan itu, neraca transaksi berjalan di Indonesia dan China diperkirakan defisit 3,4 persen dan 4,4 persen dari PDB.

2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Negara maju menjadi episentrum krisis ekonomi global yang merembet ke berbagai negara di dunia. Krisis tersebut menyebabkan resesi sehingga memperburuk kondisi lapangan kerja. Akibatnya terjadi peningkatan pengangguran selama 2012, yaitu sebanyak 4 juta orang menjadi 197 juta orang. Menurut *International Labour Organization* (ILO, 2013), Seperempat pengangguran global terjadi di negara maju, sementara tiga perempat terjadi di negara berkembang.

Dengan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa krisis ekonomi memberikan *spillover effect* yang signifikan terhadap negara berkembang. Negara-negara yang telah berhasil mencegah peningkatan lebih lanjut dalam pengangguran sering mengalami memburuknya kualitas pekerjaan, seperti pekerjaan rentan dan jumlah pekerja yang hidup di bawah atau sangat dekat garis kemiskinan meningkat.

Meskipun pertumbuhan output yang diharapkan pada periode 2013-2014 meningkat, tetapi tingkat pengangguran akan terus meningkat. ILO memproyeksikan jumlah pengangguran di seluruh dunia akan meningkat sebesar 5,1 juta menjadi lebih dari 202 juta orang pada 2013 dan pada 2014 akan meningkat lagi sebesar 3 juta orang.

Di Kawasan Euro, pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perbaikan ekonomi pada kuartal kedua 2013, sehingga menyisakan tingkat pengangguran masih sangat tinggi.

Sayangnya, momentum pertumbuhan ekonomi yang muncul ternodai dengan berbagai ketegangan sosial dan politik.

Upaya menyambut memontum pertumbuhan harus diikuti dengan pemulihan kesehatan sektor keuangan dan fiskal. Hanya saja kedua sektor tersebut belum beranjak jauh dari kedalaman krisis. Melihat kondisi yang demikian persoalan TPT masih akan menggaung dalam beberapa tahun ke depan. IMF pada akhir 2013 misalnya, memprognosa TPT AS masing 7,6 persen; Inggris 7,7 persen; Jerman 5,6 persen; Prancis 11 persen; dan Italia 12 persen. Spanyol masih membukukan TPT hingga 26,9 persen.

Perkembangan TPT di negara-negara pasar berkembang relatif lebih baik. Dari beberapa negara yang diamati, hanya Indonesia dan Filipina yang memiliki TPT di atas 5 persen; masing-masing 5,9 persen dan 7 persen pada 2013 (IMF, 2013). TPT China sekitar 4,1 persen; India 4,7 persen; Thailand 0,7 persen; dan Malaysia 3,1 persen.

2.5. Perkembangan Pasar Keuangan

Tren peningkatan harga aset keuangan di pasar keuangan global yang terjadi sepanjang Triwulan I 2013 kembali berlanjut pada awal Triwulan II 2013. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moneter di negara-negara maju yang semakin akomodatif. Di AS, the Fed melalui kebijakan *forward guidance* melanjutkan program pembelian aset keuangan yang nilainya mencapai US\$85 miliar per bulan. Jepang melalui program Abenomics semakin agresif memompa likuiditas ke perekonomian. Di kawasan EU, ECB menurunkan suku bunga kebijakan dan memompa likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan – yang kembali terguncang karena permasalahan bank di Cyprus –

dan mendorong aktivitas perekonomian. Sementara itu Inggris mempertahankan kebijakan moneter akomodatifnya.

Tambahan likuiditas yang tidak terserap oleh aktivitas perekonomian di sektor riil yang masih lemah mengalir ke pasar keuangan. Hal ini mendorong kenaikan harga saham dan obligasi di pasar keuangan sehingga *return* investasi semakin menipis dan mendorong *risk taking behavior* investor. Lebih jauh lagi, aset keuangan dengan *rating* lebih rendah ikut diserbu oleh investor, termasuk aset keuangan di negara-negara berkembang.

Aliran modal masuk ke pasar keuangan negara-negara *emerging* juga mendorong peningkatan harga aset keuangan, meskipun bersifat jangka pendek dan sangat sensitif terhadap sentimen negatif. Sampai dengan pertengahan Triwulan II 2013 pasar keuangan global masih diwarnai oleh peningkatan harga aset finansial. Namun menjelang akhir triwulan pasar keuangan, terutama di negara-negara *emerging*, kembali terguncang yang dipicu oleh isu pengurangan kebijakan stimulus moneter (*tapering quantitative easing*) di AS. Faktor lain yang juga berkontribusi pada peningkatan volatilitas di pasar keuangan negara *emerging* adalah kondisi likuiditas pasar yang relatif lebih ketat sebagai dampak dari penerapan *macroprudential measures* dan kenaikan suku bunga.

Kondisi pasar saham pada Triwulan I 2013 menunjukkan terjadi perkembangan yang *mixed* antara pasar saham negara maju (*bullish*) dan negara *emerging* (*bearish*). Harga saham di negara maju terus meningkat yang didukung oleh kebijakan moneter ekstra longgar dan komitmen bank sentral untuk melanjutkan *stance* kebijakan moneter ekstra longgar. Efek berlimpahnya likuiditas dapat meredam sentimen negatif dari

kondisi fundamental ekonomi yang masih lemah sebagaimana tercermin pada *outlook* pertumbuhan ekonomi yang beberapa kali direvisi ke bawah.

Sementara harga saham di negara *emerging* cenderung menurun (MSCI *Emerging*) yang disebabkan oleh sentimen negatif terkait dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Termasuk dalam hal ini adalah harga saham di China dan pusat-pusat keuangan di Asia, yaitu Hong Kong (SAR) dan Singapura. Aliran modal ke negara *emerging* juga membantu mendorong harga saham, namun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan di pasar saham mengingat dana jangka pendek investor global ini sangat sensitif terhadap sentimen negatif. Terlebih, berbagai faktor ketidakpastian masih tinggi.

Akibatnya, tekanan terhadap harga saham di negara *emerging* lebih dominan dan harga saham cenderung menurun. Meskipun harga saham di negara *emerging* pada umumnya menurun, harga saham di negara-negara ASEAN-5 masih menunjukkan tren peningkatan. Berbeda dengan Triwulan I -13, pada Triwulan II 2013 perkembangan harga di pasar saham global cenderung bergerak lebih searah, baik di negara maju maupun di negara *emerging*. Sejak awal hingga pertengahan Triwulan II -2013 harga saham global terus meningkat dalam tren yang *bullish*, termasuk harga saham di EU meskipun peningkatannya terjadi secara gradual.

Peningkatan harga saham secara signifikan terjadi di Jepang (Nikkei 225) dan AS (*Dow Jones Industrial Average* dan S&P500), serta di beberapa negara *emerging* Asia (Filipina, Thailand dan Indonesia). Namun demikian, harga saham di China, Hong Kong dan Singapura justru mengalami penurunan.

Hal ini terkait dengan prospek ekonomi negaranegara ini yang menurun terimbas oleh perlambatan ekonomi di negara maju (EU).

Kondisi *bullish* di pasar saham berbalik dengan munculnya persepsi negatif investor global terhadap pernyataan The Fed (Ben Bernanke) mengenai kemungkinan pengurangan stimulus moneter di AS, apabila kondisi perekonomian AS terus membaik. Pernyataan ini memicu kepanikan di kalangan investor global sehingga mereka menarik investasinya dari pasar saham. Akibatnya, indeks harga di pasar saham global terkoreksi.

Di bursa saham, negara-negara *emerging* terjadi penurunan harga yang lebih tajam, disertai dengan volatilitas harga yang meningkat cukup tinggi, termasuk di negara-negara ASEAN. Harga saham pada akhir Triwulan II 2013 jatuh ke level yang lebih rendah dibanding level harga di awal triwulan, meskipun secara rata-rata di Triwulan II 2013 masih lebih tinggi dibanding rata-rata di Triwulan I 2013. Pola perkembangan seperti ini terjadi di Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Penurunan yang lebih drastis terjadi di bursa saham Brazil dimana indeks harga saham mengalami penurunan lebih dari 15 persen secara *point to point* (posisi akhir Maret 2013 dibanding akhir Juni 2013) dan secara rata-rata menurun hampir 10 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan harga secara *point to point* dan rata-rata juga terjadi di China, Hong Kong (SAR) dan Korea Selatan. Bursa saham di negara maju juga terpengaruh oleh isu *tapering* stimulus moneter AS. Indeks harga saham di AS, Jepang dan Kawasan Euro, yang terus meningkat sejak Triwulan I 2013

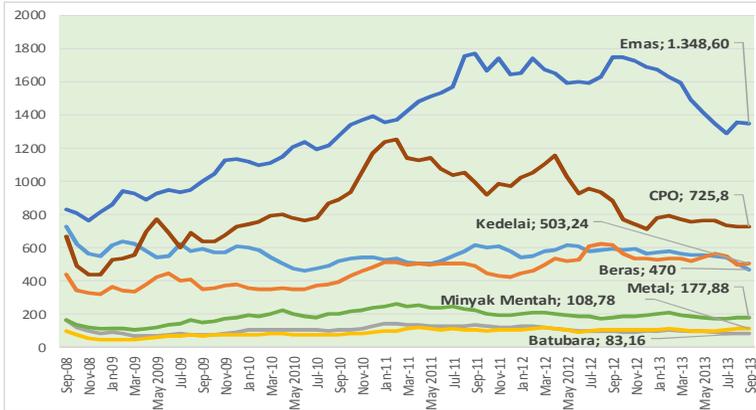
kembali menurun setelah munculnya isu *tapering*. Indeks harga saham di Jepang menurun cukup tajam, diikuti oleh indeks harga saham Kawasan Euro. Sementara itu, indeks harga saham di AS hanya terkoreksi minimal. Menjelang akhir Triwulan II 2013 harga saham menunjukkan indikasi *rebound* setelah *release* beberapa indikator di AS yang belum mengonfirmasi perbaikan ekonomi secara signifikan yang ditangkap pasar sebagai ekspektasi stimulus moneter belum akan dihentikan.

2.6. Perkembangan Harga Komoditas Internasional

Perkembangan ekonomi global yang masih lemah menjadikan permintaan komoditas global menurun sehingga berdampak pada harga komoditas yang juga cenderung menurun sepanjang tahun 2013. Harga minyak mentah cenderung menurun pada awal Semester I 2013, kemudian merangkak naik selama Semester II. Tren penurunan harga minyak di semester awal disebabkan oleh permintaan yang masih melemah ditengah peningkatan pasokan minyak, baik dari negara-negara OPEC maupun non-OPEC. Disamping itu, posisi cadangan minyak di AS sepanjang semester II 2013 juga relatif tinggi.

Melanjutkan tren penurunan sejak Triwulan IV 2012, harga emas menurun sebesar 19,33 persen sejak Januari hingga September 2013. Selain disebabkan oleh permintaan dunia yang menurun, penurunan harga emas di Semester II 2013 juga disebabkan oleh tren penguatan US dolar terhadap mata uang global sehingga investor kembali beralih ke US dolar sebagai *safe haven assets*.

Harga komoditas lain juga cenderung bergerak menurun, meskipun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Harga komoditas metal seperti timah, batu bara, nikel dan alumunium pada umumnya mengalami penurunan. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas CPO, beras, dan kedelai.



Sumber: www.indexmundi.com (diolah)

Gambar 2.1. Perkembangan Beberapa Komoditas Utama Dunia

Harga minyak sawit di pasar internasional selama periode lima tahun terakhir tercatat mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Fluktuasi harga tersebut dapat mempengaruhi kontribusi minyak sawit terhadap total ekspor non migas Indonesia yang berkisar 10 -12 persen. Secara rata-rata, harga minyak sawit selama semester I-2013 sebesar 2.318 per metrik ton, mendekati rata-rata harga pada 2009 sebesar 2.287 per metrik ton. Rata-rata harga pada 2009 tersebut turun sekitar 18 persen dari harga rata-rata pada 2008 sebesar 2.805 per metrik ton, dan menjadi terendah dalam kurun lima tahun.

Selama lima tahun harga komoditas batubara mengalami penurunan hingga 55,05 persen dari US\$173 per metrik ton pada Juni 2008 menjadi US\$83,16 per metrik ton pada

September 2013. Sejak awal tahun 2013, harga batubara sudah merosot 14,23 persen. Secara rata-rata dalam kurun lima tahun, harga batubara tertinggi terjadi pada 2008 sebesar US\$126,96 per metrik ton yang lalu merosot 43,42 persen menjadi US\$71,83 per metrik ton pada tahun berikutnya. Meski harga rata-rata sempat kembali naik pada 2011 menjadi US\$119,84 per metrik ton, namun dua tahun terakhir tren harga batubara terus menurun.

2.7. Negara-Negara Rawan Nilai Tukar

Pada 2013, ada istilah baru yang populer dengan sebutan *Fragile Five*. Ini adalah lima negara dengan nilai tukar yang paling rawan terkena guncangan akibat pelarian modal. Kelima negara tersebut Brasil, Indonesia, India, Afrika Selatan, dan Turki. Kelima negara ini telah mengalami depresiasi nilai tukar yang tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonomi kelima negara ini paling terguncang akibat pembalikan modal asing secara masif dan mendadak seiring dengan rencana pemangkasan paket stimulus Federal Reserve.

Fragile Five memiliki ciri-ciri inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan, dan defisit fiskal. Brasil mengalami defisit transaksi berjalan yang tinggi dan persoalan inflasi yang tinggi. Mata uang Brasil mengalami pelemahan hingga 11,13 persen pada kuartal ketiga 2013, kendati bank sentral negara ini telah melakukan intervensi sekaligus menaikkan suku bunga.

Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang tinggi seiring dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan sepanjang 2013 akibat defisit transaksi berjalan yang masih akan terus membebani.

Untuk menyiasatinya Bank Indonesia meningkatkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 7,25 persen.

India memiliki defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi, serta inflasi yang tinggi. Namun berbeda dengan negara-negara lainnya, India tidak menghadapi penurunan cadangan devisa dalam jumlah besar. Untuk mendukung penguatan nilai tukar Rupee, India menjual dolar langsung ke perusahaan minyak dan menaikkan suku bunga.

Dari lima negara yang paling rapuh, Afrika Selatan merupakan negara dengan kinerja terburuk bila dilihat dari sisi defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar Rand yang mencapai 20,99 persen. Ironisnya, bank sentral Afrika Selatan merupakan satu-satunya dari kelima bank sentral yang belum menaikkan suku bunga.

Turki juga menghadapi persoalan inflasi yang tinggi dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, negara ini juga menghadapi masalah defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi serta defisit fiskal hingga -7,5 persen. Meski begitu, Turki memiliki kebijakan moneter yang cukup fleksibel jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Tabel 2.2. Negara-Negara Rawan Nilai Tukar

Negara	Nilai Kurs 2013			Perubahan Kurs 2012-2013		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brazil	2,01	2,22	2,26	1,71	-6,13	-11,13
India	54,39	59,70	62,78	0,71	-6,02	-19,13
Indonesia	9.719,00	9.929,00	11.404,00	-0,51	-4,74	-18,94
South Africa	9,20	10,09	10,05	-8,20	-23,00	-20,99
Turkey	1,82	1,93	2,04	-1,88	-6,52	-13,81

Sumber: www.indexmundi.com (diolah)



Bab 3

Evaluasi Makro Ekonomi Indonesia 2013

Stabilitas makro ekonomi Indonesia sepanjang 2013 menghadapi tantangan yang cukup berat, baik tekanan pada sisi moneter maupun sektor riil. Berawal dari instabilitas sisi moneter dengan adanya tekanan inflasi sejak awal tahun, kemudian diikuti gejolak nilai tukar yang berdampak pada kebijakan kenaikan suku bunga acuan kebijakan (*BI Rate*). Gejolak nilai tukar yang tak kunjung stabil, tidak terlepas dari tekanan defisit neraca perdagangan yang semakin meningkat sejak 2012. Lonjakan suku bunga acuan kemudian bergerak bertransmisi pada suku bunga perbankan. Dampak lanjutan dari lonjakan suku bunga tersebut adalah realisasi kredit dan investasi. Interelasi variabel-variabel makro tersebut berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Evaluasi terhadap ekonomi Indonesia sepanjang 2013 akan mengulas perkembangan beberapa indikator makro ekonomi utama. Cakupan yang disajikan berupa pertumbuhan ekonomi, sektor moneter, sektor perbankan, sektor fiskal, kinerja investasi, sektor luar negeri serta perkembangan pengangguran dan kemiskinan.

3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Optimisme pemerintah di awal tahun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 2013 dengan target sebesar 6,8 persen dipastikan meleset. Asumsi pertumbuhan ekonomi akhirnya direvisi menjadi 6,3 persen dalam APBN-P 2013. Angka inipun juga sulit akan tercapai dengan melihat pencapaian pertumbuhan sampai triwulan III-2013 rata-rata hanya mencapai 5,82 persen. Pada Triwulan I 2013, pertumbuhan tercatat sebesar 6,03 persen turun 0,20 persen dari pertumbuhan ekonomi pada 2012. Melambatnya pertumbuhan merembet pada triwulan berikutnya. Pada Triwulan II dan III 2013 pertumbuhan tercatat 5,81 persen dan 5,62 persen (terendah sejak Triwulan IV 2010 sebesar 6,81 persen).

Pertumbuhan yang semakin melambat ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal antara lain adanya tekanan tingginya inflasi, depresiasi rupiah dan lambatnya pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan. Pengaruh sisi eksternal antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya kinerja ekonomi global dan negara-negara tujuan ekspor, membengkaknya defisit transaksi berjalan serta dipicu isu kebijakan *tapering off* dan *quantitative easing* dari pemerintah AS.

Dari data yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (2013) dan data Kementerian Keuangan dapat disimpulkan target pertumbuhan sektoral hingga akhir 2013 diperkirakan meleset. Dari sembilan sektor yang ada, hanya sektor pengangkutan dan komunikasi yang mendekati target pemerintah. Sektor industri pengolahan yang diharapkan tumbuh 6,1 persen pada 2013 baru mencapai 4,89 persen pada Triwulan III-2013. Kondisi yang serupa terjadi pada sektor pertanian serta sektor

pertambangan dan penggalian. Pelemahan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut akan bermuara pada ketersediaan lapangan kerja.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	2013:I	2013:II	2013:III	Target Pemerintah (APBN-P 2013)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,61	3,2	3,02	3,7
Pertambangan dan Penggalian	-0,2	-1,19	1,62	2
Industri dan Pengolahan	5,89	5,84	4,89	6,1
Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,55	6,6	4,01	6,4
Konstruksi	7,00	6,88	6,24	7,3
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,54	6,47	5,99	8,3
Pengangkutan dan Komunikasi	9,98	11,46	10,46	11,3
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	8,35	8,07	8,09	6
Jasa-jasa	6,48	4,48	5,62	5,2
PDB	6,03	5,81	5,62	6,3

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013, diolah

Di tengah lambatnya pertumbuhan, sektor *non-tradable* masih relatif menjadi andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat tiga sektor yang menjadi primadona bagi pertumbuhan sampai Triwulan III 2013. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 10,46 persen, diikuti oleh sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan sebesar 8,09 persen dan sektor konstruksi 6,24 persen. Namun, pertumbuhan ketiga sektor ini melambat rata-rata 0,5 sampai 1 persen dibanding Triwulan sebelumnya.

Disisi lain sektor *tradable* semakin mengalami keterpurukan. Sektor pertanian, yang idealnya menjadi sektor andalan bagi negara agraris seperti Indonesia, pada Triwulan III-2013 hanya tumbuh 3,02 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,20 persen. Beruntung, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 1,62 persen setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh minus 1,19 persen.

Sayangnya, industri sebagai sektor yang mempunyai potensi menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah tinggi bagi ekonomi nasional hanya tumbuh 4,89 persen. Pertumbuhan industri kembali anjlok setelah Triwulan II mampu tumbuh hampir mendekati pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,84 persen. Tekanan yang bertubi-tubi, mulai dari kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL), hingga kenaikan upah minimum, menjadi beberapa faktor yang mengakibatkan sektor industri semakin terpuruk. Penurunan pertumbuhan sektor industri di Triwulan III ini juga tidak lepas dari tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada melonjaknya harga bahan baku. Disamping itu, tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah minimum sampai 50 persen, setidaknya juga turut menyurutkan minat investasi maupun ekspansi pada industri padat karya.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga dapat dilihat dari komponen-komponen pengeluaran PDB. Melemahnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh peningkatan laju inflasi, menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Tren penurunan tingkat konsumsi rumah tangga sebenarnya sudah terjadi semenjak Triwulan III 2012 (5,68 persen) dan Triwulan IV (5,36 persen).

Pada Triwulan I 2013 pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 5,17 persen, namun pada Triwulan II menurun menjadi 5,06 persen. Pada Triwulan III 2013, konsumsi tumbuh 5,48 persen. Meningkatnya geliat konsumsi rumah tangga ini ditopang adanya momen bulan Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri pada Juli dan Agustus 2013 serta dampak ekspansi pengeluaran pemerintah yang meningkat pada Triwulan III. Konsumsi masyarakat masih menjadi sumber utama pertumbuhan dimana pada Triwulan III 2013 berkontribusi sebesar 55,3 persen.

Berbanding terbalik dengan konsumsi yang mengalami peningkatan, investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) justru semakin jeblok. Pada Triwulan I 2013 PMTB masih tercatat sebesar 5,78 persen, namun pada Triwulan II dan Triwulan III merosot menjadi 4,67 persen dan 4,51 persen (terendah sejak Triwulan I 2010). Meski begitu, PMTB masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi kedua terbesar setelah konsumsi masyarakat dengan kontribusi sebesar 33,37 persen.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,08 persen menjadi komponen yang pertumbuhannya paling melejit di Triwulan III setelah sebelumnya hanya tumbuh 0,42 persen di Triwulan I dan 2,13 persen di Triwulan II. Pola penyerapan anggaran pemerintah yang sering menumpuk di akhir tahun menjadi penyebab melejitnya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan III ini. Namun, tetap saja komponen ini hanya berkontribusi sebesar 9,05 persen terhadap pertumbuhan.

Di sisi lain kinerja ekspor dan impor masih menunjukkan kontribusi yang negatif. Pertumbuhan ekspor belum mampu

mengkompensasi peningkatan impor, sehingga neraca perdagangan masih mengalami defisit. Hal ini dikarenakan tekanan impor yang sulit dihindari yang bersumber dari impor migas (BBM), bahan baku dan komoditas pangan. Sementara optimalisasi kinerja ekspor sulit dilakukan karena faktor permintaan dunia yang masih melemah dan masih rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia di pasar global.

Alhasil, secara umum pencapaian pertumbuhan komponen PDB pengeluaran mengikuti performa ekonomi sektoral. Kesemuanya masih jauh dari target pemerintah. Hanya komponen konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya masih relatif terjaga dan mendekati target pemerintah. Artinya, konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama dan dewa penyelamat mengerem perlambatan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2013.

**Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Komponen-
Komponen PDB Pengeluaran**

Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan (atas dasar harga konstan)			Target Pemerintah (APBN- P2013)	Kontribusi Terhadap PDB (atas dasar harga berlaku)	
	Q1	Q2	Q3		Q2	Q3
Konsumsi Rumah Tangga	5,17	5,06	5,48	5,00	55,28	55,33
Konsumsi Pemerintah	0,42	2,13	8,83	6,7	8,59	9,05
PMTB	5,78	4,67	4,51	6,98	33,04	33,37
Ekspor Barang dan Jasa	3,57	4,78	5,26	6,6	23,05	22,15
Impor Barang dan Jasa	-0,06	0,62	3,80	6,1	25,61	24,17
PDB	6,03	5,81	5,62	6,3		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013, diolah

3.2. Sektor Moneter

Gambaran umum sektor moneter hingga sesi ketiga 2013 diwarnai dengan berbagai kejutan. Inflasi mulai melambung bukan hanya disebabkan kebijakan kenaikan harga BBM tetapi juga perilaku masyarakat sebelum eksekusi kenaikan tersebut. Kegamangan pemerintah dalam mengambil keputusan harga BBM berlanjut pada berbagai aksi penimbunan BBM. Pemerintah gagal dalam mengelola ekspektasi masyarakat sehingga mengguncang berbagai sektor perekonomian terutama ekspektasi inflasi.

Pilihan kenaikan BBM pada waktu yang tidak tepat -karena berdekatan dengan bulan-bulan yang siklus permintaan barang dan jasa meningkat menjadi kesalahan fatal pemerintah sepanjang 2013. Pemerintah sepenuhnya paham bahwa pada Ramadhan dan Idul Fitri angka inflasi akan cenderung melonjak. Belum lagi pemerintah menaikkan TDL. Bank Indonesia hanya kebagian beban layaknya pemadam kebakaran yang harus menyerap kelebihan likuiditas.

Uraian lebih lanjut tentang perkembangan sektor moneter akan disajikan pada bagian berikut ini guna memberikan gambaran dan penekanan bagi *stakeholder*.

3.2.1. Inflasi

Inflasi pada 2013 diperkirakan menjadi inflasi tertinggi selama satu dekade terakhir sepertinya menjadi kenyataan. Bagaimana tidak, pada awal inflasi sudah mencapai 1,03 persen (mtm), yang juga tercatat menjadi angka inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penyebab tingginya inflasi pada 2013 setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain harga

bahan makanan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga BBM bersubsidi, dan tuntutan kenaikan upah buruh. Target pemerintah untuk mencapai inflasi 7,2 persen - sebagaimana ditetapkan pada dokumen APBN-P 2-13- pada 2013 sudah dipastikan akan meleset.

Tingginya tingkat inflasi pada Triwulan I dipicu oleh pasokan bahan makanan yang terbatas akibat cuaca buruk serta pengetatan kebijakan impor barang-barang hortikultura yang tidak tepat dan terencana. Pada Triwulan II, tekanan inflasi terlihat berkurang (meskipun tidak terlalu signifikan) dengan adanya deflasi pada April dan Mei 2013 (0,10 persen dan 0,03 persen, mtm). Turunnya harga beberapa komoditas seperti beras dan gabah, kebijakan importasi yang dilakukan pemerintah serta kepastian terpenuhinya kebutuhan pasokan menjadi pemicu deflasi pada Triwulan II 2013. Namun, deflasi itu tidak bertahan lama dan menjadi percuma ketika pada Juni inflasi kembali menembus angka 1,03 persen (mtm) atau 5,90 persen (yoy). Pemicunya diantaranya adalah rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung mendapat respon cepat dari para pelaku pasar.

Pada Triwulan III angka inflasi semakin meroket. Pemerintah kurang sigap dan tanggap dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM dan TDL yang berbarengan dengan masuknya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Akibatnya perkembangan harga hampir semua kebutuhan masyarakat liar tidak terkendali. Peningkatan permintaan masyarakat pada momen hari raya, dimanfaatkan para pemburu rente untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya, harga semua kebutuhan pokok mengalami lonjakan yang fantastis, terutama bawang merah, cabai dan daging sapi, membuat masyarakat ketar-ketir dalam menjalankan ibadah puasa. Alhasil, pada Juli

2013 inflasi tercatat hingga mencapai 3,29 persen (mtm) atau 8,61 persen (yoy).

Terhitung dari Januari-Juli 2013 inflasi mencapai 6,75 persen. Jika dibanding dengan periode yang sama tahun 2012 dimana hanya mencapai 2,50 persen, maka hampir tiga kali lipat kenaikannya. Dari sisi komponen, inflasi Juli 2013 komponen utama penyumbang inflasi memang harga yang diatur pemerintah 1,41 persen, disusul komponen harga bergejolak 1,29 persen dan komponen inti yang menyumbang 0,59 persen. Namun Tabel 2.3 menunjukkan formula umum inflasi di Indonesia ditentukan oleh stabilitas harga pangan yang tercermin pada kelompok barang yang bergejolak. Jika harga pangan cenderung mengalami lonjakan yang tinggi maka dapat dipastikan inflasi akan tidak terkendali. Sebaliknya jika harga pangan relatif menurun maka akan terjadi deflasi.

Tingginya harga barang pokok dan naiknya tarif angkutan umum (karena musim mudik Lebaran) yang disertai kenaikan TDL tahap tiga (periode 1 Juli–30 September 2013) turut menyumbang inflasi pada Agustus sebesar 8,79 persen (yoy), meskipun secara bulanan turun menjadi 1,12 persen (mtm). Pada akhir Triwulan III tepatnya September 2013 terjadi deflasi (meskipun tidak begitu signifikan) sebesar 0,35 persen yang cukup memberi sedikit nafas pada perekonomian Indonesia. Meski begitu dibanding tahun lalu, inflasi September 2013 tetap saja masih tinggi yaitu 8,40 persen yoy.

Memasuki akhir tahun, kondisi moneter yang mulai membaik dengan kenaikan BI *rate* yang mencapai 7,50 persen, inflasi mulai mereda pada Oktober 2013 yang tercatat berada di angka 0,09 persen (mtm) atau 8,32 persen (yoy). Namun, hal ini

belum dapat dikatakan baik, karena selama Januari-Oktober 2013 inflasi masih 7,66 persen (mtm).

**Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Januari – September 2013
(persen)**

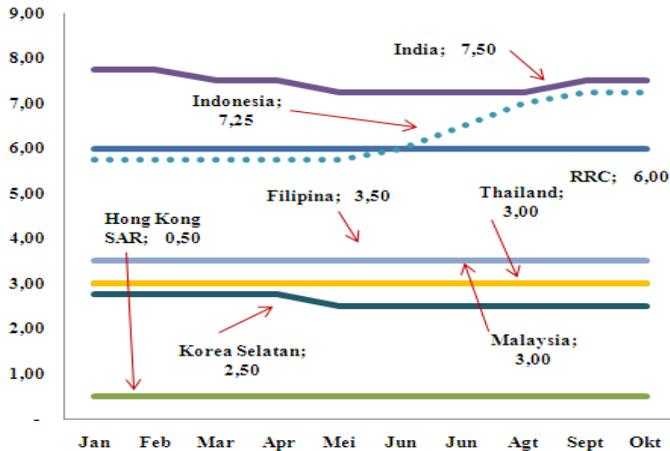
Bulan	Inflasi/ Deflasi	Umum	Inti	Harga Yg Diatur Pemerintah	Bergejolak	(yoy)
Jan	inflasi	1.03	0.22	0.04	0.77	4.57
Feb	inflasi	0.75	0.17	0.12	0.46	5.31
Mar	inflasi	0.63	0.06	0.05	0.52	5.90
Apr	deflasi	-0.10	0.07	0.03	-0.20	5.57
Mei	deflasi	-0.03	0.02	0.17	-0.22	5.47
Jun	inflasi	1.03	0.19	0.57	0.27	5.90
Jul	inflasi	3.29	0.59	1.41	1.29	8.61
Agt	inflasi	1.12	0.60	0.12	0.40	8.79
Sept	deflasi	-0.35	0.34	0.06	-0.75	8.40
Okt	inflasi	0.09	0.19	0.05	-0.15	8.32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

3.2.2. Suku Bunga

BI rate bertahan pada level 5,75 persen selama lima bulan pertama tahun 2013 karena masih dinilai konsisten dengan kondisi perekonomian meskipun tekanan inflasi cukup tinggi. Namun, seiring dengan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, pada bulan Juni BI rate dinaikkan menjadi 6,00 persen. Sejak Juni hampir setiap bulan BI rate terus mengalami kenaikan rata-rata 25 bps hingga menyentuh level 7,50 persen pada November 2013. Jika dibandingkan dengan kebijakan suku bunga acuan negara lain, hanya Indonesia yang terus melakukan pengetatan likuiditas bahkan India malah menurunkan suku bunga acuan. Dengan demikian hanya suku bunga acuan Indonesia dan India

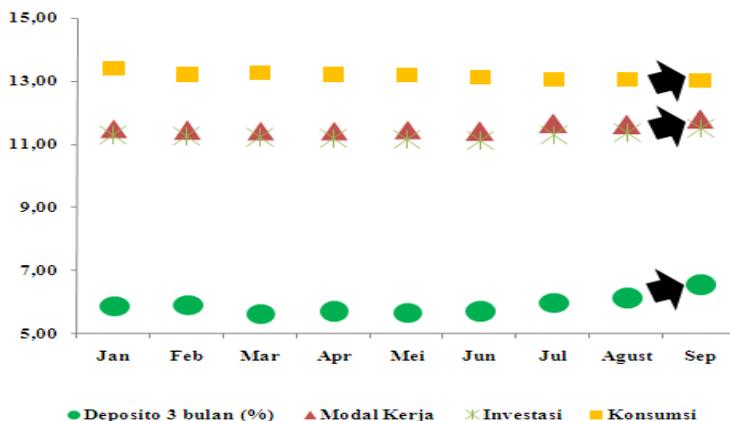
yang tertinggi di kawasan Asia. Suku bunga acuan terendah di kawasan Asia dimiliki Hongkong hanya sebesar 0,50 persen dan Korea Selatan hanya 2,50 persen.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 3.1. Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Beberapa Negara/Kawasan

Penaikan BI rate telah berdampak langsung pada kenaikan suku bunga perbankan. Pada September 2013, posisi suku bunga kredit modal mencapai 11,80 persen, suku bunga kredit investasi mencapai 11,50 persen, dan suku bunga kredit konsumsi sebesar 13,03 persen. Kenaikan suku bunga kredit merupakan dampak dari kenaikan pada suku bunga deposito, dimana suku bunga deposito 3 bulan mencapai 6,56 persen. Selama sepuluh bulan terakhir, *spread* antara suku bunga kredit dan deposito pada September 2013 menurun menjadi 5,41 bps dari 5,86 bps pada bulan sebelumnya. Namun demikian *spread* suku bunga kredit dan deposito di Indonesia masih merupakan yang tertinggi.



Sumber : Bank Indonesia, 2013

Gambar 3.2. Perkembangan Suku Bunga, Januari-September 2013 (persen)

3.2.3. Nilai Tukar Rupiah

Ujian terhadap daya tahan fundamental ekonomi Indonesia mulai terlihat ketika memasuki paruh kedua 2013. Saat itu gejolak nilai tukar mulai terasa. Sejak akhir Juni 2013 fluktuasi membawa Rupiah menembus Rp10.000 per US\$, dan terus mengalami pelemahan hingga di posisi Rp11.600 per US\$ pada November. Pelemahan rupiah, terutama dipicu oleh melemahnya kinerja neraca perdagangan dan besarnya repatriasi kapital.

Pelemahan rupiah terbesar terjadi pada September 2013 sebesar Rp689 terhadap Dollar menyentuh angka Rp11.613, padahal pada awal Januari masih tercatat Rp9.869. Secara kumulatif dari Januari–September pelemahan Rupiah sebesar Rp1.915. Secara rata-rata, rupiah melemah 8,18 persen (qtq) ke

level Rp10.652 per dolar AS atau secara *point to point* rupiah terdepresiasi 14,29 persen (qtq) ke level Rp11.580 per dolar AS.

Upaya menahan pelemahan Rupiah terus dilakukan, Salah satunya dengan mengeluarkan senjata andalan dengan menaikkan BI *Rate* hampir setiap bulan rata-rata sebesar 25 bps. Nyatanya amunisi BI ini tidak berdampak signifikan terhadap penguatan rupiah. Kurs tengah pada Oktober tetap berada pada level Rp11.234 hanya menguat 379 poin dari Rp11.613 per Dollar AS. Majalnya obat penawar dari instrumen moneter ini dapat dipahami karena faktor fundamental melemahnya rupiah bersumber dari tekanan defisit transaksi berjalan.

Selain faktor internal, kondisi eksternal juga menjadi penyebab melemahnya Rupiah. Seperti halnya pelemahan mata uang negara-negara di kawasan Asia, depresiasi nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh penyesuaian kepemilikan non-residen di aset keuangan domestik yang dipicu oleh sentimen terkait pengurangan (*tapering off*) stimulus moneter oleh the Fed.

Di pasar keuangan, pelemahan rupiah juga di dorong oleh antisipasi atas sejumlah risiko terkait dengan penundaan kebijakan pengurangan stimulus The Fed tersebut, juga perdebatan *debt ceiling* dan penghentian sementara layanan pemerintah AS (*government shutdown*). Tindakan spekulasi yang berhubungan dengan kebijakan pengurangan (*tapering*) stimulus moneter oleh the Fed juga mempengaruhi kondisi keuangan global serta mengakibatkan terjadinya pembalikan modal (*capital revesal*) di negara *emerging markets* pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah.

Melemahnya Rupiah tidak hanya terhadap Dollar, tetapi juga terhadap mata uang asing beberapa negara kawasan seperti Dollar Australia, Poundsterling, Dollar Hongkong, dsb.

Pelemahan rupiah terbesar terjadi pada Poundsterling Inggris mencapai angka 3.445 basis point pada September 2013.

Tabel 3.4. Kurs Tengah Beberapa Mata Uang terhadap Rupiah

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt
A U D	10,113	9,926	10,130	10,057	9,476	9,184	9,296	9,766	10,798	10,675
C A D	9,677	9,451	9,564	9,606	9,516	9,473	9,983	10,372	11,262	10,723
C H F	10,655	10,405	10,191	10,368	10,276	10,526	11,061	11,745	12,826	12,490
E U R	13,154	12,708	12,423	12,730	12,784	12,977	13,634	14,470	15,671	15,428
G B P	15,325	14,663	14,714	15,055	14,927	15,159	15,660	16,950	18,770	18,014
H K D	1,250	1,246	1,252	1,253	1,263	1,280	1,325	1,409	1,498	1,449
J P Y / 100	10,676	10,460	10,323	9,925	9,705	10,035	10,486	11,129	11,869	11,415
M Y R	3,133	3,125	3,133	3,207	3,185	3,124	3,166	3,307	3,564	3,561
S G D	7,834	7,822	7,816	7,879	7,786	7,841	8,086	8,563	9,234	9,068
U S D	9,698	9,667	9,719	9,722	9,802	9,929	10,278	10,924	11,613	11,234

Sumber : Bank Indonesia, 2013

3.3. Kinerja Perbankan

Kenaikan BI rate tentunya berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan kredit perbankan. Bila pada Februari 2013 pertumbuhan kredit mencapai 23,4 persen (yoy), pada akhir Agustus 2013 menjadi 22,2 persen (yoy) dan pada September anjlok menjadi 17,1 persen (yoy). Kredit modal kerja dan kredit investasi juga mengalami penurunan, dari 24,5 persen (yoy) dan 25,4 persen (yoy) pada Februari 2013, turun menjadi 21,7 persen (yoy) dan 22,9 persen (yoy) pada Mei 2013. Sedangkan kredit konsumsi yang awalnya tumbuh 20,3 persen (yoy) anjlok menjadi 18,4 persen (yoy).

Tabel 3.5. Kinerja Perbankan, Januari – September 2013

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept
Aset*	4211.0	4237.1	4313.8	4367.8	4418.7	4461.8	4510.3	4581.1	4737.3
DPK*	3204.5	3207.3	3243.1	3299.4	3349.7	3374.4	3392.9	3440.2	3526.2
Kredit*	2688.1	2718.7	2768.4	2824.2	2887.5	2959.1	3021.1	3067.4	3147.2
LDR**	83.9	84.8	85.4	85.6	86.2	87.7	89.0	89.2	89.3
NPLs Gross**	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9
CAR**	19.2	19.2	18.9	18.6	18.4	18.0	18.0	17.9	18.0
NIM**	5.5	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
ROA**	3.1	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Sumber : Bank Indonesia, 2013

*dalam Rp Triliun **dalam persen

Beberapa indikator perbankan masih menunjukkan perbaikan. Hanya saja, beberapa indikator menunjukkan perlambatan. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) misalnya baru 89,3 persen per September. Rendahnya LDR ini diperkirakan imbas dari saran Bank Indonesia untuk menggerakkan LDR pada kisaran 92 persen untuk mengurangi *supply* dana ke perekonomian. Risiko kredit perbankan juga masih rendah dengan angka 1,9 persen pada September 2013. Rasio kecukupan modal (CAR) sedikit meningkat menjadi 18 persen pada periode yang sama. Angka tersebut cukup mampu memenuhi ketentuan Basel III. Net Interest Margin (NIM) perbankan masih tergolong tinggi meski terjadi penurunan penyaluran kredit. NIM yang tinggi sejalan dengan *Return on Asset* (ROA) perbankan yang masih menyentuh angka 3 persen.

3.4. Sektor Fiskal

Selama semester I 2013, perekonomian diwarnai gejolak, terutama tekanan inflasi, nilai tukar dan defisit neraca perdagangan. Akibatnya hampir semua asumsi makro ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2013 meleset. Kondisi itu memaksa pemerintah kembali mengajukan revisi APBN-P 2013 dan disahkan lewat UU Nomor 15 Tahun 2013. Namun, secara umum revisi tersebut hanya merespon dampak keputusan pemerintah dalam kenaikan harga BBM. Revisi APBN-P 2013 hanya terlihat pada persetujuan pemberian BLSM sebagai konsekuensi dari naiknya harga BBM tersebut. Meski APBN 2013 telah direvisi, penyakit klasik selalu saja menggerogoti APBN dari tahun ke tahun. Penyakit itu antara lain adalah postur anggaran yang tidak ideal, rendahnya realisasi penyerapan anggaran serta tidak adanya respon anggaran untuk menstimulus fiskal guna mengatasi masalah defisit perdagangan dan tekanan inflasi.

Postur APBN yang tidak ideal tercermin baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Pada APBN-P 2013 pemerintah justru menurunkan target penerimaan pajak dari semula Rp 1.192 triliun menjadi Rp 1.148 triliun (turun 44 triliun dari APBN 2013). Sedangkan PNBPN naik dari 332 triliun menjadi 349 triliun. Sungguh disayangkan karena pajak yang merupakan instrumen kunci pendapatan negara untuk pembangunan belum dioptimalkan pemerintah. Alasan Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak dikarenakan terjadinya perlambatan ekonomi. Pemerintah seolah menutup mata bahwa penerimaan pajak selama ini telah ideal tanpa adanya kebocoran. Nyatanya, rasio pajak (*tax ratio*) terhadap PDB masih sangat rendah, di bawah 12 persen. Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina yang sudah mencapai 14,4 persen, Singapura

14,2 persen, Malaysia 15,5 persen dan Thailand 17 persen (Kemenkeu, 2012).

Ironisnya, walaupun target penerimaan pajak diturunkan namun anggaran untuk birokrasi pemerintah tetap membengkak. Dari sisi pengeluaran, anggaran masih gemuk untuk subsidi dan belanja birokrasi. Sedangkan belanja strategis, yang berperan menstimulus perekonomian seperti belanja modal masih menjadi anak tiri. Postur APBN masih disandera Subsidi, bahkan persentasenya meningkat menjadi 29,1 persen dari total APBN-P. Sedangkan belanja pegawai, meski telah dilakukan penghematan karena defisit yang membengkak, masih mengambil porsi 19,5 persen. Belanja barang sendiri mengambil 17,3 persen dari total APBN-P 2013. Terakhir, belanja modal hanya mendapat bagian sekitar 16 persen dari total APBN-P 2013 (Kemenkeu, 2013).

Ketiadaan perubahan postur anggaran dalam APBN-P tersebut memberikan pemahaman yang jelas bahwa ketiadaan *good will* dalam politik anggaran guna menstimulus perekonomian, baik dari Pemerintah maupun DPR. Dengan postur anggaran yang terkuras untuk pengeluaran rutin dan biaya birokrasi, maka berapapun besarnya defisit anggaran yang dibiayai dengan utang tidak akan berperan secara signifikan mendorong perekonomian. Keniscayaan yang ada hanyalah semakin menggunungnya akumulasi utang pemerintah yang diikuti melonjaknya beban bunga dan cicilan utang setiap tahun. Hal itu tergambar pada APBN 2014 dimana pembayaran kewajiban utang mencapai Rp 121,28 triliun atau naik sekitar 9 triliun dari tahun sebelumnya Rp 112,5 triliun.

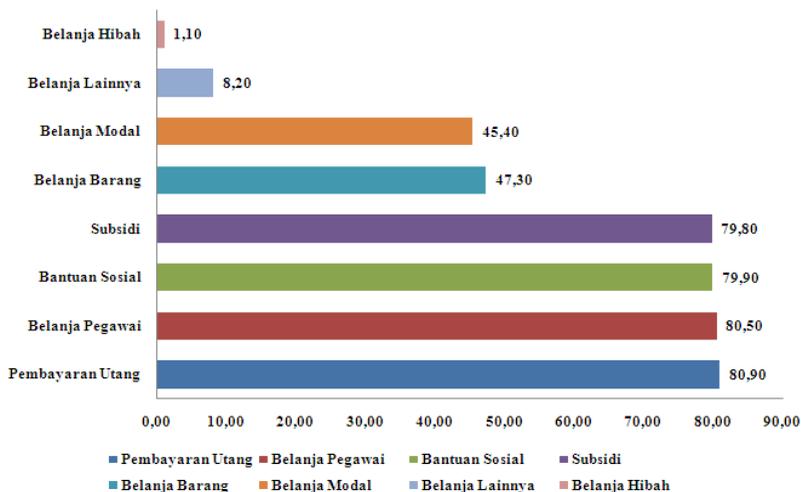
Penyakit kedua yaitu realisasi penyerapan anggaran yang tetap terkonsentrasi di akhir tahun. Parahnya lagi, tidak hanya

realisasi belanja yang terlambat namun juga realisasi penerimaan. Data realisasi APBN-P 2013 yang dikeluarkan Ditjen Perbendaharaan sampai 31 Oktober 2013 menunjukkan bahwa penerimaan negara baru terserap 73,2 persen (Rp 1096,7 triliun dari target Rp 1.497,5 triliun). Penerimaan pajak terealisasi 73,1 persen (Rp 839 triliun dari target Rp1.148,4 triliun) dan penerimaan negara bukan pajak terealisasi 73,8 persen (Rp 257,7 triliun dari target Rp 349,2 triliun).

Demikian juga realisasi belanja negara, dalam periode yang sama juga baru mencapai 71,7 persen (Rp 1238 triliun dari target 1726,2 triliun). Belanja pemerintah pusat hanya terealisasi 67,6 persen (Rp 808,7 triliun dari Rp 1.196,8 triliun). Parahnya lagi, dari belanja pemerintah pusat tersebut belanja modal, yang seharusnya menjadi prioritas dalam instrumen stimulus fiskal, justru yang paling lambat realisasinya (tidak sampai 50 persen). Anggaran belanja modal baru terserap sebesar 45,4 persen (Rp 87,4 triliun dari target Rp 192,6 triliun).

Sangat kontras bila dibandingkan dengan realisasi belanja rutin seperti belanja pegawai yang sudah mencapai 80,5 persen (Rp 187,5 triliun dari target Rp 233 triliun) dan subsidi 79,8 persen (Rp 277,9 triliun dari target 348,1 triliun). Dana transfer daerah sudah terealisasi 74,4 persen (Rp 393,6 triliun dari target 529,4 triliun). Pola yang terus berulang dari tahun ke tahun ini tentu sudah disadari oleh pemerintah, namun seperti tidak ada upaya konkrit untuk mengatasinya, khususnya pada kinerja belanja modal. Jadi jangan diberikan kewajiban untuk mengengjot penerimaan Negara, diberikan kewenangan membelanjakan anggaran saja Pemerintah tidak mampu merealisasikan secara tepat waktu. Jadi tidak salah jika publik mempertanyakan bagaimana efektifitas alokasi anggaran Pemerintah dalam mendorong perekonomian, jika

menyelesaikan persolan penyerapan anggaran saja tidak kunjung menemukan solusi.



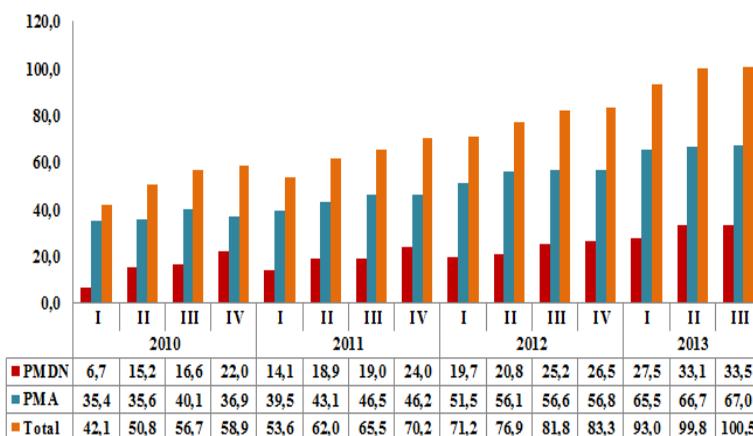
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2013, diolah

**Gambar 3.3. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
(1 Januari – 31 Oktober 2013)**

3.5. Kinerja Investasi

Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan adalah berasal dari investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun PMA. Pergerakan realisasi investasi sebetulnya tidak jauh dari pengaruh iklim investasi. Dalam publikasi *world economic forum* 2013 menunjukkan adanya perbaikan peringkat daya saing ekonomi indonesia. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap realisasi investasi. Namun demikian, tantangan investasi juga muncul dari gejolak nilai tukar yang berujung pada peningkatan inflasi. Bagi investor lonjakan inflasi sama artinya meningkatkan biaya memulai bisnis.

Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal 2013, realisasi investasi hingga triwulan III–2013 mencapai Rp293,30 triliun (konversi nilai PMA menggunakan nilai tukar tertentu). Angka tersebut melonjak sekitar 27,58 persen dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut melampaui target pemerintah sekitar 12 persen pada APBN 2013. Terhadap realisasi tersebut, PMA masih mengambil porsi terbesar sekitar 67,92 persen menyusut dari 71,42 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, peranan PMDN sepanjang Januari hingga September 2013 melonjak menjadi 32,08 persen dari posisi 28,58 persen per 2012. Peningkatan porsi PMDN terhadap total realisasi investasi diikuti dengan pertumbuhan realisasinya mencapai 43,23 persen (yoy); dua kali lipat dari pencapaian PMA yang hanya 21,32 persen (yoy).



Sumber : BKPM, 2013

Gambar 3.4. Perkembangan Realisasi Investasi Triwulanan 2010 – 2013

Berbicara realisasi investasi tidak dapat dipisahkan dari distribusi sektoral maupun regional. Merujuk pada sumber data

yang sama sebagian besar realisasi proyek dan nilai PMDN masih terpusat pada dua sektor, yaitu sekunder dan tersier sedangkan sektor primer tidak bergerak banyak. Apalagi sektor primer yang selama ini didominasi oleh realisasi investasi pada sektor perkebunan akan sedikit melambat sejalan dengan penurunan harga komoditas internasional. Sementara itu, sektor sekunder terhambat oleh peningkatan biaya akibat lonjakan harga BBM domestik dan inflasi serta fluktuasi nilai tukar.

Gambaran distribusi sektoral pada PMA tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada PMDN. Hanya saja pertumbuhan realisasi sektor primer dan sekunder PMA jauh lebih lambat dibandingkan PMDN. Secara sederhana ketertarikan investor asing terhadap sektor primer dan sekunder mulai memudar. Hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja yang sealama ini terpusat pada kedua sektor tersebut.

Tabel 3.6. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Menurut Sektor Triwulan III - 2013

	Q 2013		Pangsa		Pertumbuhan (yoy)	
	P	I	P	I	P	I
PMA (US\$ Juta)						
Sektor Primer	331	15.319,6	21,86	16,28	8,52	1,67
Sektor Sekunder	851	38.288,4	56,21	40,68	32,20	0,47
Sektor Tersier	332	40.504,5	21,93	43,04	39,76	69,12
Jumlah	1.514	94.112,6	-	-	28,53	30,21
PMDN (Rp Miliar)						
Sektor Primer	1.142	5.093,4	16,26	24,02	28,72	12,03
Sektor Sekunder	2.326	12.428,6	33,12	58,62	32,46	30,85
Sektor Tersier	3.554	3.680,8	50,61	17,36	49,32	- 40,66
Jumlah	7.022	21.202,7	-	-	40,39	13,92

Sumber : Diolah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013

Keterangan : P = banyak proyek ; I = Nilai Proyek

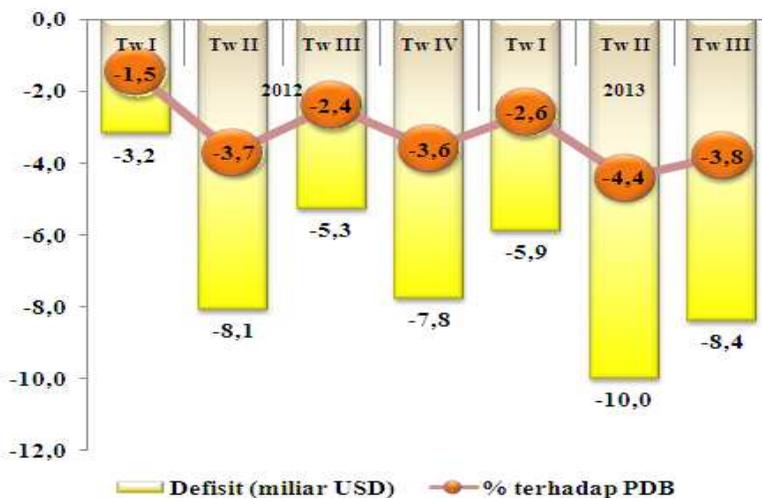
Porsi peruntukan investasi sebagian besar masih didominasi Pulau Jawa. Jika pada tahun 2012 komposisi Jawa dan luar Jawa masing-masing sebesar 52,7 persen dan 47,3 persen, maka pada triwulan III-2013 proporsi untuk Jawa mengalami peningkatan sedangkan luar Jawa semakin menurun, masing – masing sebesar 58,7 persen dan 41,3 persen. Disamping itu, penyerapan proyek di Jawa juga paling tinggi dibanding pulau lain dengan total 62,67 persen. Hal ini disebabkan kesiapannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Faktor sarana dan prasarana seperti kelengkapan infrastruktur yang tersedia di Jawa juga menjadi daya tarik bagi investor. Selain itu, kemudahan dalam melakukan bisnis serta regulasi pemerintah daerah dalam menjamin keamanan berinvestasi juga menjadi alasan para investor lebih memilih Jawa dibanding luar Jawa.

3.6. Sektor Luar Negeri

Hingga triwulan III 2013 defisit neraca perdagangan secara kumulatif sudah hampir menyamai defisit tahun 2012, yaitu sebesar US\$24,3 miliar, dimana defisit sepanjang 2012 sebesar US\$24,4 miliar. Dengan demikian jika pada triwulan IV 2013 tidak banyak upaya serius dan efektif untuk mengurangi tekanan defisit transaksi perdagangan, maka dapat dipastikan diakhir tahun ini nilai defisit akan lebih tinggi lagi.

Upaya untuk memperbaiki defisit transaksi perdagangan tentu melalui peningkatan kinerja ekspor dan pengurangan impor. Utamanya adalah pengendalian tekanan impor minyak yang besar pada 2012 mencapai US\$ 28,72 miliar dan 2013 diperkirakan US\$31,31 miliar. Sayangnya, impor minyak sulit untuk ditekan karena konsumsi BBM di dalam negeri terus

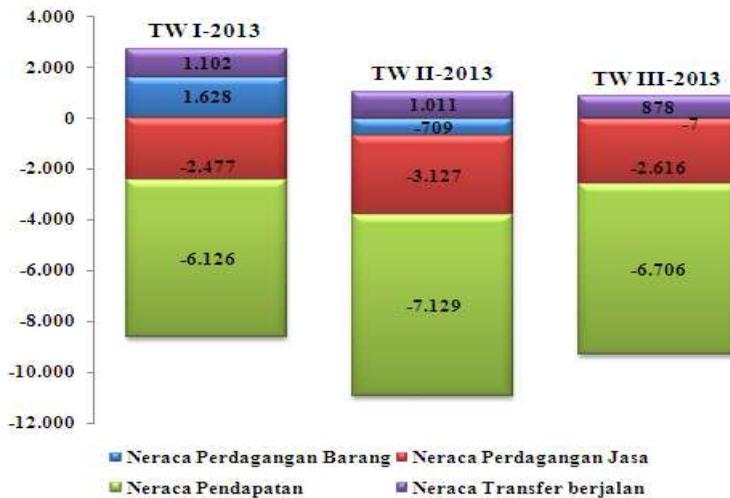
meningkat sedangkan produksi minyak domestik cenderung menurun. Berharap pada peningkatan ekspor pun tidak mudah mengingat harga komoditas internasional yang melemah, sementara 65 persen ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditas perkebunan dan energi yang masih mentah.



Sumber: Bank Indonesia, 2013

Gambar 3.5. Defisit Transaksi Berjalan Indonesia s.d. Triwulan III 2013

Dilihat dari komposisi neraca transaksi berjalan, hingga triwulan III 2013 hanya neraca transfer berjalan yang masih bernilai positif, neraca-neraca lain dalam transaksi berjalan semua negatif (Gambar 3.5). Upaya untuk mengurangi 'paceklik dollar' dari sisi neraca transaksi modal dan finansial mungkin dapat membantu, namun dalam jangka menengah-panjang faktor fundamental (terutama perbaikan kinerja ekspor-impor) tetap menjadi indikator yang lebih kuat dalam melihat perkembangan transaksi berjalan.



Sumber: Bank Indonesia, 2013

Gambar 3.6. Neraca Transaksi Berjalan 2013 (Juta US\$)

Optimisme perekonomian akan lebih meningkat jika transaksi berjalan mengalami perbaikan karena indikator ini dapat menggambarkan dinamika perekonomian internasional suatu negara. Sebaliknya, akan cukup sulit membangun optimisme perekonomian di tengah situasi transaksi berjalan yang tidak segera mengalami perbaikan. Nilai tukar rupiah pun akan mudah terguncang karena defisit transaksi berjalan merupakan persoalan domestik yang serius dan membutuhkan penanganan cepat agar stabilitas perekonomian dapat terjaga. Wacana eksternal seperti *tapering off*, *government shut down*, *debt ceiling*, dll. mungkin saja dapat meningkatkan gejolak nilai tukar, namun selama faktor fundamental rupiah (terutama transaksi berjalan) masih kuat maka dampaknya relatif hanya dalam jangka pendek. Sayangnya, dalam situasi global yang masih diliputi ketidakpastian ini, perekonomian Indonesia terjebak dalam defisit transaksi berjalan yang cukup dalam.

3.7. Pengangguran dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin lesu kian memberi rasa kecemasan pada kondisi ketenagakerjaan (dan pengangguran), tingkat kemiskinan serta ketimpangan yang selalu menjadi masalah klasik di Indonesia. Data BPS (2013) menunjukkan bahwa jumlah pekerja sampai Agustus 2013 sebanyak 110,80 juta orang, menurun dari sebelumnya pada Februari sebanyak 114,02 juta orang. Kondisi itu sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka semakin meningkat.

Berkaitan dengan tenaga kerja, Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan kualitas SDM yang belum nampak ada perbaikan berarti serta tuntutan kenaikan upah minimum buruh dari tahun ke tahun. Kualitas keterampilan (skill) tenaga kerja Indonesia yang masih sangat rendah. Data Susenas sepanjang 2009 hingga 2012 mencatat bahwa porsi tenaga kerja yang tidak pernah mengikuti kursus masih dominan, rata-rata di atas 90 persen per tahun. Pada Februari 2009, presentase penduduk yang tidak pernah mengikuti kursus mencapai 94,46 persen dari total 104 juta orang. Sampai pada Agustus porsi tersebut hanya turun 0,13 persen menjadi 94,33 persen, itupun dengan kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 112 juta orang.

Jika dilihat dari sembilan jenis keterampilan struktur penyusun tenaga kerja, hanya aneka kejuruan yang presentasenya relatif tinggi, rata-rata mencapai kisaran 3 persen. Sampai Agustus 2012, gambaran struktur tenaga kerja menurut keterampilan adalah sebagai berikut; Aneka Kejuruan (3,81 persen), Tata Niaga (1,17 persen), Otomotif (0,29 persen), Teknik Mekanik (0,15 persen), Pertanian (0,14 persen), Bangunan (0,05 persen), Listrik/Elektro (0,04 persen), Pariwisata (0,03 persen) dan

terakhir yang paling mengesankan Tidak Mengikuti Kursus (94,33 persen). Dapat dibayangkan bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika berdasarkan keterampilan saja, yang tidak mengikuti kursus mayoritas paling banyak berada di dalamnya.

Tabel 3.7. Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Keterampilan

	2009		2010		2011		2012	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Otomotif/1	0.24	0.24	0.24	0.24	0.34	0.24	0.27	0.29
Listik/Elektro/2	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.03	0.05	0.04
Bangunan/3	0.04	0.05	0.04	0.05	0.08	0.04	0.04	0.05
Teknik Mekanik/4	0.17	0.13	0.17	0.16	0.22	0.15	0.02	0.15
Tata Niaga/5	1.27	1.02	1.20	1.06	1.52	1.00	1.25	1.17
Aneka Kejuruan/6	3.58	2.73	2.96	3.09	4.54	3.42	3.51	3.81
Pariwisata/7	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
Pertanian/8	0.15	0.13	0.13	0.12	0.17	0.09	0.13	0.14
Tidak Mengikuti Kursus/9	94.46	95.61	95.15	95.18	93.04	95.00	94.70	94.33

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2012, telah diolah kembali

Sampai Agustus 2013 jumlah penganggur terbuka sebanyak 7,39 juta orang lebih tinggi dari Februari 2013 sebanyak 7,17 juta orang (meningkat 220 ribu orang). Melambatnya pertumbuhan karena macetnya investasi dan atmosfer kenaikan upah buruh di sektor industri agaknya menjadi penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2013.

Dampak melambatnya perekonomian juga berimbas pada penurunan angka kemiskinan. Selama September 2012 sampai Maret 2013 jumlah orang miskin hanya berkurang 520 ribu orang. Presentase penduduk miskin hanya turun 0,29 persen, dari 11,66 persen pada September 2012 menjadi 11,37 persen

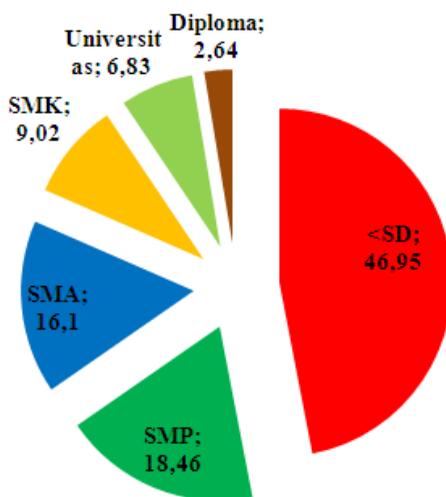
pada Maret 2013. Dari segi geografis, Maluku dan Papua seperti tidak terjamah dalam program pengentasan kemiskinan, terbukti dari semua wilayah persentase penduduk miskin di wilayah tersebut tetap saja tinggi (23,97 persen atau sejumlah 1,6 juta orang).

Data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS pada Maret ini bukan tidak mungkin meningkat jumlahnya mengingat pada Triwulan III terdapat kenaikan harga BBM dan TDL serta tingginya tingkat inflasi. Meski Bantuan Langsung Sementara (BLSM) dikururkan, tetapi dilapangan nyatanya banyak penduduk yang seharusnya layak mendapatkan bantuan ternyata tidak mendapat bantuan tersebut. Kompensasi berupa BLSM ini bukanlah langkah yang bijak dalam mengurangi angka kemiskinan.

Dari sisi pemerataan, pertumbuhan dan pembangunan seperti memang tidak didesain untuk kesejahteraan bersama, justru pro ketimpangan. Pada 1990 rasio gini masih 0,29. Kemudian semakin meningkat pada 2002 menjadi 0,32. Meningkatnya ketimpangan semakin jelas selama lima tahun terakhir, dari 0,37 pada 2009 hingga mencapai 0,41 pada 2013. Bahkan pada beberapa provinsi angkanya melebihi ketimpangan nasional seperti DKI Jakarta (0,43), Gorontalo (0,44) dan Papua (0,44). Kondisi ini kian membuktikan bahwa pemerintah belum mampu mengemban amanah konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan persaingan global, pada 2015 Indonesia dihadapkan dengan pasar tunggal ASEAN atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tenaga Kerja Indonesia akan semakin terdesak apabila kualitas SDM-nya tidak segera mendapat penanganan serius dari Pemerintah. Ironisnya hal itulah yang terjadi pada negeri dengan jumlah penduduk

terbanyak keempat ini. Pekerja dengan tingkat pendidikan SD (atau dibawahnya) mendominasi sebanyak 52,02 juta orang (47,90 persen). Sedangkan lulusan Diploma dan Universitas secara berturut-turut hanya sebanyak 2,92 juta orang (2,64 persen) dan 7,57 juta orang (6,83 persen). Bahkan SMK dengan orientasi lulusannya yang siap kerja hanya terserap sebanyak 9,99 juta orang (9,02 persen).



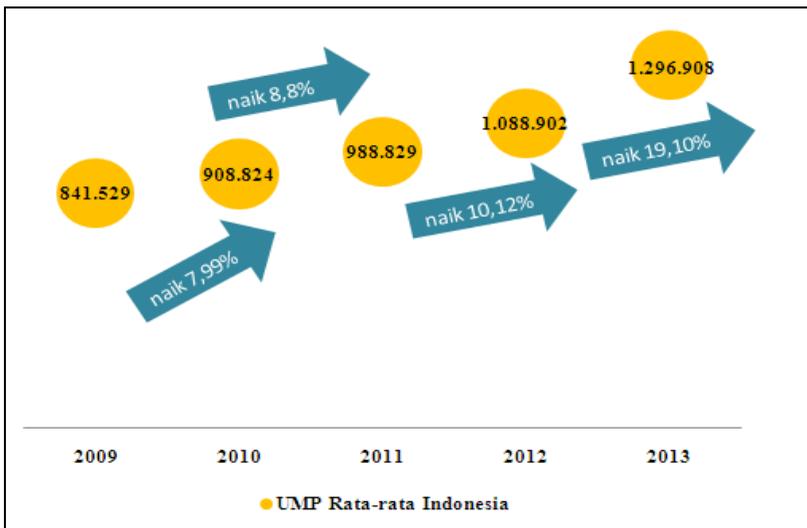
Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013, diolah

Gambar 3.7. Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 (persen)

Kondisi diatas tentu mengkhawatirkan, mengingat kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) salah satu faktor yang penting dalam kemajuan ekonomi dan persaingan global. Hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang tidak pernah usai, utamanya bagi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal sudah sekitar

satu dekade perjanjian MEA disepakati, namun tampaknya belum ada perubahan yang cukup menggembirakan pada kualitas SDM Tenaga Kerja Indonesia.

Belum cukup disitu, permasalahan klasik tentang tenaga kerja adalah pengupahan. Demo buruh selama 2013 setidaknya masih seputar upah minimum dan pengangkatan tenaga kerja alih daya menjadi karyawan tetap. Terkait dengan upah minimum, buruh menginginkan adanya kenaikan upah sebesar 50 persen. Buruh seakan tidak pernah puas dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) karena dinilai belum memenuhi harapan. Selama hampir lima tahun, UMP naik dari Rp841.529 pada 2009 menjadi Rp1.296.908 pada 2013 (naik sekitar 35 persen). Kenaikan paling tinggi adalah dari 2012 ke 2013, sekitar 16 persen. Tuntutan kenaikan upah ini seakan kontradiksi dengan produktivitas tenaga kerja.



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013, diolah

Gambar 3.8. Upah Minimum Provinsi Rata-rata Indonesia 2009-2013 (juta rupiah)

Kenaikan drastis UMP dalam dua tahun terakhir itu tentunya menimbulkan gelombang rasionalisasi buruh. Pasar tenaga kerja semakin terkikis sehingga pekerja terancam masuk pasar informal dan dapat menambah pengangguran. Hal itu dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan lapangan kerja. Kemampuan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja yang terus menurun dan upah pekerja yang kian meningkat mengindikasikan kemampuan negara dalam menyerap tenaga kerja semakin menurun. Tingginya hasrat buruh meminta kenaikan upah, dibanding dengan kualitas SDM dan produktivitas yang masih belum memenuhi harapan perlu segera dicari jalan keluar yang konkret, bukan sekedar janji yang tertulis di peraturan pemerintah maupun undang-undang yang tidak diamalkan.



Bab 4

***Tapering Off* dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia**

Perkembangan ekonomi global dan Indonesia sejak paruh kedua tidak dapat dipisahkan dari masalah yang lagi-lagi bersumber dari Amerika Serikat. Isu *tapering off* menyeruak di tengah-tengah persoalan inflasi, defisit neraca transaksi berjalan, dan pelemahan nilai tukar yang berlanjut pada perlambatan performa ekonomi nasional memberikan tekanan bagi pemerintah dan bank sentral. Bagian berikut ini akan menampilkan isu *tapering off* dan pengaruhnya terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

4.1. Isu *Tapering Off*

Dunia sedikit tercegang saat munculnya wacana pengurangan pembelian obligasi oleh the Fed. Jika isu ini benar, kondisi ini memberikan sinyal terhadap pemulihan ekonomi Amerika yang merupakan penyebab kekacauan sektor keuangan dunia pada 2008. Dua hal yang mungkin terjadi adalah (i) meningkatnya kinerja ekspor terutama pada negara-negara

emerging market dan (ii) lonjakan aliran dana keluar (*capital outflow*) menuju ke negara asal.

The Fed rencananya akan mengurangi belanja obligasi pemerintah sejak September 2013 (dari US\$85 miliar menjadi US\$75 miliar per bulannya) karena meyakini akan pemulihan ekonomi. Pada sisi lain, keputusan tersebut diarahkan untuk mengurangi pembengkakan neraca the Fed. Sepanjang Mei 2006 hingga Mei 2012, aset *the Fed* meningkat hingga 300 persen. Kebijakan the Fed menghimpun obligasi pemerintah AS menaikkan aset hingga 230 persen pada periode yang sama (Gros, Alcidi, dan Giovanni, 2012)¹. Peningkatan aset yang berlebihan yang begitu baik untuk neraca bank sentral.

Sejak krisis keuangan global, the Fed terkesan membantu peranan pemerintah AS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan program *Quantitative Easing* (QE). QE dilakukan karena buruknya transmisi kebijakan melalui suku bunga sehingga ekonomi tidak berjalan. Apalagi tidak terjadi koreksi (ke atas maupun ke bawah) suku bunga the Fed sejak krisis menyeruak.

Kinerja ekspor AS bermasalah karena minimnya permintaan dari negara-negara mitra dagang sejalan dengan pemburukan ekonomi global. Kinerja impor saat itu terpengaruh depresiasi Dollar terhadap mata uang utama dunia. Hal tersebut menyebabkan relatif mahalnya impor barang. Penurunan impor juga sejalan dengan minimnya permintaan industri lokal karena

¹ Gros, Daniel. Alcidi, Cinzia. Giovanni, Alessandro. 2013. Central Banks in Times of Crisis: The Fed versus the ECB. Directorate General For Internal Policies.

kelesuan ekonomi. Industri menghadapi masalah dari sisi pembiayaan, harga energi (minyak dunia) hingga tenaga kerja. Dengan sejumlah tekanan tersebut, daya saing ekonomi AS dalam survei *World Economic Form* (WEF) memburuk serta mengalami penurunan peringkat *outlook* utang.

Sejak 2012, berita tentang perbaikan ekonomi AS sebetulnya sudah terdengar cukup nyaring. Hanya saja, realisasinya belum terjadi signifikan. Realisasi pertumbuhan pada 2011 yang mencapai 2 persen kembali menurun pada 2012 menjadi 1,7 persen. Bahkan pada 2013, ekonomi negara Paman Sam ini hanya bergerak 1,3 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi pertumbuhan ekonomi AS yang tidak memuaskan berpengaruh besar terhadap penyelesaian tingkat pengangguran. Pada 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih pada level 7,8 persen. Angka tersebut jauh dari level sebelum krisis, di bawah 5 persen.

Tabel 4.1. Perkembangan Indikator Makroekonomi Amerika Serikat

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PDB	2,9	2,8	2	1,1	-2,4	2,8	2	1,7	1,4
TPT	4,8	4,4	5	7,2	10	9,4	8,5	7,8	7,6
Inflasi	3,4	2,5	4,1	0,1	2,7	1,5	3	2	1,8
The Fed Rate	4,25	5,25	4,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Sumber: Bank Indonesia², 2013, telah diolah kembali

Perkembangan harga di AS relatif terjaga. Realisasi inflasi pada akhir 2013 diperkirakan mencapai 1,8 persen. Sementara

² Bank Indonesia. 2013. Prospek Ekonomi Global Menurun, Risiko Negara Emerging Meningkat. Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional.

itu suku bunga kebijakan dipertahankan pada kisaran 0,25 persen, yang telah berlangsung sejak 2008. Kebijakan ini ditempuh AS untuk mengurangi masuknya dana asing ke ekonomi domestik yang dapat mendongkrak inflasi.

Perbaikan ekonomi AS yang selalu diwartakan memberikan pengaruh besar terhadap ekspektasi pelaku ekonomi global. Hal itu juga diikuti oleh penjelasan resmi dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat terhadap rencana pengurangan pembelian obligasi pemerintah AS (*tapering off*). Sebetulnya, tidak ada hal yang istimewa dari rencana tersebut. Hanya saja, kebijakan yang baru ini direspons berlebihan oleh pelaku pasar, terutama di negara berkembang. Selain itu, rilis data ekonomi AS belum secerah yang diperkirakan oleh berbagai ekonom (termasuk dalam survei Bloomberg).

4.2. Penundaan *Tapering Off*

Dasar pengurangan pembelian obligasi pemerintah AS oleh the Fed dimulai dari penentuan target-target nominal sebelum eksekusi dilakukan. Pada September 2012, setelah sukses menyalurkan *Quantitative Easing* I dan II, the Fed mulai memodifikasi program tersebut pada Desember 2012. Modifikasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang mulai memasuki titik terang.

Dua komponen yang menjadi penentu modifikasi kebijakan tersebut adalah (i) *rate pledge*, yang tergambar dari komitmen the Fed untuk menjaga suku bunga bank sentral (the Fund Rate) pada kisaran 0 hingga 0,25 persen. Keputusan mengubah besaran suku bunga jika TPT telah berada pada 6,5 persen. Poin kedua adalah berhubungan dengan pembelian *Mortgage-Backed Securities* (MBS) dan *Long-Dated Treasury*

Bonds (LDTB) bulanan sebesar US\$85 miliar. Angka tersebut akan tetap dipertahankan sampai terlihat perbaikan pada pasar tenaga kerja. Pembelian obligasi tersebut secara nyata telah mempergemuk neraca the Fed lebih dari US\$ 800 miliar sejak September 2012.

Dalam pengamatan Capital (2013)³ beberapa faktor-faktor yang mendorong penundaan *tapering off* adalah sebagai berikut: *Pertama*, tekanan pada sektor energi sepanjang periode rencana *tapering off* meningkat sehingga akan mengancam perekonomian AS jika *tapering off* dilakukan. Pada bulan-bulan rencana eksekusi *tapering off*, gejolak di Suriah semakin memanas sehingga mengancam *supply* minyak dunia. Jika pengurangan belanja obligasi dilakukan saat itu maka ekonomi AS akan terserang inflasi dari dua sumber sekaligus, baik dari sisi lonjakan *capital inflow* maupun lonjakan harga energi berupa harga minyak dunia. Jika demikian maka kinerja perusahaan akan memburuk sehingga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Kedua, kondisi fiskal AS semakin memburuk. Realisasi defisit meningkat dari ekspektasi. Apalagi munculnya perdebatan fiskal antara pemerintah dan kongres per akhir September 2013. Perdebatan tersebut mengarah pada anggaran dan *debt ceiling* yang berujung pada munculnya potensi *government shut-down*. Dengan berbagai gejolak yang dimunculkan, keputusan penundaan *tapering off* justru memunculkan ketidakpastian baru bagi perekonomian di dunia. Jika kebijakan tersebut dilaksanakan segera maka dampaknya dapat diukur dan

³ Toronto Capital. 2013. US Fed Tapering: Will it? When? What Consequences?

dilakukan penyesuaian-penyesuaian bagi perekonomian, terutama negara-negara *emerging market*.

4.3. Dampak *Tapering off* terhadap Indonesia

Fenomena *tapering off* ini dapat dikatakan menjadi salah satu pengujian pasar (*market test*) yang dilakukan oleh the Fed. Tes pasar yang dimaksud untuk melihat seberapa besar kebergantungan pelaku pasar terhadap perekonomian AS (terutama pada sektor keuangan). Tes permulaan ini dapat dikatakan cukup berhasil karena telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor, terutama di negara-negara *emerging market*. Beberapa indikator yang dapat merekam pengaruh dari rencana *tapering off* tersebut pada stabilitas sektor moneter Indonesia, diantaranya yaitu pengaruhnya terhadap fluktuasi nilai tukar, stabilitas pasar uang, pasar modal dan likuiditas perekonomian.

4.3.1. Gejolak Nilai Tukar

Pelemahan nilai tukar sejumlah negara selain disebabkan isu *tapering*, juga munculnya isu ketidakjelasan penyelesaian *debt ceiling* AS. Dari beberapa jenis mata uang, Rupiah dan Rupee menjadi dua mata uang yang tertekan lebih dalam. Sepanjang September 2013, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terdepresiasi hingga 18,90 persen (yoy) melonjak dari 16,84 persen (yoy) pada Agustus 2013. Yen Jepang juga mengalami kondisi yang sama. Hanya saja, depresiasi Yen diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jepang. Sepanjang periode September 2013 hanya Euro, Remimbi, serta Won yang mengalami apresiasi.

Tabel 4.2. Nilai Tukar AS Dollar terhadap Beberapa Mata Uang

	2012		2013		Pertumbuhan (yoy)	
	Ags	Sep	Ags	Sep	Ags	Sep
C A D	0,99	0,98	1,05	1,03	6,06	5,10
E U R	0,80	0,78	0,76	0,74	-5,00	-5,13
G B P	0,63	0,62	0,65	0,62	3,17	0,00
J P Y	78,39	77,96	98,17	97,79	25,23	25,44
SDRs	0,66	0,65	0,66	0,65	0,00	0,00
IDR	9,572,00	9,591,00	11,184,00	11,404,00	16,84	18,90
PHP	42,04	41,74	44,58	43,54	6,04	4,31
MYR	3,12	3,06	3,29	3,26	5,45	6,54
SGD	1,25	1,23	1,28	1,26	2,40	2,44
THB	31,30	30,83	32,15	31,30	2,72	1,52
CNY	6,35	6,29	6,12	6,12	-3,62	-2,70
KRW	1,134,63	1,111,38	1,110,04	1,073,22	-2,17	-3,43

Sumber: Bank Indonesia, 2013, telah diolah kembali

negatif = depresiasi positif = apresiasi

Pelemahan Rupiah bukan hanya terjadi pada mata uang Dollar Amerika Serikat tetapi pada sejumlah mata uang mitra dagang utama. Hanya pada Yen, nilai Rupiah menguat sepanjang September 2013. Artinya, pelemahan Rupiah kali ini bukan hanya disebabkan sentimen negatif dari fenomena *tapering off* tetapi karena masalah fundamental ekonomi nasional. Faktor fundamental yang utama dari nilai tukar rupiah adalah terjadinya defisit transaksi berjalan yang meningkat dari Triwulan I ke Triwulan II 2013. Peningkatan defisit ini mengindikasikan terjadinya kelangkaan likuiditas di pasar uang yang selanjutnya melambungkan 'harga' dollar Amerika atas

rupiah. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya repatriasi kapital yang membuat dollar di pasar domestik Indonesia semakin langka.

Sebagai informasi, pelemahan Rupiah terhadap Euro sepanjang September 2013 mencapai 26,31 persen (yoy) sedangkan terhadap Swiss Franc 25,12 persen (yoy); US\$ 21,12 persen (yoy); Hong Kong Dollar 21,10 persen (yoy); Pound Inggris 20,43 persen (yoy); Dollar Singapura 17,99 persen (yoy); Dollar Kanada 14,99 persen; Ringgit Malaysia 13,79 persen (yoy) dan Dollar Australia 7,57 persen (yoy).

Tabel 4.3. Nilai Tukar Rupiah terhadap Mitra Dagang Utama

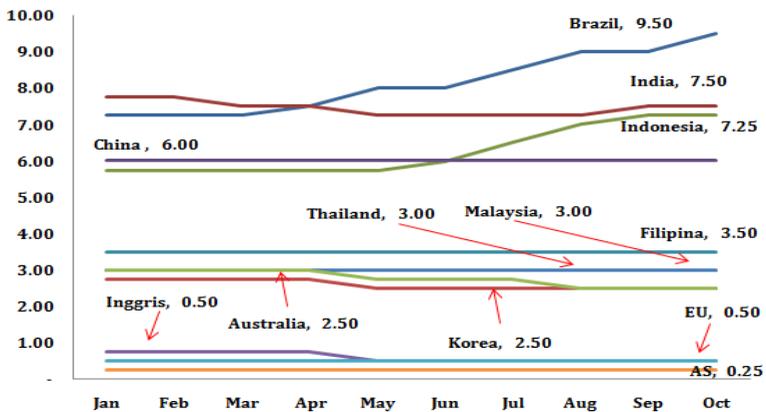
	2012		2013		Pertumbuhan (yoy)	
	Aug	Sep	Aug	Sep	Aug	Sep
A U D	8.990	8.611	9.838	10.038	-0,73	7,57
C A D	8.693	8.498	9.634	9.794	7,66	14,99
C H F	10.816	9.810	9.963	10.251	17,89	25,12
E U R	12.359	11.956	11.965	12.407	20,94	26,31
G B P	13.981	13.764	15.097	15.586	12,27	20,43
H K D	1.100	1.132	1.233	1.237	14,27	21,10
J P Y / 100	11.099	11.524	12.174	12.364	-8,58	-4,00
M Y R	2.871	2.768	3.060	3.132	8,07	13,79
S G D	7.103	6.796	7.631	7.826	12,21	17,99
U S D	8.578	8.823	9.560	9.588	14,27	21,12

Sumber: Bank Indonesia, 2013, telah diolah kembali
positif = depresiasi negatif = apresiasi

4.3.2. Kontraksi Moneter

Suku bunga kebijakan atau acuan (BI rate) terus melonjak. Penaikan tersebut sebagai upaya menahan *capital inflow* dan menyerap likuiditas karena banyaknya aksi jual di pasar modal. Beberapa bank sentral telah melakukan penyesuaian suku bunga per akhir September untuk mengantisipasi lonjakan *capital outflow* dan mengurangi tekanan inflasi. Indonesia dan India menaikkan suku bunga menjadi 7,25 persen dan 7,5 persen pada September.

Selain untuk menangani masalah *capital outflow* pada transaksi keuangan dan modal, penaikan suku bunga pada kedua negara ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta mengurangi tekanan dari defisit neraca transaksi berjalan. Beberapa negara seperti China, Filipina, Malaysia, Thailand, Korea, Australia masih mempertahankan suku bunga kebijakannya hingga Oktober 2013.



Gambar 4.1. Perkembangan Suku Bunga Kebijakan Beberapa Bank Sentral Oktober 2013

Sumber: SEKI-Bank Indonesia, 2013, diolah

4.3.3. Meningkatnya Risiko Likuiditas

Penaikan suku bunga acuan akan berdampak pada lonjakan suku bunga perbankan dan potensi peningkatan kredit macet. Penyesuaian suku bunga kebijakan (*BI rate*) yang diikuti dengan lonjakan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan bertansmisi ke suku bunga perbankan. Karakteristik bank di Indonesia relatif responsif terhadap kenaikan suku bunga dan relatif lamban dalam koreksi suku bunga ke bawah. Penarikan suku bunga oleh bank sentral biasanya langsung ditanggapi dengan arah yang sama. Sedangkan untuk koreksi ke bawah akan menunggu sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan (*time lag*).

Tabel 4.4. Perkembangan Suku Bunga di Indonesia

	2012						2013					
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
BI Rate	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.00	6.50	7.00	7.25	7.25
SBI 9 bulan	4.32	4.46	4.54	4.67	4.75	4.77	4.80	5.28	5.52	5.86	6.96	6.97
FASBI	3.75	3.75	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.25	4.75	5.25	5.50	5.50
FASBIS	3.75	3.75	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.25	4.75	5.25	5.50	5.50
Lending Facility (d/h Repo)	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	7.00	7.25	7.25
PUAB Pagi*	4.04	4.08	4.10	4.09	4.20	4.15	4.30	4.52	4.87	5.46	5.72	5.73
PUAB Pagi**	4.08	4.15	4.24	4.18	4.23	4.24	4.52	4.65	5.16	5.58	5.84	5.94
PUAB Sore*	4.06	4.06	4.09	4.11	4.19	4.15	4.45	4.60	4.89	5.42	5.70	5.70
PUAB Sore**	4.14	4.15	4.30	4.20	4.27	4.23	4.49	4.59	5.19	5.70	5.83	6.17
PUAB Valas*	0.20	0.16	0.15	0.15	0.12	0.13	0.35	0.20	0.17		0.11	0.11
PUAB Valas**	0.29	0.19	0.17	0.20	0.16	0.17	0.35	0.22	0.23	0.21	0.19	0.12
Suku Bunga Penjaminan DPK	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.25	6.25	7.00	7.00

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2013, telah diolah kembali

*1 hari **keseluruhan

BI rate melonjak menjadi 7,25 persen pada Oktober sedangkan SBI 9 bulan naik menjadi 6,97 persen. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia baik untuk bank konvensional dan syariah (1 hari sore) pada level 5,5 persen. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pagi dan sore melonjak menjadi 5,94

persen dan 6,17 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada PUAB valas dimana telah menembus 0,35 persen pada Juni 2013 meski menurun menjadi 0,11 persen pada Oktober 2013.

4.3.4. Paceklik Dollar

Melemahnya nilai tukar Rupiah tidak lepas dari terjadinya defisit transaksi berjalan yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Transaksi berjalan ini terdiri dari neraca perdagangan barang, neraca jasa, neraca pendapatan, dan transfer berjalan. Data transaksi berjalan ini dapat menjadi indikasi ketersediaan suplai valuta asing (valas) di pasar keuangan.

Dengan kondisi neraca transaksi berjalan yang negatif, mengindikasikan bahwa valuta asing yang masuk ke domestik (dari ekspor barang dan jasa, serta transfer pendapatan) lebih kecil dari yang keluar (untuk impor barang dan jasa, serta transfer pendapatan ke luar negeri). Transaksi berjalan yang sudah mengalami posisi negatif sejak triwulan IV 2011 hingga saat ini mendorong penguatan nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah karena suplai Dollar untuk pembayaran luar negeri di pasar domestik berkurang.

Cadangan devisa yang harus digelontorkan guna stabilisasi Rupiah pun tidak sedikit. Depresiasi Rupiah semakin parah seiring berbagai *update* fundamental ekonomi yang tidak begitu cerah. Salah satunya adalah defisit transaksi berjalan yang cukup besar (-US\$ 8,4 miliar atau 3,8 persen terhadap PDB). Sektor moneter pun akhirnya mulai dihadapkan pada tantangan pengelolaan stabilitas nilai tukar yang semakin tidak ringan.



Sumber: SEKI-Bank Indonesia, 2013

Gambar 4.2. Posisi Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah 2013

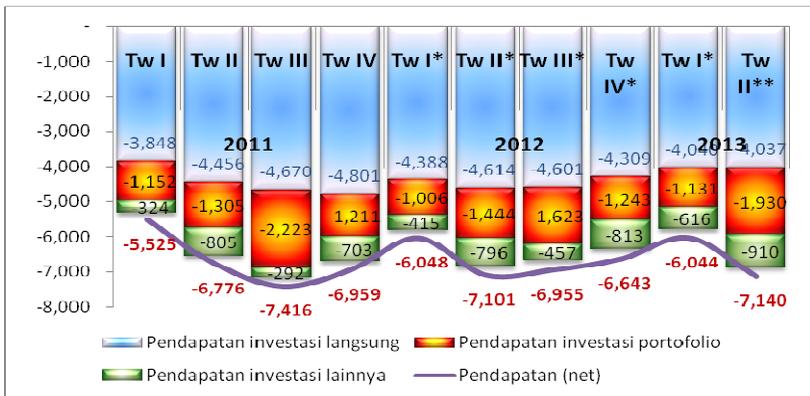
Didorong oleh fundamental transaksi berjalan yang semakin rentan serta wacana *tapering off* bank sentral Amerika Serikat, aliran dana asing yang keluar dari Indonesia hingga akhir Agustus 2013 cukup deras. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan cadangan devisa dari US\$108,78 miliar pada Januari menjadi US\$92,67 miliar pada Juli 2013, atau berkurang US\$ 16,11 miliar (15 persen). Menurunnya cadangan devisa ini seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dari posisi rata-rata Rp9.744/US\$ pada Januari menjadi Rp11.404/US\$ pada September 2013 (Gambar 4.2). Dengan demikian nilai tukar rupiah terhadap US\$ sudah terdepresiasi sebesar 17 persen sejak Januari-September 2013.

4.3.5. Repatriasi Kapital

Fenomena lain yang sebenarnya masih berkaitan erat dengan persoalan gejolak nilai tukar rupiah dan defisit transaksi

berjalan adalah terjadinya repatriasi kapital. Salah satu komponen transaksi berjalan adalah neraca pendapatan, di mana pada kasus Indonesia neraca pendapatan ini selalu defisit. Gambar 4.3 menunjukkan defisit yang terjadi pada salah satu komponen neraca pendapatan, yaitu kelompok pendapatan investasi (investasi langsung, portofolio, lainnya).

Secara singkat Gambar 4.3 mengilustrasikan bahwa secara neto lebih besar pendapatan investasi yang diperoleh bukan penduduk karena menyediakan modal finansial kepada penduduk Indonesia, dibanding penduduk Indonesia yang menyediakan modal finansial kepada bukan penduduk (yang dibuktikan dengan kepemilikan aset finansial luar negeri).



Sumber: SEKI-Bank Indonesia, 2013

Gambar 4.3. Neraca Pendapatan Investasi (Juta US\$)

Adanya repatriasi kapital yang cukup besar merupakan konsekuensi dari sangat terbukanya investasi bagi investor asing di Indonesia. Di sisi investasi langsung, perlombaan dengan negara-negara lain untuk mengundang masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) disamping meningkatkan surplus neraca transaksi modal ternyata juga menimbulkan masalah repatriasi

kapital, terutama jika laba yang diperoleh tidak ditanam kembali di Indonesia. Sementara di sisi investasi portofolio, pembayaran bunga atau kupon atas kepemilikan surat-surat berharga oleh nonresiden juga berakibat pada tergerusnya transaksi berjalan. Padahal kebijakan untuk berhutang dengan mengeluarkan berbagai jenis surat-surat berharga yang kepemilikannya cenderung didominasi asing belum signifikan berkurang.

4.3.6. Instabilitas Pasar Modal dan Uang

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melorot signifikan dari level tertinggi sepanjang sejarah di atas 5.000 menuju angka 4.000. Munculnya aksi jual di pasar saham memberikan tekanan cukup kuat terhadap nilai Rupiah. Dalam catatan Info Bank (2013)⁴ jumlah dana yang keluar tiba-tiba (*sudden reversal*) sepanjang Juni mencapai Rp34 triliun baik yang berada pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) maupun pasar saham.

Tekanan yang sama juga terjadi pada pasar obligasi. Peningkatan tekanan pada pasar obligasi tergambar dari lonjakan suku bunga. Data yang dihimpun dari siaran Pers Pemerintah menunjukkan terjadinya kenaikan suku bunga rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Artinya, investor menilai risiko utang Indonesia semakin meningkat.

Pada lelang 14 Februari 2013, realisasi rata-rata tertimbang suku bunga SPN adalah 3,08134 persen. Angka tersebut masih berada pada koridor suku bunga SPN yang ditetapkan pada

⁴ <http://www.infobanknews.com/2013/06/imbastapering-off-quantitative-easing-rp34-triliun-cabut-dari-indonesia/>

APBN 2013 sebesar 5 persen. Angka tersebut sedikit meningkat pada lelang 3 Juni 2013 sebesar 4,09818 persen. Peningkatan ini diduga karena munculnya persepsi peserta lelang akan ancaman inflasi dari rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

**Tabel 4.5. Perkembangan Realisasi Suku Bunga SPN
(Rata-rata Tertimbang)**

Seri	Periode	Jatuh Tempo	Suku Bunga (rata-rata Tertimbang)
VR0021, VR0024, VR0028, VR0029	25 Februari s.d 25 Mei 2013	25 Mei 2013	14 Februari 2013 = 3,08134%
VR0019, VR0022, VR0025, VR0030	25 Juni 2013 s.d 25 September 2013	25 September 2013	3 Juni 2013 = 4,09818%
VR0021, VR0024, VR0028, VR0029	25 Agustus 2013 s.d 25 November 2013	25 November 2013	30 Juli 2013 = 5,87542%
VR0019, VR0022, VR0025, VR0030	25 September 2013 s.d 25 Desember 2013	25 Desember 2013	10 September 2013 = 5,54250%
VR0020, VR0023, VR0026, VR0027, VR0031	25 Oktober 2013 s.d 25 Januari 2014	25 Januari 2014	8 Oktober 2013 = 5,26650%

Sumber: www.bi.go.id, berbagai terbitan

Besarnya pengaruh *capital outflow* terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari kepemilikan asing dalam berbagai portofolio nasional. Data Kementerian Keuangan (2013)⁵ kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) sejak Desember 2009 hingga Agustus 2013 melonjak. Pada 2009 porsi

⁵ Kementerian Keuangan. 2013. Profil Utang Pemerintah Agustus 2013.

asing dalam SBN baru 19 persen dari total sedangkan untuk 2010 dan 2011 masing-masing 30,53 persen dan 30,80 persen. Pada 2012 dan Juli 2013, porsi asing menjadi 32,98 persen dan 31,33 persen. Akhir Agustus 2013 porsi asing menjadi 30,64 persen. Penurunan porsi asing dalam SBN tersebut menjadi salah satu indikasi *capital outflow*.

Secara umum kepemilikan SBN oleh asing didominasi jangka panjang (di atas 10 tahun). Tabel berikut ini menampilkan struktur kepemilikan asing dalam SBN sepanjang 2009 hingga Agustus 2013.

Tabel 4.6. Struktur Kepemilikan SBN Asing di Indonesia

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013		
					Juni	Juli	Agustus
% terhadap total	19	30,53	30,80	32,98	31,85	31,33	30,64
0-1	4,46	10,18	11,81	7,84	3,97	4,07	3,99
>1-2	4,74	4,64	8,19	2,83	6,64	6,44	5,76
>2-5	19,78	18,14	16,78	16,5	15,45	14,78	15,03
>5-10	21,72	21,03	24,93	27,83	30,03	33,95	34,97
>10	49,30	46	38,23	45,01	40,91	40,76	40,26

Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

4.3.7 Pengaruh pada Sektor Perbankan

Lonjakan suku bunga perbankan dan potensi peningkatan kredit macet. Penyesuaian suku bunga kebijakan (BI rate) yang diikuti dengan lonjakan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan bertansmisi ke suku bunga perbankan. Karakteristik bank di

Indonesia relatif responsif terhadap kenaikan suku bunga dan relatif lamban dalam koreksi suku bunga ke bawah. Peningkatan suku bunga oleh bank sentral biasanya langsung ditanggapi dengan arah yang sama. Sedangkan untuk koreksi ke bawah akan menunggu sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan (*time lag*).

Perkembangan permodalan perbankan masih tergolong baik dan berada dalam koridor Basel III. Sampai September 2013, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank umum pada level 16,42 persen. Namun, potensi lonjakan kredit macet (*Non Performing Loans*) sangat mungkin terjadi karena perlambatan kinerja ekonomi nasional dan peningkatan BI *rate*. Perlambatan kinerja ekonomi nasional yang diikuti dengan lonjakan harga dana dari pengaruh kenaikan BI *rate* akan semakin menekan kinerja perusahaan nasional baik yang berorientasi pasar lokal maupun ekspor.

4.3.8. Kesehatan Fiskal

Pengaruh rencana *tapering off* pada sektor fiskal tergambar dari lonjakan pembayaran pokok utang pemerintah. Denominasi utang pemerintah dan swasta per Agustus bermata uang US\$ mencapai 68 persen; sisanya mata uang Yen, Dollar Australia dan Euro. Hal tersebut membutuhkan jumlah dollar yang cukup besar.

Penghimpunan dollar ke domestik semakin menipis sejak krisis 2010 karena penurunan ekspor dan lonjakan impor. Pada bagian lain, defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang semakin menjadi-jadi mendorong aliran valas ke luar. Penghimpunan Dollar Amerika Serikat sejak krisis keuangan global semakin menurun. Pada 2005 aliran Dollar Amerika Serikat dari transaksi perdagangan bersih masih surplus US\$18

triliun dan meningkat menjadi US\$33 triliun dan USD39 triliun pada dua tahun berikutnya.

Tabel 4.7. Aliran Dollar Amerika Serikat dari Perdagangan Internasional

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012 Ags	2013 :Ags
Nomigas (I)										
Ekspor (a)	80.91	97.46	110.76	131.34	111.69	148.40	188.03	175.04	116.86	91.54
Impor (b)	65.27	69.70	75.28	104.50	74.96	101.14	136.72	144.87	95.99	96.50
Selisih (a-b)	15.64	27.76	35.48	26.84	36.73	47.27	51.31	30.17	20.87	-4.96
Migas (II)										
Ekspor ©	19.97	22.64	24.49	31.10	19.99	27.77	35.96	32.32	22.43	19.99
Impor (d)	17.16	17.29	20.55	25.44	16.00	26.70	40.01	42.60	27.70	30.22
Selisih (c-d)	2.81	5.35	3.94	5.66	3.99	1.07	-4.05	-10.28	-5.27	-10.24
Total (I+II)										
Ekspor	101	120	135	162	132	176	224	207	139	112
Impor	82	87	96	130	91	128	177	187	124	127
Selisih	18	33	39	32	41	48	47	20	16	-15
Pertumbuhan (yoy)										
Ekspor		19.06	12.62	20.10	-18.93	33.78	27.14	-7.42	-	-19.93
Impor		5.54	10.16	35.60	-30.00	40.53	38.25	6.08	-	2.45
Selisih		79.46	19.08	-17.58	25.33	18.70	-2.23	-57.90	-	-197.38

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2013, telah diolah kembali

Peningkatan impor sejak 2011 yang tidak diikuti dengan lonjakan ekspor semakin mengurangi ketersediaan Dollar Amerika Serikat di Indonesia. Selisih penghimpunan Dollar Amerika Serikat sepanjang 2012 menipis dan mencetak level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun tersebut surplus penghimpunan Dollar Amerika Serikat hanya US\$20 triliun. Kondisi yang semakin sulit terjadi pada 2013. Hingga Agustus 2013 penghimpunan Dollar Amerika Serikat dari

perdagangan internasional mengalami defisit hingga US\$ 15 triliun karena lonjakan permintaan impor bahan bakar. Sepanjang Januari hingga Agustus 2013, penghimpunan Dollar Amerika Serikat hanya US\$112 triliun sedangkan kebutuhan Dollar Amerika Serikat untuk impor sekitar US\$127 triliun.

Kebutuhan Dollar Amerika Serikat untuk pembiayaan luar negeri tidak sejalan dengan ketersediaannya. Kondisi inilah yang menyebabkan tekanan berbagai indikator utang Indonesia. Rasio kewajiban utang luar negeri terhadap cadangan devisa Indonesia pada 2013 (prognosa) mencapai 7,3 persen menurun dari 2012 sekitar 7,9 persen. Data Kementerian Keuangan (2013) menunjukkan *interest rate risk* untuk Triwulan II-2013 *variabel rate ratio* (5) dan *refixing rate* (%) mencapai 15,6 persen dan 22,2 persen membaik dari 16,2 persen dan 22,5 persen pada 2012. Sementara itu *exchange rate risk* pada Triwulan II-2013 *FX Debt to GDP Ratio* (%) mencapai 10,2 persen dan *FX Debt to Total Debt Ratio* (%) sekitar 43,1 persen menurun dari 10,6 persen dan 44,4 persen pada 2012. Potensi pemburukan pada kedua indikator ini akan semakin terasa pada Triwulan III hingga akhir 2014.

Meski pada rasio beban utang terhadap PDB masih di bawah 50 persen namun beberapa indikator belum cukup aman. Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap total utang pada Triwulan II-2013 mencapai 18,1 persen sedangkan rasio utang jangka pendek berdasarkan waktu sisa terhadap total utang adalah 21,1 persen. Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal dan jangka waktu sisa terhadap cadangan devisa cenderung meningkat sejalan dengan penurunan cadangan devisa. Rasio pembayaran utang (*debt service ratio*) melonjak menjadi 41,4 persen sedangkan rasio utang terhadap ekspor meningkat menjadi 118,7 persen

karena penambahan utang tidak diikuti dengan peningkatan ekspor.

Tabel 4.8. Perkembangan Indikator Utang Indonesia

Indikator	2011	2012	2013:Q1	2013:Q2
Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap total utang	16,9	17,5	18,1	18,1
Rasio utang jangka pendek berdasarkan waktu sisa terhadap total utang	20,7	21,7	21,2	21,2
Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap cadangan devisa	34,7	39,2	44	47,6
Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu sisa terhadap cadangan devisa	42,5	48,5	51,4	55,7
Rasio pembayaran utang (<i>debt service ratio</i>)	21,7	34,9	34,8	41,4
Rasio utang terhadap Ekspor	97,3	113,6	115,9	118,7
Rasio utang terhadap PDB	26,4	28,7	28,7	31,3

Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

Kebutuhan akan ketersediaan Dollar Amerika Serikat untuk pembayaran utang dapat diamati dari struktur jangka waktu utang. Sampai Juni 2013 struktur utang Indonesia masih didominasi utang jangka panjang. Jenis utang ini mengambil porsi 81,91 persen pada Juni 2013 (pemerintah 44,05 persen; bank sentral 1,26 persen; dan swasta 36,59 persen). Sementara itu utang jangka pendek mengisi 18,09 persen dari total utang (pemerintah 0,14 persen; bank sentral 2,60 persen; dan swasta 15,34 persen).

4.4. Menangkal Penjalaran Nilai Tukar

Mengingat eskalasi pelemahan rupiah yang dapat berimplikasi secara luas, maka upaya mitigasi untuk mencegah berlanjutnya depresiasi ke arah yang lebih dalam harus segera dilakukan. Upaya ini tidak hanya menumpukkan kebijakan

kepada otoritas moneter sebagai ujung tombak stabilisasi rupiah. Lebih dari itu peran otoritas fiskal juga sangat diperlukan.

Agar dapat optimal, fokus kebijakan yang diambil harus dapat membidik faktor-faktor fundamental yang menyebabkan pelemahan nilai tukar. Jamak diketahui bahwa secara fundamental salah satu penyebab utama pelemahan rupiah adalah menurunnya kinerja neraca perdagangan. Seiring neraca perdagangan yang mengalami defisit nilai tukar rupiah juga terdepresiasi.

Langkah fundamental mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor, baik migas maupun non migas. Di sektor migas, target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten agar tidak terjadi pembengkakan. Sementara di sektor non migas terutama pangan, respons atas naiknya inflasi tidak selalu dapat diselesaikan dengan kebijakan impor. Faktanya, inflasi juga dipengaruhi oleh timpangnya struktur pasar komoditas pangan. Untuk itu, harus ada upaya riil dari pemerintah untuk menertibkan tata niaga komoditas pangan dan memperbaiki jalur distribusi barang dan jasa.

Selain langkah tersebut, untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan juga perlu dilakukan optimalisasi *Non Tariff Barrier* (NTB). Perlu segera mengevaluasi, merevisi dan menerapkan secara tegas semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku. Di luar itu, pemanfaatan pasar domestik secara lebih optimal dengan memberi insentif bagi produk dalam negeri agar tidak semakin terdesak oleh produk-produk impor juga sangat diperlukan. Dengan meminimasi ruang gerak penetrasi produk impor di pasar dalam negeri, defisit neraca

perdagangan akan lebih mudah diatasi dan stabilisasi rupiah dapat terealisasi.

Terakhir, diversifikasi mata uang dalam pembayaran internasional perlu digalakkan. Dalam kontrak dagang dengan China dan Jepang misalnya, tidak harus pembayaran dalam dollar Amerika Serikat, mengingat mata uang negara-negara mitra dagang tersebut tidak dalam dollar AS. Jika valuta asing dalam pembayaran internasional dapat terdiversifikasi maka ketergantungan perekonomian Indonesia akan ketersediaan dollar AS dapat berkurang, sehingga nilai tukar rupiah akan lebih stabil.



Bab 5

Ekonomi Terbelit Defisit

Pada akhir tahun 2012, INDEF telah memberikan beberapa catatan penting terkait rapuhnya pijakan fondasi ekonomi Indonesia. Utamanya dalam hal ancaman defisit neraca perdagangan yang selanjutnya akan menggerus neraca pembayaran serta defisit primer yang dapat menyebabkan goyahnya keseimbangan fiskal dan membuat ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas. Sayangnya, hasil kajian dan rekomendasi INDEF hampir tidak ada yang ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah. Tidak ada kebijakan dan solusi konkrit dalam menangani dan mengatasi persoalan fundamental tersebut. Akibatnya, kinerja ekonomi Indonesia hingga akhir 2013 alih-alih menunjukkan perbaikan, justru semakin memburuk.

Pemerintah telah terbuai oleh capaian angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim tertinggi kedua di Asia selama 2012, yang mencapai 6,23 persen dan melupakan banyak persoalan fundamental yang mengkhawatirkan dan serius. Tekanan defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal yang semakin memburuk sejak 2012 tidak diselesaikan dari pokok utama persoalannya. Respon kebijakan hanya bersifat instan dan tidak berdasarkan

perencanaan dan koordinasi yang matang, akibatnya justru semakin membuat carut marut perekonomian. Alhasil, secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perlambatan sepanjang 2013 ini.

INDEF mencatat, dalam 2013 ini terdapat dua persoalan mendasar dan krusial yang dapat menggerogoti pertumbuhan dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi, yaitu **defisit neraca pembayaran** dan **defisit keseimbangan primer** dalam APBN. Defisit neraca pembayaran merupakan akibat dari semakin anjloknya transaksi berjalan Indonesia. Defisit neraca perdagangan migas, jasa dan pendapatan yang semakin parah hingga 2013 ini merupakan biang keladi utama yang menyebabkan defisit transaksi berjalan terus berlanjut. Di sisi lain, surplus transaksi modal dan finansial semakin mengecil akibat dari perlambatan investasi. Akibatnya, defisit neraca pembayaran pun tidak dapat dihindari. Muara dari prestasi buruk tersebut tidak lain adalah semakin tergerusnya cadangan devisa Indonesia. Dalam satu tahun terakhir cadangan devisa Indonesia turun dari US\$112,78 miliar menjadi US\$95,68 miliar.

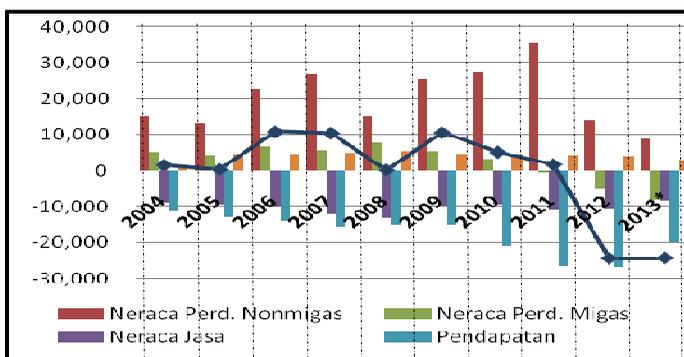
5.1 Potret Buram Transaksi Berjalan

Capaian defisit terbesar sepanjang sejarah pada transaksi berjalan di 2012 ternyata masih berlanjut di 2013. Hingga triwulan III 2013 besarnya defisit transaksi berjalan sudah hampir menyamai defisit sepanjang 2012. Tercatat bahwa hingga triwulan III 2013, defisit transaksi berjalan telah mencapai -US\$24,32 miliar. Padahal defisit tahun 2012 lalu secara keseluruhan sudah mencapai -US\$24,43 miliar atau 2,8 persen dari PDB (Gambar 5.1). Jika tidak ada langkah riil pemerintah

untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, maka bukan tidak mungkin defisit transaksi berjalan pada 2013 ini akan lebih besar dari tahun sebelumnya dan akan menjadi defisit terbesar yang pernah dialami Indonesia. Potret buram transaksi berjalan tersebut jelas menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya krisis ekonomi.

Akar permasalahan yang menjadi penyebab defisit transaksi berjalan antara 2012 dan 2013 terletak pada hal yang sama. Berdasarkan data pada Gambar 5.1, sejak 2004, komponen neraca jasa, neraca migas dan pendapatan selalu mengalami defisit, namun mampu dieliminir oleh neraca perdagangan nonmigas yang masih mencatat surplus besar. Tetapi sejak 2012 hingga 2013 ini, surplus neraca perdagangan nonmigas semakin mengecil sehingga tidak mampu menutup besarnya defisit neraca jasa, migas dan pendapatan. Alhasil defisit transaksi berjalan pun tidak dapat dihindari. Defisit ini juga merupakan yang pertama sejak berakhirnya krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Gambar 5.1. Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia (US\$ Juta)



*) Hingga triwulan III 2013

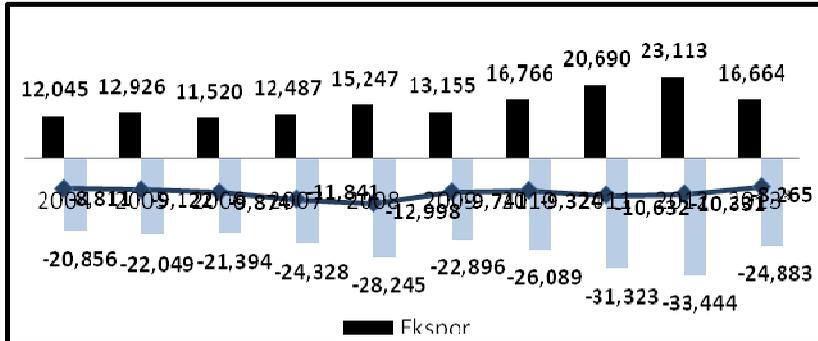
Sumber : Bank Indonesia, 2013

Merosotnya kinerja perdagangan terutama dari sektor nonmigas (yang selama ini menjadi andalan untuk menutup defisit transaksi berjalan) dinilai menjadi salah satu penyebab utama dari keterpurukan kinerja transaksi berjalan. Hingga triwulan III 2013, neraca perdagangan nonmigas hanya surplus sebesar US\$8,89 miliar, lebih rendah dari surplus tahun lalu pada periode yang sama yaitu senilai US\$10,63 miliar. Selain itu, defisit pada neraca perdagangan migas (terutama minyak) kian membesar. Hingga triwulan III 2013, defisit pada migas telah mencapai -US\$7,97 miliar, lebih besar dari tahun lalu pada periode yang sama (-US\$2,82 miliar). Defisit migas yang kian membesar dikarenakan naiknya impor minyak sebesar 10,30 persen (y o y). Sementara kenaikan ekspor gas tidak mampu menutup defisit tersebut.

Pada neraca jasa, berkurangnya defisit pada triwulan III 2013 terasa percuma karena tidak diikuti oleh perbaikan pada neraca perdagangan barang yang justru makin anjlok. Sehingga hal tersebut tidak mampu mendorong kinerja transaksi berjalan secara keseluruhan. Mengecilnya defisit neraca jasa tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pembayaran jasa *freight* seiring dengan impor yang menurun. Sejalan dengan menurunnya impor nonmigas, pembayaran jasa pengangkutan barang hingga triwulan III -2013 lebih rendah dari tahun lalu pada periode yang sama. Namun, penurunan pembayaran jasa angkutan barang yang berakibat pada perbaikan defisit neraca jasa bukan berarti kabar baik. Justru hal tersebut mengarah pada situasi yang mengkhawatirkan. Penurunan impor barang yang notabene merupakan impor bahan baku dan penolong merupakan sinyal akan terjadinya perlambatan perekonomian. Kegiatan ekonomi dan produksi (yang mengandalkan bahan baku dan penolong dari impor) akan berkurang, permintaan terhadap tenaga kerja

pun otomatis berkurang, bahkan berpotensi terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor riil. Akibatnya output dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh melambat.

Gambar 5.2 Perkembangan Neraca Jasa Indonesia (US\$ Juta)

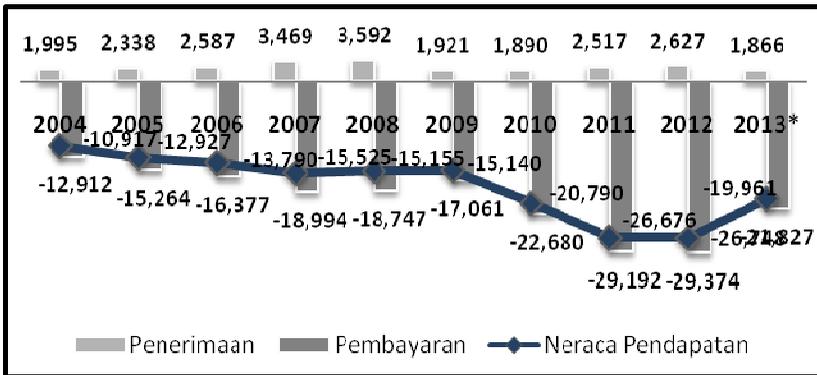


*) Hingga triwulan III 2013

Sumber : Bank Indonesia, 2013

Dari sisi neraca pendapatan, pada 2013 defisit neraca pendapatan juga mengalami penurunan. Hingga triwulan III 2013, defisit tersebut mencapai US\$19,96 miliar, lebih rendah dari tahun sebelumnya (hingga triwulan III) yang sempat mencapai US\$20,11 miliar. Berkurangnya defisit neraca pendapatan tersebut utamanya disebabkan karena berkurangnya pembayaran bunga utang dan dividen atas kepemilikan surat-surat berharga oleh nonresiden. Sementara itu, pembayaran bunga pinjaman luar negeri, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta mengalami penurunan karena terkait dengan pola musiman. Di sisi lain, juga terjadi penurunan transfer keuntungan kepada investor asing, terutama akibat penurunan surplus transaksi modal dan finansial yang didorong oleh penurunan arus masuk investasi portofolio asing dan adanya penempatan dana oleh perbankan domestik di luar negeri.

**Gambar 5.3 Perkembangan Neraca Pendapatan Indonesia
(US\$ Juta)**



*) : Hingga triwulan III 2013

Sumber : Bank Indonesia, 2013

Penurunan defisit neraca pendapatan dalam kasus seperti yang dialami oleh struktur neraca pembayaran Indonesia tersebut bukan merupakan sebuah prestasi. Karena lebih disebabkan oleh penurunan kinerja dari sisi eksternal dan bukan karena perbaikan kinerja ekonomi internal (seperti meningkatnya penerimaan dari hasil yang diperoleh tenaga kerja Indonesia atau hasil dari modal finansial Indonesia kepada nonresiden). Penurunan defisit ini disebabkan oleh berkurangnya sejumlah dana yang harus ditransfer Indonesia ke luar negeri karena memanfaatkan tenaga kerja atau modal finansial asing. Hal tersebut mengandung arti bahwa telah terjadi penurunan pada sisi transaksi modal dan finansial. Berdasarkan laporan neraca pembayaran Indonesia hingga triwulan III 2013, penurunan neraca pendapatan dikonfirmasi oleh penurunan transaksi modal dan finansial. Penurunan transaksi modal dan finansial tersebut ternyata lebih disebabkan oleh perlambatan arus modal asing dalam bentuk investasi portofolio seiring dengan semakin

minimnya arus dana masuk dalam surat-surat berharga rupiah. Aksi *risk on – risk off* nonresident di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang mencermati perkembangan kondisi Amerika Serikat (yang diliputi berbagai tantangan seperti *Government Shutdown*, *debt ceiling* dan pengurangan stimulus), menahan laju arus modal asing masuk ke Indonesia.

Selama ini besaran yang paling sering dijadikan sebagai kambing hitam yang menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan di Indonesia, adalah (Nizar, 2012): **pertama**, penurunan surplus neraca perdagangan barang (*trade balance*) sebagai akibat menurunnya ekspor dan/atau meningkatnya impor barang. Kondisi ini memang terlihat dalam tahun 2012 dan 2013, dimana surplus neraca perdagangan mengalami penurunan lebih dari 75 persen bila dibandingkan dengan surplus tahun 2011; **kedua** defisit neraca jasa-jasa (*services accounts*); dan **ketiga**, defisit pada neraca pendapatan neto (*net income*). Bila diperhatikan selama ini, neraca jasa-jasa dan pendapatan neto selalu mengalami defisit. Bahkan dalam delapan tahun terakhir, defisit neraca pendapatan telah menjadi kontributor terbesar bagi defisit transaksi berjalan. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pendapatan yang harus ditransfer ke luar negeri lebih besar daripada pendapatan yang diterima Indonesia dari luar negeri. Salah satu pendapatan yang ditransfer ke luar negeri adalah bunga pinjaman luar negeri pemerintah. Besaran bunga pinjaman ini juga dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa APBN dan transaksi berjalan memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Adanya keterkaitan antara besaran di dalam APBN dan transaksi berjalan ini juga telah sejak lama menjadi objek studi empiris di berbagai negara. Secara luas hubungan tersebut

dibangun dalam hipotesis defisit kembar (*twin deficit hypothesis*, TDH), yang menyatakan bahwa defisit anggaran akan menyebabkan defisit transaksi berjalan.

5.2 Defisit Perdagangan: Minim Pengaman

Capaian buruk pada transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2012-2013 tidak terlepas dari peranan defisit neraca perdagangan. Meskipun defisit neraca pendapatan merupakan kontributor terbesar bagi defisit transaksi berjalan, namun hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak suntikan modal finansial dari luar negeri untuk membangun kegiatan ekonominya. Semakin banyak modal finansial asing yang masuk ke dalam negeri, maka semakin banyak pembayaran dari Indonesia ke luar negeri atas hasil dari modal asing tersebut. Harapan setelah banyaknya aliran modal finansial asing ke dalam negeri tersebut adalah terciptanya sektor industri yang memiliki orientasi ekspor. Namun kenyataannya yang terjadi adalah aliran modal finansial asing yang masuk ke dalam negeri tersebut diikuti oleh aliran impor barang (bahan baku dan penolong) yang jumlahnya sangat besar dan tidak mampu dikonversi menjadi produk ekspor yang berdaya saing di pasar internasional. Alhasil, neraca perdagangan barang tidak mampu menutup dasarnya pembayaran atas hasil dari modal asing tersebut atau dengan kata lain defisit neraca pendapatan jauh lebih besar dari surplus neraca perdagangan barang (nonmigas).

Melemahnya neraca perdagangan barang disebabkan karena menurunnya kemampuan ekspor Indonesia disertai dengan lonjakan impor baik pada sektor migas maupun nonmigas. Hal tersebut merupakan kompilasi yang membahayakan dan mengancam fondasi perekonomian

nasional. Menurunnya kinerja ekspor Indonesia akan berdampak pada produksi dan output industri dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Satu pesan yang dapat dilihat berdasarkan realita adalah urgensi untuk mengakselerasi industri manufaktur Indonesia mengingat sektor ini berkontribusi dominan terhadap total pembentukan nilai ekspor Indonesia dalam aspek *nominal value*.

Defisit neraca perdagangan yang terjadi di hampir dua tahun berturut-turut (2012-2013) semakin menambah kekhawatiran akan hilangnya tradisi surplus perdagangan Indonesia. Bagaimana tidak, rekor buruk neraca perdagangan pada 2012 lalu ternyata diperparah pada 2013. Berdasarkan Tabel 5.1, sepanjang tahun 2013 (hingga September), neraca perdagangan bulanan hampir selalu mencatat hasil defisit (kecuali bulan Maret dan Agustus). Hingga September 2013, defisit telah mencapai US\$6,2 miliar, atau hampir empat kali lipat dari total defisit pada 2012.

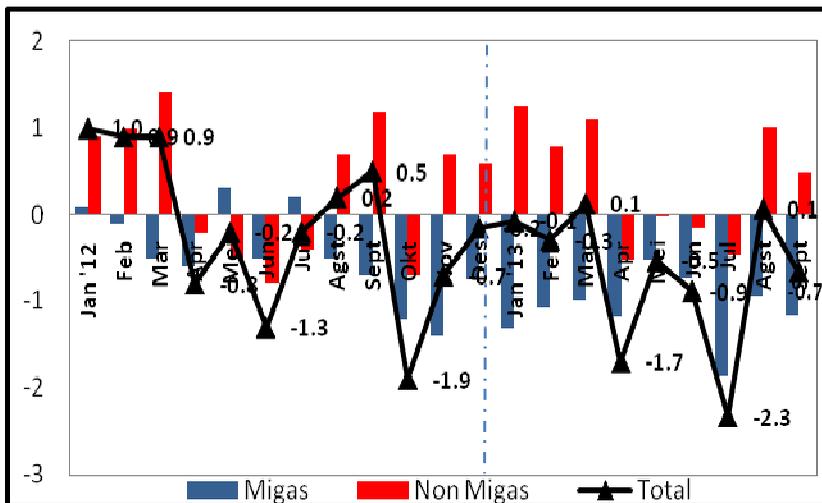
Tabel 5.1 Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia

Deskripsi	2000	2005	2010	2011	2012	Januari - September		
						2012	2013	% Growth
Ekspor	62,12	85,66	157,78	203,49	190,03	142.94	134.00	-6.25
Migas	14,36	19,23	28,04	41,48	36,97	28.60	23.80	-16.78
Nonmigas	47,76	66,43	129,74	162,02	153,05	114.34	110.20	-3.62
Impor	33,51	57,70	135,66	177,43	191,69	141.90	140.20	-1.20
Migas	6,02	17,46	27,41	40,70	42,56	30.90	33.50	8.41
Nonmigas	27,49	40,24	108,25	136,73	149,13	111.00	106.70	-3.87
Neraca	28,61	27,96	22,11	26,06	-1,65	1.04	-6.20	-696.15
Migas	8,35	1,77	0,63	0,77	-5,58	-2.30	-9.70	321.74
Nonmigas	20,26	26,19	21,48	25,28	3,92	3.34	3.50	4.79

Sumber: BPS, 2013

Melihat perkembangan bulanan neraca perdagangan Indonesia, pada 2013 ini hampir tidak pernah absen dari capaian defisit. Defisit terbesar terjadi pada bulan Juli yang mencapai –US\$2,3 miliar. Sementara surplus hanya terjadi pada Maret dan Agustus dengan nilai yang sangat kecil yakni hanya mencapai masing-masing sebesar US\$0,1 miliar. Dorongan impor migas yang relatif besar membuat surplus yang terjadi pada sektor nonmigas menjadi tidak berarti. Namun kinerja perdagangan sektor nonmigas nampaknya mulai meniru kinerja perdagangan sektor migas. Sejak 2012, neraca non migas langsung menipis menjadi hanya surplus US\$3,9 miliar. Bahkan tanda-tanda untuk semakin turun telah terlihat pada sepanjang 2013 ini.

Gambar 5.4. Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas (US\$ miliar)



Sumber: BPS, 2013

Hilangnya tradisi surplus neraca perdagangan Indonesia ini terjadi bukan tanpa sebab. Tanda-tanda ke arah defisit sudah mulai terlihat utamanya setelah Indonesia turut serta dalam perjanjian-perjanjian perdagangan internasional dan gencar melakukan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional maupun *Free Trade Area* (FTA) baik secara regional, bilateral dan multilateral. Pada saat kran perdagangan semakin terbuka bebas akibat kesepakatan berbagai FTA tersebut yang terjadi adalah tren ekspor Indonesia tumbuh relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor. Satu persatu neraca perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang utama mengalami defisit.

Sejak tahun 2012, defisit neraca perdagangan nyaris terjadi dengan sejumlah negara mitra dagang utama. Surplus yang diperoleh salah satunya hanya dengan Inggris, AS dan India saja. Hingga triwulan III - 2013 ini, keadaan pun tidak menunjukkan ke arah perubahan yang lebih baik. Meskipun terjadi surplus dengan Singapura dan Malaysia, namun hal tersebut lebih dikarenakan penurunan impor dari kedua negara itu (Tabel 5.2).

Indonesia sebagai negara yang kaya sumberdaya alam yang memiliki keunggulan mutlak pada berbagai komoditas strategis, diantaranya kelapa sawit, karet, rotan, kakao, rumput laut, dan lain-lain sangat terkejut pada saat mengetahui bahwa neraca perdagangannya mengalami defisit dengan negara mitra dagang yang relatif tidak memiliki keunggulan komparatif. Ironisnya lagi, salah satu yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan adalah besarnya impor komoditas pangan. Komoditas yang harusnya berpeluang menggenjot ekspor justru menggerus devisa.

Tabel 5.2. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Mitra Dagang Utama (Miliar US\$)

Mitra Dagang		2012			Jan-Sept 2013		
		Ekspor	Impor	Ket.	Ekspor	Impor	Ket.
1	Singapura	10.55	10.64	Defisit	7.9	7.6	Surplus
2	Malaysia	8.47	11.29	Defisit	5.5	4.4	Surplus
3	Thailand	5.49	6.32	Defisit	3.9	8.3	Defisit
4	Jerman	3.07	4.18	Defisit	2.1	3.3	Defisit
5	Perancis	1.13	1.89	Defisit	0.8	1.1	Defisit
6	Inggris	1.69	1.36	Surplus	1.2	0.8	Surplus
7	China	20.86	28.96	Defisit	14.8	22.2	Defisit
8	Jepang	17.23	22.72	Defisit	11.9	14.3	Defisit
9	Amerika Serikat	14.59	11.46	Surplus	11.2	6.7	Surplus
10	India	12.44	4.02	Surplus	9.4	2.9	Surplus
11	Australia	3.36	5.08	Defisit	2.1	3.5	Defisit
12	Korea Selatan	6.68	8.3	Defisit	4.5	6.6	Defisit
13	Taiwan	4.09	4.2	Defisit	2.6	3.1	Defisit
Total 13 Negara Tujuan		109.7	120.5	Defisit	77.9	84.8	Defisit
Negara Lainnya		43.36	28.67		31.7	21.3	
Total Ekspor & Impor Nonmigas		153.1	149.1	Surplus	114.34	106.7	Surplus

Sumber: BPS, 2013

Kerjasama perdagangan bebas (FTA) yang menyepakati tidak adanya berbagai bentuk hambatan tarif ternyata membawa konsekuensi yang berbahaya bagi industri nasional. Gempuran produk impor yang mengalir bebas tanpa ada sedikitpun hambatan telah melumpuhkan industri terlebih lagi bagi mereka

yang belum berdaya saing. Secara umum dampak berbagai FTA bagi Indonesia antara lain:

- Menipisnya surplus neraca perdagangan Indonesia sudah mulai terlihat sejak Indonesia aktif dan gencar dalam melakukan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional maupun *Free Trade Area* (FTA) baik secara regional, bilateral dan multilateral.
- Pada saat kran perdagangan semakin terbuka bebas akibat kesepakatan berbagai FTA tersebut, yang terjadi adalah tren impor Indonesia tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.
- Satu persatu neraca perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang utama mengalami defisit.
- Hingga 2012 tercatat sedikitnya Indonesia telah terlibat dalam 6 skema *Free Trade Area* (FTA) yakni AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea FTA (AK-FTA), ASEAN-India FTA (AI-FTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA) dan Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). Dari enam skema tersebut, hanya dengan India saja surplus neraca perdagangan diperoleh.

Penurunan kinerja perdagangan Indonesia yang tercermin dari semakin melebarnya defisit perdagangan merupakan akibat dari lemahnya pengamanan industri dalam negeri terhadap serbuan impor produk asing yang sejenis. Tidak adanya hambatan dalam bentuk non tarif (*non-tariff barrier*) menyebabkan produk asing dengan leluasa mudah menguasai pasar domestik. Hambatan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.

Kebijakan *Non Tariff Barrier* terdiri atas beberapa bagian yaitu:

- a. Pembatasan spesifik, terdiri dari larangan impor secara mutlak; pembatasan impor atau *quota system*; peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu; peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara; peraturan kebudayaan, perizinan impor/*import licenses*; embargo; dan hambatan pemasaran seperti VER (*Voluntary Export Restraint*), OMA (*Orderly Marketing Agreement*).
- b. Peraturan Bea Cukai (*Custom Administration Rules*), terdiri dari tatalaksana impor tertentu; penetapan harga pabean; penetapan *forres rate* (kurs valas) dan pengawasan devisa; *consultan formalities*; *packaging/labelling regulation*; *documentation hended*; *quality and testing standard*; pungutan administrasi (*fees*); dan klasifikasi tarif.
- c. Partisipasi pemerintah, terdiri dari kebijakan pengadaan pemerintah; subsidi dan insentif ekspor; *countervailing duties*; *domestic assistance programs*; dan *trade-diverting*.
- d. *Import charges*, terdiri dari *import deposits* ; *supplementary duties* ; dan *variable levies*.

Perdagangan dunia menurut Koo dan Kennedy (2005), jauh dari kebebasan. Beberapa negara menggunakan bermacam hambatan non tarif untuk melindungi industri yang tidak efisien. Hal ini terutama berlaku pada sektor pertanian. Jepang, AS, Uni Eropa hingga Australia menggunakan hambatan non tarif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk asing yang sejenis. Oleh sebab itu, terasa aneh apabila Indonesia tidak menggunakan hambatan non tarif untuk melindungi industrinya.

5.3. Defisit Keseimbangan Primer APBN

Sejak periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu didesain defisit. Pemerintah boleh saja mengklaim bahwa defisit anggaran tersebut masih berada di batas yang aman yakni di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Masalahnya, kebijakan defisit APBN yang ditutup dengan penambahan utang baru bukannya menciptakan kondisi fiskal yang lebih sehat dan kuat, pemerintah justru mewariskan problem lain yang lebih fundamental yakni defisit keseimbangan primer.

Gambar 5.5
Keseimbangan Primer APBN 2008-2014 (Rp Triliun)



Sumber: Nota Keuangan APBN berbagai tahun, Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Defisit keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 5.5, APBN mulai mengalami defisit primer pada 2012 sebesar Rp 52,8 triliun, kemudian meningkat dua kali lipat pada tahun

berikutnya yakni sebesar Rp 111,7 triliun. Bahkan di penghujung tahun pemerintahan SBY (2014), APBN pun diperkirakan masih akan menghadapi defisit primer sebesar Rp 34,7 triliun.

Problem defisit primer memberi isyarat bahwa APBN sebetulnya sudah berada di ambang bahaya. Defisit primer menyebabkan goyahnya keseimbangan fiskal sehingga membuat ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas. Buktinya, ruang fiskal pada RAPBN 2014 hanya tersedia sebesar Rp 21,9 triliun atau 1,2 persen terhadap total belanja negara.

Padahal peran APBN begitu vital dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peran tersebut akan optimal jika alokasi anggaran untuk stimulus perekonomian, yang tercermin dari ruang fiskal (*fiscal space*) pemerintah cukup memadai. Sayangnya, ruang fiskal APBN selama periode pemerintahan SBY tidak banyak mengalami peningkatan yang berarti, apalagi dengan problem defisit keseimbangan primer mengakibatkan daya ungkit APBN kian lemah.

Secara empiris, defisit primer dipicu dari dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pendapatan dan dari sisi pengeluaran negara. Dari sisi pendapatan, problem utama yang masih mendera APBN antara lain; *pertama*, belum optimalnya penerimaan negara, baik dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Buktinya, rata-rata pertumbuhan penerimaan negara dalam periode 2008-2014 hanya sebesar 9,83 persen per tahun, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan belanja negara sebesar 11,11 persen per tahun.

Kedua, pajak sebagai sumber utama pendapatan negara - 73,6 persen terhadap total pendapatan pada 2012 – juga masih belum optimal. Argumentasinya dapat ditunjukkan dengan

rendahnya *tax ratio* yang hanya berkisar 10-12 persen. Bandingkan dengan negara lain misalnya Filipina 14,4 persen, Singapura 14,2 persen, Malaysia 15,5 persen, Thailand 17 persen, Jepang 28,3 persen (Kemenkeu, 2012). Ditambah lagi, pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2014 hanya ditargetkan 14,09 persen, lebih kecil dari target pada 2013 sebesar 17,12 persen.

Ketiga, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Baik yang berasal dari penerimaan sumber daya alam maupun dari pendapatan laba BUMN, masing-masing hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,51 persen per tahun dan 4,65 persen per tahun sepanjang 2008-2014.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran negara, struktur belanja pemerintah pusat masih belum ideal sebab alokasi belanja rutin masih mendominasi belanja negara. Dalam RAPBN 2014, belanja rutin mengambil porsi sebesar 76,1 persen dari total belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja pegawai 22,5 persen; belanja barang 16,6 persen; belanja pembayaran bunga utang 9,7 persen; dan subsidi 27,3 persen. Sedangkan belanja yang betul-betul menciptakan pertumbuhan dan mendorong sektor riil hanya mendapat jatah 21,2 persen. Terdiri dari belanja modal 16,7 persen dan belanja sosial 4,5 persen.

Di luar itu, problem fundamental yang turut memperburuk kualitas APBN dan pembangunan ialah masih maraknya kasus-kasus korupsi. Baik dari jalur penggelapan pajak dan cukai, maupun dari celah korupsi anggaran (belanja) yang melibatkan pihak eksekutif, legislatif serta yudikatif.

5.4. Keluar dari Belitan Defisit

Defisit ganda yang sedang menyelimuti perekonomian Indonesia harus segera ditangani dengan perencanaan dan tindakan yang riil dari pemerintah. Defisit transaksi berjalan hingga menyebabkan defisit pada neraca pembayaran menunjukkan bahwa kondisi sektor eksternal ekonomi Indonesia dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasinya, perlu reformasi struktural pada komponen neraca modal salah satunya dengan mendorong PMA yang berorientasi ekspor. Selain itu, perlu mendorong penguatan dan pendalaman pasar keuangan, mendorong industri substitusi impor yang memiliki keunggulan komparatif, mendorong reinvestasi deviden PMA di dalam negeri dan mendorong repatriasi ekspor.

Dalam kaitannya mengatasi defisit primer dalam APBN, berikut ini beberapa langkah yang dapat dikerjakan pemerintah untuk membebaskan fiskal dari belitan defisit primer. Langkah pertama, optimalisasi pendapatan negara. Pemerintah harus berani menaikkan target pertumbuhan pendapatan negara yang lebih besar dari pertumbuhan belanja negara. Untuk mendorong penerimaan negara ialah dengan meningkatkan target *tax ratio*, misalnya menjadi 15 persen.

Strategi untuk memperbesar penerimaan pajak antara lain dengan memberlakukan pajak progresif, khususnya terhadap kelompok miliarder (superkaya). Misalnya, seseorang yang pendapatannya lebih dari Rp 5 miliar bisa dikenakan tarif pajak (*tax rate*) sebesar 45 persen. Saat ini pajak yang dikenakan pada masyarakat yang berpenghasilan Rp 15 juta dengan Rp 5 miliar adalah sama yaitu 35 persen.

Kemudian, pemerintah juga harusnya bisa menggenjot penerimaan cukai terutama dengan menaikkan cukai rokok.

Apalagi jika melihat kenyataan bahwa tarif cukai rokok di Indonesia termasuk rendah dibandingkan negara lain. Sayangnya, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2014 mendatang. Di samping itu, pemerintah juga bisa menerapkan intensifikasi dari cukai dengan melanjutkan dan mempercepat proses penyederhanaan sistem cukai guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap konsumsi tembakau.

Lebih lanjut, demi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, pemerintah harus menjaga komitmen untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi industri mineral pada 2014 mendatang. Pemerintah harus tetap melarang ekspor bahan mentah mineral dan mendesak perusahaan-perusahaan penambang mineral untuk membangun pabrik pemurnian mineral (*smelter*) guna meningkatkan nilai tambah produk mineral nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam.

Langkah kedua, efisiensi belanja negara. Pemerintah perlu merestrukturisasi postur anggaran agar lebih produktif sebagai stimulus perekonomian. Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen pada 2014 mendatang. Keputusan tersebut tampak kontradiktif di tengah minimnya alokasi belanja modal, yang hanya mendapat porsi 16,7 persen dari total belanja pemerintah pusat, jauh lebih rendah dari porsi belanja pegawai yang mencapai 22,5 persen. Seharusnya pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan porsi belanja modal. Di samping itu, pemerintah juga dapat memangkas atau merealokasi berbagai pengeluaran birokrasi yang tidak prioritas, seperti belanja barang ataupun belanja perjalanan dinas.

Sementara itu, kebijakan pemberian uang pensiun kepada anggota DPR juga sebaiknya dihapus. Anggota DPR bukanlah pegawai negeri ataupun pejabat karir dimana masa kerjanya hanya terbatas pada periode tertentu. Tentu dengan adanya dana pensiun tersebut akan sangat membebani anggaran belanja negara yang sumber utamanya berasal dari keringat rakyat. Apalagi jika melihat maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum DPR, maka sangat tidak pantas jika para koruptor tersebut mendapatkan uang pensiun.

Berikutnya, kebijakan pengurangan subsidi BBM yang sudah dilaksanakan pada tahun ini harus terus dibarengi dengan realokasi anggaran ke sektor-sektor yang strategis, seperti infrastruktur jalan, rel kereta api, bandara, dan transportasi umum. Dengan demikian, pemerintah dapat mengendalikan konsumsi BBM dari sisi permintaan.

Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong penegakkan hukum (pemberantasan korupsi), peningkatan kualitas birokrasi, peningkatan *good governance*, serta minimasi biaya *overhead administratif*.

Akhirnya, dari berbagai strategi yang telah diungkap di muka diharapkan dapat menciptakan postur anggaran yang lebih sehat, yakni mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan sekaligus lebih efisien dan cermat dalam belanja. Hanya dengan postur fiskal yang sehat dan efisien, defisit primer bisa dibendung. Sebab, defisit primer merupakan isyarat bahwa pemerintah serius dalam mengelola fiskal secara disiplin.



Bab 6

Menakar Platform Kedaulatan Ekonomi Capres

Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Terbukti Indonesia masuk dalam hitungan anggota negara G-20. Artinya kekuatan ekonomi Indonesia diperhitungkan menjadi bagian dari raksasa-raksasa ekonomi dunia. Bahkan Indonesia digadang-gadang akan masuk dalam 10 raksasa kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 nanti.

Potensi kekuatan ekonomi Indonesia tersebut tentu akan menjadi “hambar” ketika tidak disertai adanya kedaulatan ekonomi, utamanya dalam dua sektor yang paling strategis yaitu kedaulatan pangan dan energi. Indonesia sebagai negara agraris terbesar selayaknya menjadi pemasok utama kebutuhan pangan dunia. Faktanya Indonesia justru mengalami ketergantungan impor pangan. Demikian juga dalam hal kedaulatan energi, walaupun Indonesia memiliki berbagai jenis sumber energi potensial, namun Indonesia justru menghadapi ketergantungan pasokan impor BBM.

Disisi lain, Indonesia diakui mempunyai angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, di tengah

perekonomian dunia menghadapi krisis. Sayangnya capaian angka pertumbuhan tersebut justru diikuti oleh tingkat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar dan angka kemiskinan yang tak kunjung berkurang secara signifikan. Disamping ketimpangan antar golongan penerima pendapatan, antara kaya-miskin, ketimpangan antar daerah juga menjadi persoalan yang sangat serius. Salah satu sumber ketimpangan tersebut adalah keterbatasan pembangunan infrastruktur dalam menopang pertumbuhan sektor riil. Ditambah lagi dukungan sektor keuangan juga sangat terbatas dalam pembiayaan sektor riil.

Lima persoalan krusial tersebut menurut INDEF yang harus segera kongkrit mendapatkan perhatian dan solusi oleh para calon presiden kedepan. INDEF ingin menakar apa platform dan program nyata dari para capres dalam mengatasi 5 permasalahan krusial berikut.

6.1 Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan selalu menjadi isu strategis dalam setiap konsep pembangunan pertanian. Ini tidak mengherankan karena pangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sektor pertanian. Ketersediaan (*food availability*) dan aksesibilitas pangan (*food accesibility*) berkelanjutan akan memengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Bahkan bagi sebuah negara yang tidak berbasis pada sektor pertanian sekalipun, kedaulatan pangan tetap diperlukan untuk memastikan tujuan ketahanan dan kemandirian pangan lebih mudah diupayakan.

Sebagai negara yang berada di daerah tropis, alam Indonesia menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan yang sangat diperlukan dalam mendukung kedaulatan pangan.

Hampir di setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan khas dengan bahan baku lokal yang beragam. Fenomena diversifikasi alamiah ini sesungguhnya merupakan modal dalam pembangunan kedaulatan pangan sehingga opsi membangun kedaulatan pangan adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia ke depan. Pemerintah cukup menjaga ketersediaan dan mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan yang akrab dengan masyarakat lokal agar dapat tercapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Sayangnya, strategi pembangunan kedaulatan pangan ini seperti hilang arah. Amanah UU Pangan No 18 Tahun 2012 telah jelas menegaskan bahwa negara berhak secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Namun sepertinya pemerintah belum paham betul arti yang terkandung dari Undang-Undang tersebut. Hal ini tercermin dari minimnya usaha pemerintah dalam membatasi impor pangan yang semakin merajalela, serta minimnya dukungan pemerintah dalam memberi kesempatan bagi petani lokal untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi pangan lokal. Target swasembada yang ditetapkan pada beberapa produk pangan seakan hanya sebuah impian belaka dan terhenti pada tahap perencanaan. Alhasil, ketergantungan impor pangan pun tidak dapat dihindari seperti yang terlihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Ketergantungan Impor Pangan Indonesia

Komoditas	Nilai Impor (ribu US\$)			Volume Impor (ton)			Ketergantungan Impor (%)
	2010	2011	Trend (%)	2010	2011	Tren (%)	
Gandum (segar+olah)	1.827.394	2.656.102	45,35	5.725.012	6.476.577	13,13	100
Kedelai (segar+olah)	871.174	1.290.079	48,09	1.772.663	2.125.512	19,91	80
Jagung (segar+olah)	253.916	1.084.527	327,07	1.786.811	3.310.984	85,30	12
Beras (segar)	360.785	1.509.149	318,29	687.582	2.744.002	299,08	5
Gula	1.227.049	1.869.327	52,34	2.021.576	2.717.019	34,40	54
Bawang Putih	245.960	272.819	10,92	361.289	419.090	15,99	30
Jeruk, Apel, Pear & Kwini	424.891	485.480	14,26	501.577	564.141	12,47	-
Sapi Bakalan & daging sapi	734.586	555.267	-24,41	299.090	248.430	-16,94	20
Susu & produk susu	639.081	796.407	24,62	186.234	207.386	11,36	72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketergantungan impor pangan, tidak terlepas dari kebijakan tata niaga pangan di Indonesia yang diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah tidak berdaya dalam hal pengendalian harga produk pangan di Indonesia. Akibatnya, harga beberapa produk pangan dapat melambung tinggi. Contoh kasus adalah kuota impor kedelai, yang menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu. Hampir 90 persen pemegang lisensi kuota impor kedelai di negeri ini dipegang oleh para mafia kartel. Bulog sendiri sebagai BUMN, yang dimanakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, hanya memiliki 5 persen lisensi impor kedelai.

Fakta di atas menggambarkan bahwa dalam era perekonomian yang semakin mengglobal saat ini, kedaulatan pangan di Indonesia memendam ancaman yang cukup serius.

Setidaknya terdapat empat ancaman yang patut diwaspai. *Pertama*, masih rapuhnya infrastruktur dasar pertanian. Berbagai statistik pertanian menunjukkan bahwa saat ini infrastruktur dasar pertanian, mulai irigasi, jalan sebagai akses distribusi bahan baku produksi dan penjualan, dan alat-alat produksi masih kurang mendukung. Selain itu, banyak juga dijumpai infrastruktur dasar tersebut yang sudah mengalami penurunan kualitas, sehingga tidak kunjung memperkuat peningkatan produksi pangan.

Kedua, masih lemahnya kelembagaan (aturan main) distribusi bahan baku produksi dan penjualan produksi pangan. Distribusi bibit dan terutama pupuk masih menjadi persoalan pelik bagi sebagian besar petani di Indonesia. Pasalnya, ketika musim tanam pangan tiba, distribusi bahan baku pangan tersebut justru kian sulit dilakukan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa yang menjadi akar persoalan dalam tata niaga tersebut adalah aktor yang menjadi penyalur. Berpijak pada realitas ini, sebetulnya relatif mudah untuk mengatasinya, yakni perbaikan atas regulasi tata niaga bahan baku tersebut sekaligus penegakannya.

Ketiga, masih terkonsentrasinya lahan-lahan pertanian pangan di wilayah Pulau Jawa. Ancaman ini kian parah karena pada satu sisi lahan-lahan pertanian di Pulau Jawa mengalami pengalihan fungsi. Sedangkan di sisi lain sampai saat ini belum terdapat insentif besar yang diberikan oleh pemerintah daerah di luar Pulau Jawa, terutama Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bagi penduduk setempat maupun investor baru yang hendak melakukan aktivitas pertanian pangan di wilayah-wilayah tersebut. Ancaman ini sebetulnya dapat dijadikan peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan, ketika wilayah di luar Pulau Jawa

dijadikan basis pertanian pangan baru. Berpijak pada peluang tersebut, maka regulasi yang mendukung hal tersebut, misalnya pemosisian sektor pertanian pangan sebagai prioritas utama investasi di Indonesia harus diimplementasikan secara maksimal.

Keempat, peran asing dalam industri pangan di Indonesia. Dalam konteks kemandirian pangan, peran asing ini bisa memunculkan dua ekspektasi, yakni turut mendukung kedaulatan pangan tersebut atau justru berperan besar dalam membuat ketergantungan kepada dunia. Dalam pengertian pertama berarti bahwa investor asing dengan karakter padat modalnya akan berperan dalam mengubah peta produksi pangan nasional, di mana mereka akan menjadikan wilayah non Pulau Jawa sebagai basis pertanian baru. Dengan strategi yang demikian ini diharapkan dapat menghasilkan produk pangan yang besar, sehingga dapat meningkatkan pasokan pangan nasional dan akhirnya terjadi surplus pangan nasional. Prognosis yang demikian ini lebih mudah dilakukan daripada memberikan kesempatan kepada pihak domestik yang mengalami keterbatasan modal untuk melakukannya.

Sungguh pun demikian, upaya tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak akan memunculkan masalah-masalah baru. Keterbatasan infrastruktur pertanian di luar Pulau Jawa tetap menjadi hambatan krusial untuk mewujudkan investasi baru sektor pertanian. Selain itu, penetrasi asing yang biasanya merupakan kelompok usaha (dalam bentuk korporasi) ketika menjalankan investasi pertanian di luar Pulau Jawa pasti akan menggeser peran dari petani lokal. Petani pangan setempat akan menjadi pihak yang sangat inferior, di mana hanya akan menjadi penyokong dari dilakukannya aktivitas pertanian. Bila hal ini terjadi, maka kantong-kantong kemiskinan yang mayoritas berkaitan dengan sektor pertanian kian sulit direduksi.

Sedangkan dalam konteks yang kedua, korporasi asing dengan pertimbangan rasional yang jelas, maka tatkala berinisiatif melakukan bisnis pertanian di Indonesia yang tujuan utama adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar atas investasinya. Berpijak pada kemungkinan ini, ketika tidak ada regulasi tata niaga yang kuat dan efektif akan memberikan insentif bagi korporasi asing tersebut untuk memasarkan produk pertaniannya ke luar Indonesia. Kemungkinan yang demikian ini sangat besar terjadi, karena berbagai pengalaman yang ada di Indonesia mengilustrasikan hal itu. Misalnya untuk komoditas CPO, ketika terjadi kenaikan harga di pasar internasional, Indonesia yang bersama Malaysia menjadi produsen utama CPO justru banyak korporasi Indonesia yang menjual CPO tersebut ke luar negeri. Alhasil, karena keterbatasan pasokan domestik menjadikan harga minyak goreng di dalam negeri naik drastis. Secara keseluruhan, jika hal ini terjadi maka upaya mencapai kedaulatan pangan dengan menempatkan pihak asing sebagai aktor baru produsen pangan akan sia-sia.

Lebih dari itu, dalam konteks distribusi kesejahteraan, penetrasi asing juga kian berperan dalam menciptakan ketimpangan. Pasalnya, dengan dikuasainya sektor pertanian oleh investor asing menyebabkan nisbah ekonomi terbesar akan diterima oleh pihak asing tersebut. Skemanya, misalnya, dengan ditahannya pasokan menyebabkan harga barang-barang konsumsi meningkat dan akhirnya sebagian masyarakat tidak bisa mengakses produk tersebut. Kondisi ini kian parah, karena korporasi yang menguasai struktur kepemilikan perusahaan *consumer goods* tersebut memiliki basis bisnis di hampir semua semua negara, sehingga tingkat konsumsi global dimainkan oleh segelintir korporasi tersebut. Dengan ilustrasi tersebut, secara keseluruhan ketika strategi mencapai kemandirian pangan

ditumpukan kepada korporasi multinasional asing, maka upaya tersebut sekaligus mewujudkan fundamental ekonomi nasional yang kokoh tidak akan pernah berhasil.

6.2. Kedaulatan Energi

Salah satu persoalan yang acap kali menjadi batu sandungan dalam mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia adalah aksesibilitas terhadap energi. Saat ini energi merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian suatu bangsa. Hampir semua negara yang perekonomiannya maju memiliki ketersediaan energi yang mencukupi untuk menopang aktivitas ekonominya. Energi menjadi syarat mutlak dan bagian dari pilar utama strategi pembangunan negara-negara industri maju.

Berbeda dengan Indonesia, dimana perekonomiannya masih sangat labil terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan satu jenis sumber energi. Hal ini terlihat jelas manakala terjadi kenaikan harga minyak dunia selalu memicu “kehebohan” stabilitas ekonomi bahkan politik. Tidak jarang diikuti oleh langkanya ketersediaan energi dan berujung pada mengereknya angka inflasi. Kenaikan harga minyak dunia juga menimbulkan efek domino bagi sektor energi lain di Indonesia. Hal ini terlihat jelas pada penyediaan dan harga energi listrik akibat ketergantungan pada BBM.

Fenomena krisis BBM di daerah-daerah yang sering terjadi saat harga minyak dunia melambung menjadi bagian tidak terpisahkan dari fakta ketergantungan energi minyak dalam perekonomian nasional di mana sebagian dipenuhi dari impor. Ironisnya beberapa daerah yang mengalami kelangkaan terkadang justru merupakan daerah-daerah penghasil minyak di Indonesia.

Apabila dirunut lebih jauh persoalan minimnya ketersediaan energi di daerah tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan energi nasional. Sentralisasi pemanfaatan energi masih terus terjadi hingga saat ini. Sebagian besar energi siap konsumsi digunakan untuk ‘menghidupi’ Pulau Jawa, sisanya baru dimanfaatkan untuk kebutuhan energi di daerah. Tidak mengherankan jika kemudian menciptakan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan empat pulau lain yang secara areal sebenarnya jauh lebih luas dibanding Pulau Jawa. Salah satu yang menjadi alasan utama adalah kendala infrastruktur energi di daerah. Masih banyak daerah-daerah potensial secara ekonomi, namun karena minimnya pasokan energi -terutama energi listrik- membuat daerah tersebut tidak dapat berkembang.

Untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan diperlukan terobosan kebijakan pengelolaan energi nasional yang lebih *fair*, agar daerah-daerah di luar Jawa yang notabene merupakan daerah penghasil sumber energi tidak terabaikan dalam kebijakan pengelolaan energi. Urgensinya adalah terjadinya pemerataan kesejahteraan baik di Jawa maupun luar Jawa. Keberadaan sumber-sumber energi di daerah-daerah di luar Jawa sedapat mungkin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi lagi masyarakat di daerah penghasil minyak justru antri BBM, ataupun daerah pembangkit listrik justru sering mengalami pemadaman bergilir.

Tentu saja konsep pemerataan energi guna mendukung pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak harus diartikan sebagai pengalihan energi yang selama ini sudah terpakai di Jawa secara tiba-tiba dialokasikan ke luar Jawa. Paradigma pemerataan energi seyogyanya diarahkan pada percepatan pembangunan sumber-sumber energi di luar Jawa

bagi terjaminnya pasokan energi nasional, terutama di daerah penghasil. Dengan konsep pemerataan seperti ini maka daerah penghasil energi akan mendapat prioritas dalam alokasi pemanfaatan energi siap konsumsi. Sehingga dalam jangka panjang akan muncul kutub-kutub pertumbuhan baru di luar Jawa yang membuat pembangunan ekonomi semakin merata.

Ketercukupan energi sesungguhnya hanya merupakan sebagian dari prasyarat kedaulatan energi. Dalam konteks kedaulatan energi tentu saja ada kebebasan dalam pengelolaan serta nisbah ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, di Indonesia saat ini sumber energi selain listrik secara keseluruhan telah menjadi domain bisnis dari perusahaan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Realitas yang demikian, walaupun pada tahap awalnya merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada, namun ketika kepentingan korporasi untuk mengakumulasi laba kian besar, maka ekspektasi itu layak diurungkan kembali. Hal ini dikarenakan kebijakan memberikan ruang kepada asing untuk mengeksplorasi energi, terutama untuk bahan bakar, didasarkan atas fakta bahwa terjadi keterbatasan modal investasi di dalam negeri, baik oleh Pertamina maupun swasta nasional.

Dengan begitu, masuknya asing yang disertai modal yang relatif besar dianggap dapat menggali potensi sumber energi terpendam yang ada di Indonesia. Sungguh pun demikian, ketika melihat relasi ekonomi politik atas liberalisasi sektor migas di Indonesia dan kemudian disusul dengan masuknya asing ke dalam industri migas nasional, tampak bahwa ekspektasi yang ada bukan hanya berpijak pada tujuan menggali potensi energi yang terpendam. Dalam perkembangan eksplorasi itu, selama tahap awal korporasi-korporasi energi asing memang turut berperan dalam meningkatkan *lifting* minyak dalam negeri.

Namun, dalam beberapa tahun kemudian justru terjadi anomali, di mana ketika kian banyak korporasi asing yang melakukan eksplorasi minyak di Indonesia, kuantitas *lifting* domestik malah mengalami penurunan yang konsisten.

Dengan fakta yang demikian ini memperlihatkan bahwa upaya menggandeng pihak asing untuk meningkatkan pasokan minyak dalam negeri guna mencapai kemandirian ekonomi nasional belum tentu berhasil. Fakta yang demikian mencuatkan dua hal pokok. *Pertama*, tingkat produksi minyak mentah harian oleh perusahaan-perusahaan asing memang tidak sesuai dengan prognosis awal, sehingga realisasi sekaligus pelaporan atas *lifting* tersebut mengalami penurunan yang konsisten. Selain itu, usulan peningkatan produksi minyak dengan membuka selebar-lebarnya untuk investasi asing agar bersedia melakukan investasi di sektor migas, sehingga *lifting* minyak domestik dapat meningkat dan akhirnya dapat mengurangi disparitas konsumsi juga belum tentu tepat. Mengingat jika kebijakan tersebut yang dieksekusi tampaknya upaya menciptakan kemandirian energi nasional kurang bisa tercapai.

Kedua, terjadinya kemungkinan manipulasi *lifting* minyak oleh perusahaan energi. Hal ini dikarenakan, dari sisi hulu, regulasi yang ada memang tidak memberikan anjuran yang tegas mengenai transparansi pelaporan *lifting*. Dengan celah yang demikian ini sangat memungkinkan bagi perusahaan energi tersebut untuk memanipulasi *lifting* minyaknya. Dengan adanya kemungkinan seperti ini, maka ketika diintrodusir berbagai kebijakan yang memberikan insentif bagi investor untuk melakukan eksplorasi ladang-ladang minyak baru belum memberikan jaminan bahwa *lifting* minyak domestik dapat meningkat secara tajam.

6.3. Kendala Infrastruktur

Dalam era persaingan global, Indonesia justru masih berkuat pada berbagai permasalahan mendasar, salah satunya adalah masalah ketersediaan infrastruktur. Minimnya ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas tentunya menjadi kendala serius dan menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Kondisi infrastruktur di Indonesia secara keseluruhan dinilai mencemaskan dan perkembangannya pun terbilang sangat lambat. Hal ini terlihat dari semakin buruknya kondisi jalan-jalan raya, peningkatan kemacetan lalu-lintas di daerah-daerah perkotaan, terbatasnya kapasitas pelabuhan dan bandara dan minimnya modernisasi rel kereta api.

Sejatinya, ketersediaan infrastruktur berperan penting dalam menentukan daya saing perekonomian bangsa. Peran vital infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh kesuksesan berbagai program ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur, di antaranya program New Deal oleh Presiden Roosevelt, pada saat resesi di Amerika Serikat tahun 1933. Peningkatan pembangunan infrastruktur secara signifikan di Amerika Serikat saat itu telah memberikan dampak positif meningkatkan ekonomi secara signifikan dan lebih dari 6 juta penduduk dapat bekerja kembali. Dalam banyak survei yang dilakukan, investor swasta berpendapat bahwa infrastruktur yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan investasi mereka.

Lebih lanjut, dalam laporan Bank Dunia (*Curbing Fraud, Corruption and Collusion in the Roads Sector*, Mei 2011) ditunjukkan beberapa studi yang secara jelas memaparkan kaitan di antara ketersediaan infrastruktur dan daya saing. Di

perdesaan India, misalnya, pembangunan jalan telah meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pertanian (Fan, Hazell, dan Thorat, 1999). Demikian pula, pembangunan jalan di China dan Thailand memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan output, baik dalam kegiatan pertanian maupun non-pertanian (Fan, *et. al.*, 2000, 2002, 2004). Hal yang sama juga terjadi di Meksiko, di mana pembangunan jalan memberikan donasi yang kuat terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja (Deichman, *et. al.*, 2002). Oleh karena itu, semua negara berkembang selama satu dekade terakhir berlomba-lomba memperbaiki infrastruktur untuk mendongkrak pembangunan ekonominya.

Dalam konteks Indonesia, proyek-proyek besar pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain) menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, proyek-proyek infrastruktur dalam skala yang lebih kecil merupakan domain pemerintah daerah sepenuhnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan mutlak melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik dikerjakan dengan anggaran sendiri maupun bekerjasama dengan pihak swasta. Pola ini ditenggarai justru berakibat pada semakin lambatnya pembangunan infrastruktur diberbagai daerah. Alasan minimnya kapasitas pembiayaan pemda membuat sebagian besar infrastruktur di daerah tidak memadai dan dalam kondisi yang memprihatinkan.

Setidaknya terdapat empat infrastruktur vital yang saat ini dalam kondisi mencemaskan. *Pertama*, jalan raya strategis. Jalan di Indonesia sampai 2010 memiliki panjang sekitar 476.337 km dan baru 56,9 persen yang diaspal. Tak jarang dari jalan raya tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Padahal dengan luas daratan yang sangat besar, panjang jalan

yang kini tersedia belum optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi domestik. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki luas wilayah seluas 16,5 persen dari luas Indonesia, namun negara tersebut telah memiliki panjang jalan sepanjang 144.403 km dan 80,9 persen telah teraspal. Hasil studi Bank Dunia mengungkapkan bahwa untuk menempuh 100 kilometer perjalanan darat di Indonesia dibutuhkan waktu selama 2,7 jam. Sedangkan China dan Thailand saja masing-masing hanya membutuhkan waktu rata-rata 1,2 jam dan 1,3 jam untuk menempuh jarak 100 kilometer.

Tabel 6.2. Perbandingan Indikator Infrastruktur Beberapa Negara, Tahun 2011

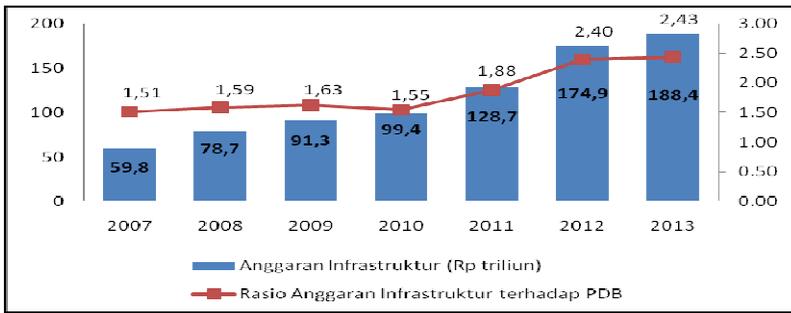
Indikator	Indonesia	Malaysia	China	India
Luas Wilayah (km ²)	1.990.250	329.750	9.598.077	3.287.590
Jalan Raya (km)	476.337	144.403	3.860.823	4.109.592
Diaspal (persen)	56,9	80,9	62,26	51,16
Belum diaspal (persen)	43,1	19,1	37,74	48,84
Rel Kereta Api (km)	5.042	1.849	66.239	63.273
Bandara (unit)	689	118	502	125
Telepon seluler per kapita (per 100 orang)	68,94	130,16	55,8	61,42
Konsumsi listrik per kapita (kwh per kapita)	590	3.613	2.631	570
Rasio belanja Infrastruktur terhadap GDP (%)	2,43	4,4	9	8

Sumber: The World Bank dan Index mundi, 2013

Demikian pula dengan kondisi rel kereta api di Indonesia yang pada 2010 baru sepanjang 5.042 km. Jumlah ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan China dan India yang masing-masing memiliki panjang rel kereta api sebesar 65.491 km dan 63.273 km. Sementara itu, konsumsi listrik per kapita juga masih relatif kecil hanya 590 kwh per kapita. Bandingkan dengan penduduk di China yang mengkonsumsi listrik sebanyak

2.631 kwh per kapita. Rendahnya konsumsi listrik di Indonesia ditenggarai karena terbatasnya pasokan listrik dari PLN yang disebabkan kekurangan bahan bakar bagi pembangkit listrik milik PLN, baik dari batubara maupun gas. Ironisnya lagi, kedua jenis komoditas penting tersebut tersebut justru di ekspor ke negara lain salah satunya China.

Kondisi infrastruktur yang kian memprihatinkan tersebut sangat berhubungan dengan rendahnya kepedulian pemerintah dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Alokasi anggaran belanja negara untuk infrastruktur di dalam APBN sangat minim, tidak pernah mencapai porsi idealnya, yaitu minimal 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terlebih lagi bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang memerlukan percepatan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Setelah mendapat tekanan publik yang masif, belanja infrastruktur tahun 2013 mencapai sebesar Rp188,4 triliun atau mengalami kenaikan terbesar selama pasca reformasi. Namun angka tersebut masih berada sekitar 2,43 persen dari PDB. Bagi Indonesia yang tertinggal dalam bidang infrastruktur, idealnya rasio anggaran untuk infrastruktur sekurang-kurangnya mencapai lebih dari 10 persen. Bandingkan dengan keseriusan pemerintah China dan India dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, dengan rasio belanja infrastruktur terhadap PDB masing-masing sebesar 9 persen dan 8 persen.



Sumber: Nota Keuangan APBN 2013, Kementerian Keuangan

Gambar 6.2. Rasio Anggaran Infrastruktur terhadap PDB

Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur. Misalnya pada 2013, belanja infrastruktur dipatok sebesar Rp188,4 triliun atau mengalami kenaikan terbesar selama pasca reformasi. Rasio anggaran infrastruktur meningkat menjadi sekitar 2,43 persen. Hasilnya, dari hasil survei *World Economic Forum* (WEF) terhadap 148 negara, peringkat daya saing Indonesia dalam hal infrastruktur meningkat dari posisi ke 92 pada 2012 menjadi peringkat ke 82 di 2013. Hal ini disebabkan karena delapan dari sembilan indikator infrastruktur mengalami peningkatan. Kualitas infrastruktur secara keseluruhan naik dari peringkat 82 menjadi 92. Sementara kualitas jalan meningkat dari peringkat 90 ke 78, lalu kualitas infrastruktur pelabuhan meningkat dari 104 ke 89. Begitupun pada kualitas infrastruktur transportasi udara yang meningkat dari posisi ke 89 menjadi 68 dan juga tingkat langganan ponsel per 100 orang meningkat dari peringkat 90 ke 62.

Namun demikian, peningkatan peringkat kualitas infrastruktur Indonesia dalam survei WEF tersebut bukan menyatakan semata-mata kualitas infrastruktur di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Peningkatan peringkat kualitas

infrastruktur tersebut sungguh belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Terlihat dengan pertumbuhan ekonomi yang merosot menjadi sebesar 5,62 persen pada triwulan III-2013, perlambatan pertumbuhan investasi serta memburuknya kinerja sektor riil lainnya. Di lain hal, peringkat kualitas infratraktur Indonesia masih jauh tertinggal dengan Malaysia yang meningkat dari peringkat 29 di 2012 menjadi 25 di 2013. Sementara Thailand di posisi 61 serta China di posisi 74.

Tabel 6.3. Peringkat Kualitas Infrastruktur Indonesia

Aspek	Peringkat		Perubahan Peringkat
	2012/2013	2013/2014	
Kualitas infrastruktur secara keseluruhan	92	82	10
Kualitas jalan	90	78	12
Kualitas rel kereta api	51	44	7
Kualitas infrastruktur pelabuhan	104	89	15
Kualitas infrastruktur transportasi udara	89	68	21
Ketersediaan kursi penerbangan	20	15	5
Kualitas pasokan listrik	93	89	4
Tingkat langganan ponsel per 100 orang	90	62	28
Saluran telepon tetap per 100 orang	78	82	4

Sumber: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, 2013

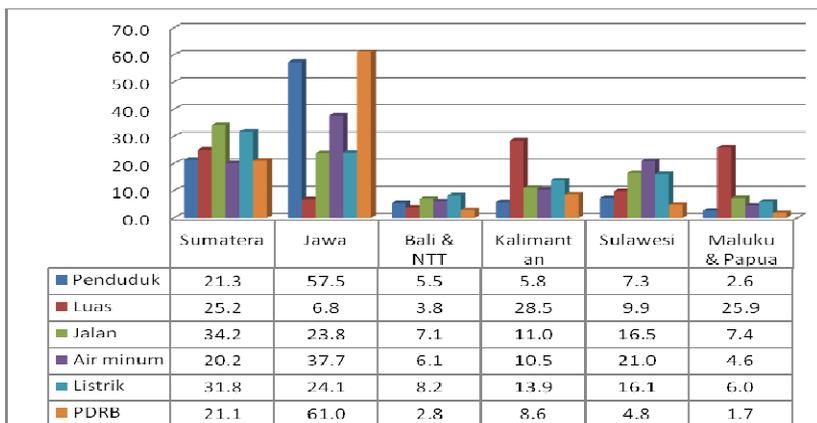
Permasalahan rendahnya alokasi anggaran infrastruktur belum berhenti di sini. Menurut Adam (2012), koefisien infrastruktur di Indonesia sangat kecil dibandingkan beberapa negara lain. Setiap kenaikan 1 persen belanja infrastruktur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di China sebesar 0,33 persen, di India sebesar 0,21 persen, sedangkan di

Indonesia hanya sebesar 0,17 persen. Rendahnya koefisien infrastruktur tersebut mencerminkan rendahnya efektivitas belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian INDEF juga menunjukkan hal yang sama, peningkatan belanja modal pemerintah, hanya berdampak pada peningkatan investasi pemerintah sebesar 30 persen. Artinya efektivitas belanja modal yang berujung terbangunnya infrastruktur hanya sebesar 30 persen.

Di samping masalah minimnya pendanaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur juga terkendala masalah lahan atau perizinan di daerah. Pembebasan lahan dan perijinan di daerah terkait seringkali menggagalkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan. Hal inilah yang menyebabkan anggaran untuk infrastruktur tidak terserap secara optimal. Sementara itu, proyek percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang notabene menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur di semua provinsi justru terganjal oleh birokrasi sendiri. Tarik ulur kepentingan antarkementerian maupun pusat-daerah masih sangat menonjol. Misalnya pada kasus pemberian izin lokasi industri di areal kehutanan oleh pemerintah daerah, ternyata areal kehutanan tersebut belum dikonversi terlebih dahulu untuk dijadikan areal industri. Contoh persoalan lain adalah masih belum jelasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian provinsi. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya justru akan menjadi penghambat proyek MP3EI yang telah pemerintah dengung-dengungkan selama ini.

Kegagalan pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur tersebut akhirnya menjadi cermin ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah ketimpangan infrastruktur antar wilayah. Hal ini merupakan sumber ketimpangan ekonomi antarwilayah dan ketimpangan

antarsektor ekonomi. Sampai 2012 porsi pembangunan masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. PDRB Jawa menyumbang sekitar 57,62 persen dari total PDB dan Pulau Sumatera mengambil porsi sebesar 23,7 persen. Kedua pulau tersebut menguasai sekitar 81,39 persen dari PDB Indonesia. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara hanya mendapat bagian sekitar 18 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 6.3. Perbandingan Luas Wilayah, Penduduk, dan Infrastruktur, 2012 (persen)

Disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah tersebut semakin tak terbantahkan disebabkan oleh persoalan infrastruktur. Lebih dari 55 persen infrastruktur terdapat di pulau Sumatera dan Jawa yang luasnya hanya mencakup sekitar 32 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Sisanya sekitar 45 persen sebaran infrastruktur berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang luasnya lebih dari 68 persen dari luas wilayah. Wilayah yang secara relatif cukup seimbang antara luas, sebaran penduduk dan infrastruktur adalah pulau Sumatera serta Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah lainnya cenderung timpang,

baik kelebihan penduduk seperti pulau Jawa maupun yang kepadatan penduduknya relatif rendah seperti di Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Lebih lanjut, babak baru persaingan global di kawasan ASEAN akan segera tiba melalui pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Momentum tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terperosoknya Indonesia dalam menghadapi MEA tersebut. Pada pertemuan *ASEAN Senior Transport Official* 26 November 2012 lalu di Bali, telah disepakati melaksanakan tiga proyek vital yang akan menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Proyek tersebut antara lain jaringan jalan tol ASEAN (*ASEAN Highway Network*), jalur rel Kunming Singapura (*Singapore Kunming Rail Link*), dan studi kelayakan jaringan kapal penyeberangan (ro-ro) maupun angkutan laut. Adanya rencana ketiga proyek tersebut membawa konsekuensi bahwa arus barang dan jasa dari luar negeri akan semakin deras. Ini artinya pasar Indonesia akan semakin mudah diserbu oleh produk-produk luar. Jika Indonesia belum siap dalam memperkuat daya saing domestik salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur, maka Indonesia akan menghadapi gempuran produk-produk dari luar negeri.

Jika Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara-negara lain, pembangunan infrastruktur harus segera digencarkan. Apalagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diberlakukan pada 2015. Jika kondisi infrastruktur masih mencemaskan, bukan tidak mungkin Indonesia hanya akan menjadi penonton dan pasar bagi komoditas impor negara-negara lain karena rendahnya daya saing atau tingginya biaya logistik.

6.3.1. Keterpurukan Sektor Riil

Potret perekonomian Indonesia nampaknya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan sepanjang pemerintahan SBY. Jika melihat struktur PDB dari sisi permintaan, terlihat jelas bahwa konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB, sekitar 55 persen. Sedangkan kontribusi pemerintah terhadap PDB melalui konsumsi pemerintah hanya berkisar 8-9 persen.

Fakta tersebut menggambarkan betapa besarnya kontribusi masyarakat terhadap perekonomian domestik. Meskipun kinerja ekspor melambat dan impor meningkat sehingga mengakibatkan defisit, pertumbuhan tetap terjaga karena konsumsi masyarakat yang luar biasa. Namun demikian, menjadi sangat ironis ketika mengetahui bahwa sebagian besar produk yang dikonsumsi masyarakat bersumber dari impor. Ini artinya ekonomi nasional begitu rapuh dan sangat bergantung kepada negara lain. Pasar domestik yang besar ini justru lebih dinikmati oleh para pelaku usaha asing.

Menjamurnya barang-barang impor mulai dari komoditas pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, barang elektronik, dan lain-lain, menunjukkan gagalnya peran pemerintah dalam menstimulus sektor riil. Problem mendasar yang menyebabkan tidak kokohnya ekonomi domestik ialah kegagalan pemerintah dalam melaksanakan transformasi fiskal. Pemerintah tidak berani merealokasi separuh dari belanja subsidi BBM misalnya, dialihkan untuk pembangunan infrastruktur ataupun untuk program-program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat.

Selama ini pemerintah sudah merasa puas dengan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidaklah cukup menggambarkan

pembangunan merata dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harusnya dicerminkan juga oleh distribusi pembangunan dan distribusi pendapatan secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah. Perekonomian nasional mestinya ditopang oleh pembangunan di sektor riil karena berkaitan langsung dengan rakyat. Sektor riil-lah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan berdampak langsung pada peningkatan konsumsi dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah semestinya memprioritaskan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang mempunyai kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar, seperti pertanian, UMKM, dan industri padat karya.

Keberpihakan Pemerintah dalam menggerakkan sektor riil hanya terlihat pada penggelontoran kredit usaha rakyat (KUR). Berdasarkan data dari Komite KUR (2013), realisasi KUR selama semester I-2013 mencapai Rp21,9 triliun atau tumbuh 41,3 persen dari semester I-2012 (Rp15,5 triliun). Jumlah penerima KUR sepanjang semester I-2013 sebanyak 8,9 juta debitur atau meningkat 34 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi KUR sejak 2008 hingga Juni 2013 telah mencapai Rp119,55 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (Rp68,12 triliun), disusul sektor pertanian (Rp19,6 triliun). Kehadiran program KUR tersebut sudah barang tentu memiliki implikasi positif terhadap penguatan ekonomi nasional.

Di samping tantangan fiskal, faktor lain yang juga turut mempengaruhi kinerja sektor riil datang dari sektor moneter dan perbankan. Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang memiliki peran cukup besar dalam mendorong kemajuan sektor riil, nyatanya justru membuat kebijakan yang kontraproduktif. Sepanjang 2013 ini saja, suku bunga acuan (*BI rate*) terus

merangkak naik dari 5,75 persen pada Januari 2013 menjadi 7,5 persen pada November 2013. Implikasinya, industri perbankan juga akan menaikkan bunga kredit modal ataupun kredit investasi. Bertambahnya suku bunga kredit tersebut tentunya semakin mempersulit sektor riil dalam mengakses pembiayaan dari industri perbankan.

Berpijak pada kondisi tersebut, semestinya otoritas moneter membuat kebijakan yang mendukung sektor riil domestik, yakni dengan menurunkan suku bunga acuan (*BI rate*). Dengan demikian, fungsi intermediasi sektor perbankan akan semakin berperan dalam memacu tingkat produksi sektor riil, baik oleh pelaku UMKM maupun industri besar. Penurunan suku bunga acuan memiliki fungsi yang begitu strategis dalam mengakselerasi tingkat penawaran produksi nasional.

Selain itu, sektor ekonomi rakyat tentu akan lebih bergerak maju apabila sektor lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi juga turut serta dalam perluasan keterkaitan program (*linkage*) antara bank umum, koperasi simpan-pinjam, unit jasa syariah dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, berbagai stimulus ekonomi yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah dapat diperkuat dengan kebijakan moneter. Kebijakan stimulus ekonomi secara langsung difungsikan untuk menjaga stimulus daya beli masyarakat, sehingga setiap terjadinya peningkatan produksi pada sektor riil dapat diikuti oleh kenaikan permintaan masyarakat.

Rakyat berharap, pemerintahan yang akan datang dapat mendesain kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada penguatan ekonomi domestik, utamanya terhadap sektor riil. Harapannya, dengan kehadiran stimulus dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah akan

semakin meningkat. Di samping itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

6.4. Keterbatasan Peranan Sektor Keuangan

Untuk mencapai suatu sasaran tembak diperlukan amunisi yang tepat. Jika kerangka yang demikian diadopsi maka dalam mencapai target-target pembangunan seharusnya perekonomian memiliki infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud dapat bersifat fisik maupun nonfisik. Satu bagian yang penting dari infrastruktur nonfisik tersebut adalah keberadaan sektor keuangan.

Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk menilai peranan sektor keuangan di dalam perekonomian. Beberapa indikator yang lazim digunakan dapat dibedakan menurut ukuran mikro dan ukuran makro. Meski belum menunjukkan kondisi riil yang terjadi di dalam perekonomian namun ukuran-ukuran tersebut dapat menjadi gambaran kasar dari performa sektor keuangan di suatu negara.

Dari sisi mikro ukuran kedalaman sektor keuangan dapat dirujuk dari penyaluran kredit. Bagi perekonomian yang masih mengandalkan sektor perbankan (*bank based*) sebagai penyedia dana pembangunan maka ukuran tersebut tergambar dari angka *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Untuk ukuran ASEAN, pencapaian LDR Indonesia relatif rendah. Pada 2012, LDR Indonesia hanya 83,58 persen hanya lebih baik dari India 77,95 persen. LDR Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam masing-masing 89,87 persen; 113,58 persen; 117,72 persen; dan 131,94 persen.

Untuk ukuran makro dapat dirunut dari beberapa rasio seperti rasio jumlah uang dalam arti luas (M2) terhadap PDB,

rasio kredit terhadap PDB, serta kapitalisasi pasar saham. Rasio M2/PDB di Indonesia per 2012 hanya 40,1 persen dan merupakan angka terendah dari beberapa negara sekawasan. Meski rasio ini membandingkan besaran PDB yang berbeda namun angka ini dapat memberikan sedikit cerminan ketersediaan dana pembangunan. Rasio M2 terhadap PDB beberapa negara pada 2012 dijelaskan sebagai berikut: Hongkong 438,7 persen; Jepang 241,6 persen; China 193,9 persen; Malaysia (M3) 144,3 persen; Korea 144,3 persen; Singapura 137,6 persen; Thailand 124,8 persen; Vietnam 108,4 persen; India (M3) 83,3 persen; Brunei 65,9 persen; Cambodia 50,5 persen; Laos 49,1 persen; Filipina 48,1 persen; Myanmar 36,7 persen.

Kedua, rasio kredit terhadap PDB. Ukuran ini menjelaskan besarnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDB. Sampai 2012, rasio kredit terhadap PDB di Indonesia hanya 42,57 persen. Pencapaian tersebut tergolong rendah untuk perekonomian yang berada pada fase ekspansi. Untuk cakupan regional rasio performa Indonesia hanya lebih baik dari Brunei dan Kamboja masing-masing 13,01 persen dan 33,82 persen. Rasio ini di Jepang dan Thailand adalah 346,11 persen dan 169,29 persen sedangkan Korea Selatan; China; Malaysia; Singapura; India dan Filipina masing-masing 168,70 persen; 155,12 persen; 133,84 persen; 99,54 persen; 76,59 persen dan 50,86 persen.

Ketiga, kapitalisasi pasar saham terhadap PDB. Rasio lazim digunakan untuk mengukur kemajuan sektor keuangan suatu negara. Rasio ini di Hongkong mencapai 421,3 persen pada 2012. Malaysia memiliki rasio 156,9 persen sedangkan Singapura 149,8 persen dan Filipina 105,6 persen. Sampai 2012, rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB Indonesia baru 45,2

persen; jauh di bawah Korea Selatan 104,5 persen; Thailand 99,2 persen; Australia 84,3 persen; Papua New Guinie 68,3 persen; India 67,4 persen; dan Jepang 61,8 persen.

Upaya meningkatkan peranan sektor keuangan tidak hanya melulu berfokus rasio-rasio di atas. Harus ada perbaikan dalam berbagai indikator sebagai upaya meningkatkan daya saing sektor keuangan. Apalagi sektor keuangan akan menghadapi tantangan dari integrasi ekonomi seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

Untuk mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap daya saing sektor keuangan, dapat merujuk pada kajian *World Economic Forum* (WEF). Beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor keuangan adalah (i) ketersediaan layanan keuangan, (ii) keterjangkuan layanan keuangan, (iii) pembiayaan melalui pasar modal, (iv) Kemudahan akses pinjaman, (v) ketersediaan modal ventura (vii) tingkat kesehatan bank, (viii) aturan Bursa Efek, dan (ix) Indeks *Legal Rights*.

**Tabel 6.4. Indikator Pengembangan Pasar Keuangan
Beberapa Negara**

	Indo	India	Mly	Sing	Thai	Fil	Chi	Korea
Ketersediaan layanan keuangan	51	45	22	5	26	40	70	92
Keterjangkuan layanan keuangan	43	38	15	4	32	31	51	69
Pembiayaan melalui pasar modal	29	18	9	7	14	27	38	75
Kemudahan akses pinjaman	16	38	5	4	23	37	32	118
Ketersediaan modal ventura	17	27	7	6	41	40	16	115
Tingkat kesehatan bank	70	49	40	5	39	36	72	113
Aturan Bursa Efek	57	27	18	5	31	38	63	94
Indeks <i>Legal Rights</i> , 0–10 (best)	3	8	1	1	5	4	6	8

Sumber: *World Economic Forum*, 2013

Hampir pada seluruh variabel yang menjadi penyusun daya saing sektor keuangan di Indonesia berada di posisi terendah dibandingkan negara lain. Persoalan ketersediaan layanan dan keterjangkauan keuangan di Indonesia masih terpusat di perkotaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil kajian Bank Dunia yang menyebutkan keterjangkauan sektor keuangan di Indonesia baru 60 persen. Pembiayaan pasar modal di Indonesia belum begitu berkembang karena minimnya sosialisasi sehingga masyarakat belum mengenal karakteristik penyedia modal tersebut. Karakteristik tersebut mencakup potensi keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan.

Akses pembiayaan di Indonesia masih terkesan sulit. Kondisi tersebut disebabkan belum berkembangnya skim-skim pembiayaan yang mampu menyentuh masyarakat kecil. Sebagai negara dengan topangan sektor UMKM seharusnya keberadaan lembaga pembiayaan yang berskala bisnis UMKM haruslah dominan. Saat ini ketersediaan pembiayaan pada sektor ini baru di topang oleh beberapa bank umum seperti BRI, BTPN, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kebutuhan dana segar bagi pengembangan bisnis di daerah sangat terasa. Hal tersebut tergambar dari peningkatan realisasi kredit (NPL yang rendah) meski dengan tingkat bunga yang tinggi. Sebagai contoh saja, suku bunga kredit BPR bisa melebihi 60 persen per tahun. Namun pertumbuhannya tetap saja positif sepanjang tahun. Bank-bank pembangunan daerah yang sebetulnya lebih memahami seluk beluk daerah tidak mampu berbuat banyak.

Tingkat kesehatan bank di Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Rasio permodalan terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masih di atas 15 persen. Rasio

permodalan untuk Tier 1 juga masih relatif tinggi dan masih jauh di atas ketentuan Basel III. Rasio kredit macet terhadap total penyaluran kredit juga masih rendah di bawah 5 persen namun perbankan nasional bermasalah pada sisi efisiensi. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank umum masih di atas 70 persen, jauh di atas pencapaian negara sekawasan pada kisaran 40 hingga 60 persen.

6.5. Rekomendasi INDEF

6.5.1. Membangun Kedaulatan Pangan

Upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus difokuskan untuk membangun keempat dimensi ketahanan pangan; ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas dan utilisasi pangan secara lebih komprehensif. Hanya dengan langkah-langkah yang komprehensif itulah, keberdaulatan pangan dan kemandirian suatu bangsa dapat diraih oleh Indonesia.

Pertama, peningkatan produksi. Langkah konkrit untuk meningkatkan ketersediaan pangan antara lain : (a) Reforma Agraria terutama dalam hal perbaikan manajemen usahatani, peningkatan produktivitas dan inovasi kelembagaan pertanian, termasuk mengakomodasi dan memanfaatkan kearifan lokal. (b) Alokasi APBN untuk meningkatkan kapasitas petani dan SDM pertanian. (c) peningkatan infrastruktur produksi pertanian (jaringan irigasi dan drainase), (d) mengendalikan konversi lahan pertanian subur untuk non pertanian, (e) pencetakan sawah-sawah baru di luar Jawa.

Kedua, sistem insentif baru yang berbasis inovasi. Insentif terutama diberikan untuk mendorong penerapan dan efisiensi teknologi inovasi. Dalam hal ini, penguatan strategi penelitian dan pengembangan (R and D) dan penelitian untuk

pengembangan (R for D) guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dunia usaha dan sektor swasta Indonesia secara umum perlu secara nyata melaksanakan kemitraaan strategis dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pangan. Hanya dengan R-and-D dan R-for-D inilah, inovasi baru akan tercipta, sehingga daya saing Indonesia akan meningkat berlipat-lipat. Misalnya, untuk melakukan antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengembangan varietas pangan baru, yang lebih tahan musim kering dan tahan gangguan hama-penyakit tanaman, dapat memanfaatkan teknologi baru, termasuk melakukan rekayasa genetika yang mampu menjawab tantangan baru ke depan yang lebih dinamis.

Ketiga, pembangunan cadangan pangan (pokok) tingkat nasional dan daerah. Cadangan pangan ini dapat menjadi alternatif terbaik untuk stabilisasi apabila terjadi bencana alam atau musim paceklik yang berkepanjangan. Secara legal-formal, aransemen kelembagaan dan kebijakan pangan mengamanatkan bahwa masyarakat dan pemerintah memelihara cadangan pangan yang bersifat pokok. Dalam konteks otonomi daerah, klausul yang sangat jelas adalah bahwa ketahanan pangan merupakan “urusan wajib” bagi pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007. Upaya pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dapat menjadi komplemen dari cadangan beras pemerintah (CBP) di tingkat pusat (yang dikelola Perum Bulog). Prasyarat, kriteria, dan indikator untuk mewujudkan cadangan pangan regional ini memang perlu secara rinci dirumuskan, agar meminimalisir upaya perburuan rente dari para petualang.

Keempat, stabilisasi harga pangan dan skema perlindungan harga produk pertanian kepada petani. Ketegasan kebijakan ini

amat diperlukan mengingat ancaman eskalasi harga pada masa paceklik dan fluktuasi harga pada masa panen dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga menjadi signal ketidakpasian perlindungan pada petani pangan di daerah perdesaan dan konsumen miskin di perkotaan. Misalnya, untuk membantu meningkatkan stabilisasi harga pangan di daerah, para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, perlu secara aktif memberdayakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kelembagaan ini perlu lebih membumi, tidak hanya beranggotakan para pejabat sibuk di tingkat moneter dan fiskal di daerah, tetapi perlu melibatkan para akademisi di daerah, yang lebih sering bergelut dengan analisis teknis ekonomis, dan lebih sering berhubungan dengan masyarakat sebenarnya.

Kelima, upaya penganekaragaman atau diversifikasi pangan, terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi dan industri pangan, sebagai langkah sentral dan strategis dalam utilisasi pangan. Diversifikasi pangan yang berbasis kearifan dan budaya lokal akan sangat kompatibel dengan strategi pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan kondisi demografi Indonesia yang plural heterogen. Pengembangan teknologi dan industri pangan disesuaikan dengan kandungan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Tantangan diversifikasi pangan perlu dijawab dengan pengindustrian pangan, yang melibatkan sektor swasta dan basis ekonomi petani di perdesaan, agar nilai tambah dan dampak multiplikasinya dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Keenam, perbaikan tata niaga komoditas pertanian. Pemerintah harus turun tangan dan mempunyai badan penyangga stok untuk komoditas pangan strategis. Pemerintah harus dapat menciptakan sistem tata niaga yang sehat dan dapat

mengendalikan tata niaga komoditas pangan strategis agar tidak dikuasai oleh kartel.

6.5.2. Mewujudkan Kedaulatan Energi : Solusi Sisi *Demand-Supply*

Berpijak pada berbagai persoalan energi saat ini dan sebagai upaya mencapai kemandirian energi nasional ke depan, maka perbaikan harus dilakukan baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Dari sisi *supply*: *Pertama*, regulasi, khususnya tentang transparansi dan akuntabilitas *lifting* minyak, harus ditinjau kembali untuk diperketat. Dengan demikian, diharapkan pelaporan *lifting* minyak oleh semua perusahaan energi di Indonesia sesuai dengan tingkat produksi sebenarnya. Bila hal ini terjadi, maka selisih antara pasokan dengan permintaan tidak terlalu besar, sehingga akhirnya formulasi kebijakan fiskal Indonesia lebih mudah dan efektif.

Kedua, sebagai upaya untuk meningkatkan secara riil *lifting* minyak, dalam dalam beberapa tahun ke depan dilakukan realokasi atas struktur belanja negara. Maksudnya, struktur belanja APBN dalam beberapa tahun ke depan dialokasikan untuk menambah penyertaan modal pemerintah kepada Pertamina untuk digunakan mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru. Dengan skema ini diharapkan kuantitas perusahaan energi asing sekaligus pangsa eksplorasinya tidak bertambah lagi, dan di sisi lain terjadi peningkatan *lifting*. Di luar itu, perlu juga dilakukan evaluasi skema subsidi BBM secara komprehensif untuk mengurangi tekanan fiskal pada APBN serta pemanfaatan subsidi untuk pembangunan infrastruktur energi

seperti peningkatan kapasitas kilang dan pembangunan kilang baru, pembangunan energy alternative terbarukan, dll.

Ketiga, peningkatan pasokan energi, terutama di luar Jawa melalui peningkatan produksi; peningkatan kegiatan eksplorasi dan *recovery* sumur minyak yang sudah tua perlu dilakukan. Selain itu, memperbaiki strategi sisi *supply* yaitu dengan

Dari sisi *demand*: *Pertama*, pentingnya pengurangan pemborosan BBM pada sektor transportasi, pembatasan kendaraan pribadi, pengembangan transportasi publik dan perbaikan infrastruktur jalan.

Kedua, konversi penggunaan keenergi alternatif lain seperti; gas, batubara, dan panas bumi serta pengalihan energi ke sumber energi alternatif terbarukan non-pangan.

Ketiga, meningkatkan proporsi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan peremajaan lingkungan pasca tambang (khususnya untuk pemanfaatan energi alternatif seperti batubara) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang/daerah penghasil.

6.5.3. Akselerasi Infrastruktur

Menyikapi berbagai persoalan yang mendera infrastruktur tersebut, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain merealisasikan secara konsisten pembangunan infrastruktur dengan target yang lebih terukur. Beberapa langkah dan solusi atas permasalahan tersebut antara lain, *Pertama*, persoalan keterbatasan dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dapat dipecahkan antara lain dengan cara membentuk lembaga pembiayaan khusus infrastruktur; melalui pembiayaan perbankan, terutama bank BUMN; pemanfaatan sumber pendanaan dari dana pensiun dan asuransi; serta IPO BUMN

yang terkait infrastruktur. Adapun opsi mengeluarkan surat utang/obligasi sebagai modal pembiayaan dan instrumen pembiayaan bilateral, multilateral, dan internasional harusnya menjadi opsi terakhir jika sumber-sumber pembiayaan utama sudah tidak dapat dilakukan.

Kedua, menjalin kerja sama dengan sektor privat domestik untuk mengerjakan infrastruktur jalan tol dan pelabuhan. Pemerintah dapat memberi aneka insentif agar sektor swasta tertarik masuk ke bidang infrastruktur, seperti jaminan terhadap risiko proyek yang diperjanjikan dengan pemerintah guna meningkatkan kelayakan credit (*creditworthiness*) proyek, kepastian lahan, fleksibilitas negosiasi variasi transfer tingkat risiko dari pemerintah ke sektor swasta, dan lain-lain. Lebih penting lagi, dibutuhkan komitmen politik untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, terkait penyelesaian masalah ketimpangan antarsektoral harus dimulai dengan prioritas pembangunan infrastruktur di sektor pertanian dan masyarakat perdesaan. Selama ini proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan jalan (tol), listrik (di perkotaan dan sektor industri), dan lain-lain. Padahal sektor pertanian merupakan sektor terbesar yang menjadi tumpuan mata pancaharian penduduk Indonesia. Untuk itu pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan seperti bendungan, irigasi, jalan perdesaan, dan air bersih harus menjadi prioritas. Apalagi pemerintah telah mencanangkan target ambisius di sektor pertanian yakni swasembada pangan.

Keempat, terkait penyelesaian masalah ketimpangan antarwilayah dapat dipecahkan dengan pembangunan di sektor maritim/kelautan, tujuan antaranya ialah konektivitas antarpulau. Sektor kelautan sangat perlu diperhatikan karena dua per tiga

luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Apabila sektor kelautan dikembangkan, maka pembangunan Indonesia bagian timur akan lebih mudah dicapai sebab sumber daya kelautan sebagian besar berada di wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur di sektor kelautan pada 2013 sedikit terbantu dengan adanya pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar Rp2,88 triliun untuk perbaikan konektivitas domestik dan internasional, khususnya dalam hal perbaikan pelabuhan. Kabar baik juga datang dari Agen Pembangunan Perancis (AFD) yang menawarkan pinjaman secara langsung (*direct loan*) kepada perusahaan-perusahaan BUMN tanpa melalui perantara dan jaminan pemerintah. Pinjaman senilai US\$400 juta (Rp3,85 triliun) tersebut diperuntukkan bagi pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.

Masih banyak persoalan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya kapasitas birokrasi dan koordinasi pemerintah/kementerian. Kasus korupsi perlu benar-benar disikapi pemerintah secara serius karena hal itu membuat kualitas infrastruktur menjadi sangat rendah. Sementara itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah, pelibatan sektor swasta, dan pemihakan terhadap sektor pertanian/pedesaan harus diupayakan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki manfaat ekonomi, namun juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan.

6.5.4. Membangkitkan Sektor Riil

Menata dan membangun sektor riil di Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Terdapat banyak pilihan strategi yang dapat ditempuh pemerintah melalui instrumen fiskal maupun sektor moneter. Utamanya adalah

memerkuat stimulus fiskal. Misalnya peningkatan pembiayaan sektor Perbankan ke sektor riil dengan menambah anggaran pada program kredit usaha rakyat (KUR), pembangunan Infrastruktur dan Logistik, juga penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Lebih lanjut, otoritas moneter semestinya membuat kebijakan yang mendukung sektor riil domestik, misalnya dengan menurunkan suku bunga acuan (*BI rate*). Dengan demikian, fungsi intermediasi sektor perbankan akan semakin berperan dalam memacu tingkat produksi sektor riil, baik oleh pelaku UMKM maupun industri besar. Penurunan suku bunga acuan memiliki fungsi yang begitu strategis dalam mengakselerasi tingkat penawaran produksi nasional.

6.5.5. Memperdalam Peranan Sektor Keuangan

Upaya untuk memperdalam peranan sektor keuangan harus melibatkan peranan berbagai *stakeholder*. Hal terpenting, pemerintah harus berperan dalam memperbaiki iklim investasi agar dunia usaha semakin bergairah sehingga meningkatkan permintaan pembiayaan kepada sektor keuangan. Untuk itu dua langkah penting yang harus secara konsisten dan kongkrit dilakukan adalah:

Pertama, pendalaman peranan sektor keuangan harus berfokus pada perbaikan sisi efisiensi sektor keuangan yang selama ini menjadi persoalan di negara-negara berkembang. Sisi efisiensi tergambar dari tinggi-rendahnya harga dana pasar.

Kedua, sebagai negara yang ditopang oleh sektor UMKM, upaya pendalaman sektor keuangan juga dapat dilakukan dengan memperbanyak skim-skim pembiayaan pada sektor berbasis usaha rakyat.



Bab 7

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014

Ekonomi Indonesia sebenarnya tumbuh dan berkembang cepat. Dalam satu dasawarsa terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen. Tentu saja sekadar tumbuh saja tidak cukup. Pergeseran struktur perekonomian yang menyertai kinerja pertumbuhan tersebut juga penting diperhatikan. Tujuannya agar semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar daya dukungnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya juga harus diikuti dengan tingkat daya tahan perekonomian domestik yang semakin tangguh dalam meredam gejolak tekanan perekonomian global. Urgensi inilah yang mendasari fokus analisis INDEF dalam melakukan evaluasi kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2013 dan proyeksi ekonomi 2014.

Pada 2013 perekonomian Indonesia dihadapkan pada berlanjutnya defisit neraca perdagangan yang disertai dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, serta defisit primer APBN. 'Quarto deficit' ini membuktikan mulai melemahnya sendi-sendi fundamental perekonomian nasional.

Sungguh pun pertumbuhan ekonomi masih dapat mencapai 5,82 persen hingga triwulan III 2013. Namun, melihat begitu cepatnya nilai tukar rupiah melemah dari Rp9.800/USD pada Mei menjadi tembus Rp11.000/USD pada Agustus oleh wacana rencana *tapering off* dan defisit transaksi berjalan yang tidak segera membaik, menjadi relevan untuk mempertanyakan akankah krisis ekonomi keuangan Indonesia akan berulang di masa mendatang?

Jawabannya gampang, lihat saja sektor luar negeri dan keseimbangan eksternalnya: keseimbangan ekspor dan impor barang, apakah sektor jasa sudah berkurang defisitnya, dan bagaimana kondisi akhir dari neraca transaksi berjalan. Selain itu, apakah masih ada keseimbangan arus modal masuk ke dalam negeri yang membantu peningkatan cadangan devisa.

Sejauh ini jawabannya masih meragukan untuk dapat meyakini kuatnya keseimbangan eksternal Indonesia di tengah ketiadaan respons kebijakan ekonomi yang memberikan solusi terhadap lemahnya sektor luar negeri Indonesia. Dalam jangka pendek, jika tanpa adanya terobosan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri dan impor BBM, niscaya akan sulit Indonesia terhindar dari jebakan defisit neraca perdagangan. Apalagi ketergantungan impor juga telah menjalar pada komoditas pertanian, tidak hanya kebutuhan pangan tapi juga kebutuhan komoditas hortikultura dan peternakan. Hanya sub sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang mengalami surplus, itu pun karena kekayaan alam yang tinggal dikeruk.

Menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, sementara perekonomian hanya bertumpu pada nisbah sumber daya alam, membuat perekonomian Indonesia butuh perubahan.

Seiring tahun politik yang menyertai perjalanan ekonomi Indonesia tahun depan, tentunya solusi-solusi fundamental, kreatif dan implementatif dari para calon pemimpin 2014 sangat dinantikan. Siapapun pemimpin yang terpilih pada 2014 nanti, agenda penyelamatan ekonomi Indonesia dari potensi krisis yang kian nyata harus diutamakan.

7.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Lain

Penyusunan PEI 2014 oleh INDEF dilakukan untuk memberikan alternatif pandangan tentang *outlook* ekonomi tahun depan. Beberapa publikasi *outlook* ekonomi telah dilakukan oleh lembaga lain seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank (WB)*, *Asian Development Bank (ADB)*, Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah. Indikator yang menjadi fokus beberapa lembaga ini terutama pertumbuhan ekonomi. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 sebesar 5,5 persen. WB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,3 persen. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 sebesar 6,0 persen. BI pada acara Pertemuan Tahunan Perbankan 14 November lalu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 sebesar 6,0 persen (5,8 – 6,2 persen). Sementara Pemerintah pada asumsi makro APBN 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen.

7.2. Pertumbuhan Ekonomi 2014

Meskipun harus disadari bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, indikator ini sering dijadikan acuan

utama dalam melihat kinerja makro ekonomi secara keseluruhan. Melihat perkembangan perekonomian yang terjadi sepanjang tahun ini dan berbagai kemungkinan situasi ekonomi ke depan, INDEF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 sebesar **5,6 - 5,8 persen**. Kalkulasi tersebut sudah mencakup potensi pertumbuhan dari pesta demokrasi.

Konfigurasi pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan masih akan sama dengan tahun 2013, yaitu dicirikan oleh dominasi kontribusi sektor konsumsi dari sisi penggunaan. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan sektor *non-tradable*¹ tetap akan lebih menonjol dibandingkan dengan sektor *tradable*.²

Dominasi sektor konsumsi jelas bukan kondisi ideal bagi upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Besarnya konsumsi yang tidak diimbangi dengan akselerasi pertumbuhan produksi dalam negeri akan membuat permintaan harus dicukupi dari impor. Implikasi selanjutnya sektor luar negeri (ekspor-impor) akan mengalami pelemahan karena meningkatnya impor dan tentu juga akan memperlemah kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dilihat dari struktur lapangan usahanya, pertumbuhan sektor *non-tradable* tetap akan melaju lebih kencang dibanding sektor *tradable* pada tahun depan, dengan pertumbuhan tertinggi

¹ Sektor *non-tradable* adalah sektor yang tidak dapat menghasilkan devisa. Maksudnya, sektor *non-tradable* ini adalah sektor yang pasar usahanya hanya domestik saja. Sektor *non-tradable* dibagi enam, yaitu sektor 1) Listrik, Gas, dan Air Bersih, 2) Konstruksi, 3) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, 4) Pengangkutan dan Komunikasi, 5) Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan, serta 6) Jasa-Jasa.

² Sektor *tradable* adalah sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun barang) dan dapat meningkatkan standar hidup (*living standard*) masyarakat. Sektor *tradable* dibagi menjadi tiga, yaitu sektor 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, serta 3) Industri Pengolahan.

kemungkinan besar tetap pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Sayangnya, pertumbuhan kencang sektor *non-tradable* tidak akan banyak berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Padahal tingkat pengangguran dan kemiskinan saat ini masih cukup tinggi dan memerlukan kebijakan ekonomi yang pro terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sektor pengeluaran pemerintah pada 2014 sebenarnya memiliki potensi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal sebesar Rp205,8 triliun pada APBN 2014 jika mampu dimanfaatkan secara tepat akan memberikan *multiplier effect* yang cukup positif bagi perekonomian. Namun, peran pengeluaran pemerintah bisa saja tidak terlalu signifikan bagi pertumbuhan ekonomi jika persoalan distribusi realisasi anggaran khususnya belanja modal tidak ada perbaikan, yaitu masih terkonsentrasi di akhir tahun. Disamping itu, hal yang perlu diantisipasi dalam periode tahun politik, besar kemungkinan konsentrasi pejabat publik juga akan lebih disibukkan dengan urusan perpolitikan yang dapat menghambat kelancaran realisasi belanja modal.

Di sisi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), diperkirakan kontribusi investasi-PMTB dalam pertumbuhan ekonomi akan sedikit menurun. Hal ini terutama didorong oleh mulai melambatnya *Foreign Direct Investment*/FDI atau investasi langsung dari luar negeri. Disamping itu, kontribusi dari pemodal domestik kemungkinan juga tidak akan meningkat pesat mengingat masih rendahnya daya saing investasi di Indonesia (hambatan regulasi, birokrasi hingga infrastruktur,dll).

Kinerja ekspor diperkirakan belum dapat pulih pada 2014 setelah mengalami defisit neraca perdagangan pada 2013, dan

bahkan saat ini juga mengalami defisit transaksi berjalan. Akibat dari basis ekspor yang masih bertumpu pada komoditas primer, perkembangan ekspor pada 2014 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan serius dari pasar global. Hal ini terjadi karena relatif lambannya pemulihan krisis Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta tren penurunan harga komoditas di pasar internasional yang belum kunjung membaik.

Kontras dengan kinerja ekspor, perkembangan impor barang ke Indonesia pada 2014 diperkirakan akan tetap tinggi dengan kecenderungan pertumbuhan impor meningkat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan potensi kelas menengah merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi negara-negara industri yang ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Gambaran sektor luar negeri ini (ekspor-impor) sekaligus menunjukkan tantangan untuk menghentikan defisit transaksi berjalan dari sisi perdagangan masih cukup berat, utamanya dari sisi impor minyak yang sangat besar untuk mencukupi konsumsi BBM di dalam negeri.

7.3. Inflasi

Secara umum tekanan inflasi sepanjang 2014 relatif menurun. Inflasi pada tahun ini sempat meningkat seiring tingginya harga kebutuhan pokok serta adanya kenaikan harga BBM. Namun pada akhir triwulan III 2013 harga kebutuhan pokok sudah mulai menurun. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut pada 2014, terlebih lagi di tahun politik 2014 kemungkinan kenaikan harga BBM sangat kecil sehingga inflasi pada 2014 diperkirakan pada kisaran **5,0 – 6,0 persen**.

Dekomposisi inflasi pada tahun depan tidak akan berubah signifikan, dengan tekanan dari inflasi *volatile food*. Gejolak

pada inflasi ini mungkin terjadi jika eksekusi *tapering off* dilaksanakan. Sementara gejala dari inflasi *administered price* berpacu dengan kemungkinan kenaikan TDL hingga tarif tol.

7.4. Nilai tukar

Pada 2014 nilai tukar rupiah terhadap US\$ akan berada pada kisaran **Rp11.000 – 11.500 per US\$**. Beberapa faktor yang perlu diantisipasi dalam perkembangan rupiah di tahun depan antara lain masih besarnya potensi defisit transaksi berjalan, rencana *tapering off* Amerika, cukup besarnya utang swasta dan utang pemerintah, serta harga minyak seiring masih tingginya impor BBM. Sementara faktor pendukung stabilitas rupiah terutama adalah cadangan devisa Bank Indonesia yang masih cukup besar dan stabilitas makro ekonomi terutama potensi pertumbuhan ekonomi yang masih di atas rata-rata kawasan ASEAN.

7.5. Pengangguran dan Kemiskinan

Pada 2014 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan akan berada di kisaran **6,0 persen**. Data rata-rata tingkat pengangguran dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan, dari 7,3 persen (2010), 6,7 persen (2011), 6,2 persen (2012), 6,1 persen (2013). Namun, penurunan ini belum cukup sepadan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang hampir selalu berada di atas 6 persen pada periode-periode tersebut, kecuali pada 2013 yang diperkirakan ekonomi akan tumbuh di bawah 6 persen.

Tingkat kemiskinan pada 2014 diperkirakan sebesar **11,5 persen**. Kedua masalah klasik pembangunan (pengangguran dan kemiskinan) ini meskipun diprediksi menurun namun belum

signifikan, mengingat kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi hingga saat ini. Data tingkat kemiskinan empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dari 13,3 persen (2010), 12,5 persen (2011), 12,0 persen (2012), dan 11,7 persen (2013). Berikut Tabel 8.1 yang merangkum Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014.

Tabel 7.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014 INDEF

Indikator Ekonomi	Proyeksi 2014
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 - 5,8
Inflasi (%)	5,0 – 6,0
Kurs (Rp/US\$)	11.000 – 11.500
Pengangguran (%)	6,0%
Kemiskinan (%)	11,5%

Sumber: Proyeksi INDEF, 2013



Daftar Pustaka

- Abdullah, Said. 2012. *Pemerintah Tetap Impor Beras 720 ribu Ton*. *Investor Daily*. 29 November 2012
- Anggaran 2013 1 Januari – 31 Oktober 2013. Ditjen Perbendaharaan (diakses pada 18 November 2013)
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. 2013. *Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan III 2013 Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi, Q3 – 2013*. Diakses tanggal 16 November 2013
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. 2013. *Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan III 2013 Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara, Q3 – 2013*. Diakses tanggal 16 November 2013
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. 2013. *Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan III 2013 Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor, Q3 – 2013*. Diakses tanggal 16 November 2013
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Beberapa Periode Penerbitan _____ . 2013. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia
- _____. 2013. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- _____. 2012. Beberapa Periode Penerbitan

- _____. 2012. Statistik Indonesia 2011. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. Mengelola Stabilitas, Mendorong Transformasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan, Pertemuan Tahunan Perbankan, 14 November 2013
- Bank Indonesia. 2013. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Dalam www.bi.go.id, diakses 20 November 2013
- _____. 2013. Statistik Perbankan Indonesia. Vol : 11 No.10 September 2013
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas Negara. 2012. Laporan Realisasi APBN-P Tahun Ekspor Komoditas Udag Indonesia. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
- Fan et al. 1999. *Government Spending, Growth and Poverty in Rural India*. Journal of Agricultural Economics No 82 Vol 4. November 2000. American Agricultural Economics Association.
- Kementerian Keuangan. 2013. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.
- _____. 2013. Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. 2013. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Negara Mitra Dagang.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (diakses pada 17 Oktober 2013)
- _____. *Situasi Ketenagakerjaan Umum Di Indonesia (Agustus 2013)*. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (diakses pada 7 November 2013)
- _____. *Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2013*.
- Laporan Neraca Pembayaran. 2013. *Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan III 2013*. Bank Indonesia.
- Listiyanto, Eko. 2013. *Urgensi Stabilisasi Rupiah*. Harian Neraca, 17 Juli 2013.

- Painte, R.E. 2008. *Analisis Pengaruh Hambatan Tarif dan Non Tarif Di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udag Indonesia*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
- Tambunan, Mangara. 2009. *Ketahanan Pangan vs Ketahanan Energi*. IPB Press
- Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- World Bank. 2013. *Curbing Fraud, Corruption and Collusion in the Roads Sector*. World Bank Report.
- World Bank. 2013. Data and Statistic. www.worldbank.org. diakses 17 November 2013
- World Economic Forum. 2013. *The Global Competitiveness Report 2013-2014*. World Bank.



ada 2013 perekonomian Indonesia dihadapkan pada '*quarto deficits*' yang menunjukkan pelemahan sendi-sendi fundamental perekonomian nasional. Sungguh pun pertumbuhan ekonomi masih dapat mencapai 5,82 persen hingga triwulan III 2013. Namun, melihat begitu cepatnya nilai tukar rupiah melemah dan berlanjutnya defisit transaksi berjalan, menjadi relevan untuk mempertanyakan apakah krisis ekonomi keuangan Indonesia akan berulang di masa mendatang?

Sejauh ini jawabannya masih meragukan untuk dapat meyakini kuatnya keseimbangan eksternal Indonesia di tengah ketiadaan respons kebijakan ekonomi yang memberikan solusi terhadap lemahnya sektor luar negeri Indonesia. Menghadapi situasi demikian, sementara perekonomian lebih bertumpu pada nisbah sumber daya alam mentah, membuat kebijakan ekonomi Indonesia butuh perubahan. Kontestasi politik yang menyertai perjalanan ekonomi Indonesia tahun depan diharapkan dapat menawarkan solusi-solusi fundamental, kreatif dan implementatif bagi perbaikan perekonomian. Siapapun pemimpin yang terpilih pada 2014 nanti, agenda penyelamatan ekonomi Indonesia dari potensi krisis yang kian nyata harus diutamakan.

INDEF

Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur, Jakarta 12510

T. 021-7901001 F. 021-79194018

E: indef@indo.net.id, indef95@yahoo.co.id

www.indef.or.id